

KERAGAMAN: MERAHWAT BANGSA LEBIH BERADAB

**Kompilasi Karya Pemenang
dan Nominasi Penghargaan
Karya Jurnalistik
Bertema Kebinekaan 2016**

Keragaman: Merawat Bangsa Lebih Beradab
Kompilasi karya Pemenang dan Nominasi Penghargaan
Karya Jurnalistik Bertema Kebinekaan 2016

DEWAN JURI

Kategori Cetak

Dr. Ichsan Malik (Ichsan Malik Center)

Ati Nurbaiti (The Jakarta Post)

Andy Budiman (SEJUK)

Kategori Online

Agus Santoso (BI)

Suwarjono (AJI Indonesia)

Y. Hesthi Murthi (Independen.id)

Editor: Y. Hesthi Murthi

Cetakan Pertama: Maret 2017

Penerbit



AJI INDONESIA

Aliansi Jurnalis Independen

Jalan Kembang Raya No.6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420

www.aji.or.id

Didukung oleh



Untuk Dialog dan Perdamaian



KATA PENGANTAR ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN **MENJAGA KEBINEKAAN ADALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini, tidak serta merta membuat masyarakat pengguna internet semakin kaya pengetahuan dan wawasan. Dalam banyak kasus, air bah informasi justru mendorong polarisasi, picik, dan pemikiran yang sempit. Kenapa bisa terjadi?

Penyebabnya, mayoritas pengakses internet saat ini masuk ke media sosial, yang hanya menyajikan informasi sesuai apa yang diinginkan, dan menguatkan pendapat atau pemikiran sendiri. Teknologi informasi mendukung tampilan (algoritma) media sosial dengan menyediakan informasi sesuai yang disukai, mengikuti jejak konten yang diakses sebelumnya. Bukan informasi beragam berdasarkan waktu seperti di portal media.

Tak heran bila seorang pemilik akun, meski memiliki ribuan teman di media sosial, yang muncul hanya itu-itu saja. Atau informasi yang muncul, sesuai atau pernah diakses, dan mesin media sosial secara otomatis juga memberikan materi yang sama.

Sistem di atas, mendorong kelompok sektarian semakin menguat. Pemahaman hanya didominasi pandangan satu kelompok. Mereka yang berpandangan militan semakin

militan, sebaliknya grup toleran juga semakin terbuka. Pertukaran gagasan lintas pemahaman tidak terjadi. Ikatan solidaritas keagamaan tertentu menguat. Publik dengan gampang terpolarisasi dalam posisi pro dan kontra. Mereka yang tidak sepaham dianggap musuh dan memaksa pihak lain satu pandangan.

Karakter pengguna media sosial yang berusaha memaksakan pendapat pribadi mendapat dukungan luas dari sesama teman, dan berusaha membombardir pihak lain agar mendukungnya. Tidak ada perdebatan, pertukaran gagasan, apalagi keberimbangan atas informasi. Hanya pendapat yang sesuai dengan pemikirannya yang dikutip. Akibatnya, informasi yang disajikan jauh dari fakta, tidak berimbang dan cenderung menghakimi pihak lain.

Informasi sepotong-sepotong di media sosial inilah yang harus dihadapi jurnalis saat ini. Agar tidak terbawa arus pertempuran di ranah media sosial, jurnalis dan media sangat penting memberikan perspektif di tengah hiruk-pikuk pertengkaran, percakapan karena perbedaan pandangan. Hanya media massa yang menyajikan informasi secara faktual, berimbang, dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, akan menjadi rujukan masyarakat dalam mengakses informasi.

Media secara etik mempunyai tanggung jawab menjaga keharmonian masyarakat. Salah besar jika kemudian terjebak mengikuti polarisasi atau langgam di media sosial. Diakui kecenderungan yang terjadi, karena dalih mengejar kecepatan, keinginan mengejar klik, banyak media online mengeksploitasi konflik, menjadikan komoditas dan mendramatisasi isu sensitif. Penggunaan sumber media sosial tanpa ada proses cek dan *cross check*, disiplin verifikasi akan mengobarkan permusuhan dan kegaduhan baru.

Untuk itu, sangat penting bagi para jurnalis untuk memegang teguh prinsip dan etika jurnalistik. Termasuk ranah jurnalisme keberagaman, jurnalis diharapkan menghargai perbedaan suku, agama, ras, gender dan orientasi seksual. Termasuk menolak diskriminasi, tidak menghakimi, serta melawan radikalisme, intoleran, menolak stigma, stereotip dan prasangka.

Maraknya antikeberagaman ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyambut baik para pihak yang peduli dengan situasi saat ini, untuk ikut bersama-sama mendorong jurnalis membuat karya-karya berkualitas, berperspektif terbuka dan menjadi pelopor toleransi, dan pluralisme. Menjaga marwah kebinekaan di tengah ancaman dan menguatnya isu yang mempertajam perbedaan suku, agama, dan ras (SARA). Hanya dengan membombardir publik dengan konten jurnalistik berkualitas tentang toleransi dari jurnalis yang berwawasan terbuka, kebhinekaan kita akan terjaga.

Ucapan terima kasih atas dukungan kepada Yayasan Komunitas Indonesia Sejati (Yakins), Ihsan Malik Center, Dewan Juri, dan para jurnalis yang telah berkontribusi mengirimkan karya-karya terkait dengan isu toleransi. Terlalu bahaya bila menyerahkan nasib kebhinekaan hanya kepada segelintir penjaga media sosial. Menjaga kebinekaan adalah tanggung jawab kita bersama.

Jakarta, 19 Maret 2017

Suwarjono

Ketua Umum AJI Indonesia

KATA PENGANTAR ICHSAN MALIK CENTER

KERAGAMAN AGAMA DAN ETNIK, KEKUATAN BANGSA INDONESIA

Pascareformasi tahun 1999 ketika terjadi konflik di Ambon, Poso, dan Sampit, kita dihadapkan dengan pertanyaan besar, apakah perbedaan agama dan etnik sudah menjadi bencana bagi bangsa Indonesia? Apakah keberagaman agama dan etnik ini akan segera memporak-porandakan bangsa ini?

Padahal Indonesia justru dikenal di Asia Tenggara dan di dunia sebagai bangsa besar yang beragam, memiliki penduduk sejumlah 248 juta jiwa, terdiri dari 300 suku bangsa, memiliki 700 macam bahasa lokal atau dialek, menganut 6 agama resmi yang diakui negara serta ratusan penganut agama leluhur Nusantara.

Penduduknya berdiam di sekitar 13,466 pulau, 70 persen dari wilayah negara ini adalah lautan. Bangsa ini juga dari sejarahnya dikenal sebagai bangsa yang unik karena memiliki puluhan kerajaan Hindu yang besar dan memiliki pengaruh di wilayah Asia Tenggara. Memiliki situs Budha terbesar di dunia yaitu Borobudur. Saat ini Indonesia diketahui merupakan negara dengan populasi islam terbesar didunia.

Namun setelah konflik ini, kita seolah-olah tenggelam dengan problem internal; konflik bernuansa suku, agama dan ras (SARA), kekerasan ekstrim bernuansa agama, konflik politik, korupsi, dan ketidakadilan sosial. Kita terbelenggu penyakit ini.

Ketika terjadi momentum politik nasional seperti pemilihan presiden atau pemilihan gubernur, maka kondisi bangsa ini

tiba-tiba semakin memburuk. Kita seolah-olah kembali ke titik nol menjadi bangsa yang primitif dan emosional.

Pemerintahan baru Jokowi pada tahun 2014 mencoba menjawab semua tantangan penyakit internal ini dengan mengintroduksi “Revolusi Mental”. Bangsa ini diharapkan akan berubah *mindset*-nya, tidak terperangkap pada masa lalu atau masa kini. Tetapi mulai mengorientasikan dirinya pada tantangan masa depan.

Yang saya bayangkan adalah kembali menjadi bangsa maritime yang besar, karena kekuatan besar kita adalah di laut. Dirancang pula Indonesia harus berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian bangsa. Serta diharapkan pula akan berkembang toleransi pada bangsa ini.

Apa yang berkembang setelah 3 tahun “Revolusi Mental”, memang belum banyak yang bisa kita lihat setelah slogan kerja, kerja, dan kerja. Serta berfokus kepada ekonomi dan infrastruktur. Yang terjadi pada tahun 2016 - 2017, setelah berulang-ulang selama belasan tahun, kembali pada tahun ini kita diserang asap di mana-mana. Bahkan sudah berjatuh korban jiwa.

Tolikara di ujung timur Indonesia atau Papua bergolak, begitu juga pembakaran rumah ibadah di ujung barat Indonesia Singkil, Aceh. Poso yang terus bergolak dan menjadi ajang pelatihan untuk pengembangan terorisme. Penyerangan polisi oleh kelompok teroris. Semua itu menunjukkan semakin berkembangnya intoleransi, yang patut diduga akan mendorong terjadinya konflik, radikalisme dan ekstrimisme.

Mampukah kita bertahan dengan keragaman bangsa ini? Bisakah kita melakukan “Revolusi Mental”? Kita bisa mewujudkannya dalam kehidupan nyata sehari-hari agar dapat menjadi bangsa yang besar dan dihormati. Apa yang harus segera kita lakukan? Pertama, saya kira kita harus

kembali kepada amanat Pembukaan UUD 1945;

Sebagai bangsa yang merdeka bangsa Indonesia harus bisa duduk sejajar, saling menghargai, dan menghormati dengan bangsa lain di dunia. Itulah wujud dari martabat bangsa ini dan sudah seharusnya, dan harus diturunkan kepada pribadi-pribadi bangsa. Inilah yang seharusnya menjadi pegangan kita bersama.

Langkah strategis yang kedua adalah menyadari adanya kekuatan yang maha dahsyat di dalam diri bangsa ini, yang anehnya selalu luput dari perhatian dan justru inilah inti dari kekuatan bangsa ini, yaitu kekuatan dari keberagaman SARA bangsa Indonesia. Sejak awal pendiri republik ini sadar kekuatan dari Bhineka Tunggal Ika. Bangsa lain menghargai dan menghormati bangsa ini karena bangsa ini berhasil mengintegrasikan seluruh perbedaan SARA yang ada, tidak ada bangsa dan negara yang begitu beragam seperti Indonesia.

Melalui kekuatan Bhineka Tunggal Ika maka bangsa ini dapat menjadi subjek dari pembangunan bukan menjadi objek pembangunan. Preire menyatakan sudah fitrahnya manusia menjadi subjek yang bertindak dan mengubah dunianya. Melalui prinsip keberagaman, kita berkemampuan menghindarkan diri dari spiral kekerasan. Melalui prinsip Bhineka Tunggal Ika pula kita akan menciptakan ketahanan masyarakat Indonesia, sejalan dengan berkembangnya pendidikan bangsa, akan dapat menjadi langkah awal untuk membasmi korupsi di Indonesia.

Jakarta, 10 Maret 2017

Dr. Ichsan Malik

Ketua Ichsan Malik Center untuk Dialog dan Perdamaian

KATA PENGANTAR YAKINS

JURNALIS PENJAGA KERAGAMAN

Akhir-akhir ini, banyak pandangan menilai kebhinekaan kita semakin memudar. Terungkapnya kejahatan terorisme dan radikalisme, serta ujaran kebencian yang kita baca di media sosial, bahkan tulisan-tulisan di spanduk yang digelar di publik sepertinya membenarkan pandangan itu. Kondisi ini memprihatinkan.

Sedih, mengapa rasa dan jiwa kebhinekaan yang selama ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, seperti hilang. Di titik ini, sebagai patriot Indonesia sejati, hati dan jiwa kita harus tergerak, sesegera mungkin berupaya dan mengupayakan merajut kembali jalinan pengikat tali persaudaraan keindonesiaan kita yang terobek ini.

Indonesia kita bukan di media sosial atau di spanduk. Indonesia kita juga bukan tercermin dari sekelompok orang radikal. Indonesia kita itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Menggunakan mata hati yang lebih objektif, mari kita lihat hubungan-hubungan nyata yang terjadi sehari-hari antarwarga, antarkeluarga, antarsuku, antarkomunitas, antaragama di seantero Nusantara. Sejatinya masyarakat kita mengapresiasi dan menjalankan hidup sebagai insan Indonesia yang dari ditakdirkan berbhineka itu.

Di sisi lain, jurnalis sebagai pembawa berita, pewarta yang mampu memindahkan pengalaman pancaindera dan

pengalaman batinnya ke dalam tulisannya, bisa mengambil peran memperbaiki kondisi ini. Dilandasi kode etik jurnalistik, para jurnalis tidak boleh memanipulasi fakta. Ia diminta menceritakan peristiwa seobjektif mungkin, itulah tugasnya yang paling mulia.

Mewartakan fakta nyata dan menyajikannya kepada sidang pembaca untuk membuka mata dunia. Dari goresan pena, para pembaca, mendapat berita. Ada kabar duka tapi tentu banyak kabar tentang suka dan bahagia.

Dengan dasar pemikiran itu, maka YAKINS bekerjasama dgn AJI menyelenggarakan Lomba Karya Jurnalistik tentang kehidupan berbhineka di Indonesia untuk periode penulisan yang sudah dipublikasikan Juni 2016 sampai Desember 2016, baik di media online maupun media cetak.

Panitia sangat bersyukur karena respon dari para jurnalis yang antusias. Sekitar 230 naskah dari berbagai penjuror tanah air masuk ke meja penjurian. Ini membuktikan topik kehidupan berbhineka merupakan perhatian para jurnalis, sehingga mereka tergerak untuk menyusun artikel ataupun liputannya. Sungguh suatu fenomena yg membesarkan hati kami.

Layaknya suatu lomba, tentu tidak semua antusiasme itu bisa menjadi juara. Namun semua usaha tidak ada yang sia-sia, 20 tulisan terpilih akan dibukukan untuk menjadi *tetenger* jaman, menjadi bahan pengingat generasi mendatang tentang peristiwa yang berjalan di paruh waktu 2016, di Indonesia. Tulisan selebihnya akan digunakan sebagai bahan kajian dan masukan untuk membangun ide dan langkah ke depan.

Kami sungguh mengapresiasi antusiasme jurnalis peserta lomba. Luruskan niat dan tetaplah memelihara semangat. Ujung penamu sungguh sangat bernilai bagi pembangunan

bangsa. Kepada sidang pembaca kumpulan artikel ini, bersukacitalah, karena Bhinneka Tunggal Ika masih hidup subur di dada putra putri Ibu Pertiwi. Teruslah kita pelihara dan kita wariskan nilai nilai luhur bangsa ini kepada anak cucu. Sampaikan kabar baik ini kepada handai taulan, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air Indonesia tercinta.

Akhir kata, mewakili YAKINS, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua AJI, Pengurus Pusat AJI dan kepada Dewan Juri atas terselenggaranya kegiatan yang luarbiasa ini. Semoga pikiran, keringat dan waktu yang tercurah bisa berbuah kebaikan untuk kita semua. Terima kasih

Jakarta, 19 Maret 2017

Agus Santoso

KATA PENGANTAR JURI

“MEREKA LANGSUNG MENUTUP PINTU, JIKA ANAK-ANAK SAYA MAU IKUT NONTON TV.”

—ANGGOTA GAFATAR

Dengan sangat bangga kami dari Aliansi Jurnalis Independen mempersembahkan hasil seleksi pemenang Lomba Karya Jurnalistik Keberagaman untuk dinikmati masyarakat luas, agar menjadi sumber ilham kita bersama. Serta mendorong lebih banyak orang belajar menulis dan lebih banyak wartawan yang jeli memotret Indonesia, seperti para pemenang ini.

Kisah-kisah ini membuat kami menangis, tersenyum, terpengaruh dan terharu.

Ini adalah kisah-kisah tentang Nusantara yang saling sayang, walau banyak juga tentang warga Nusantara yang “seolah” sangat saling membenci. Tidak hanya ada derita yang berulang, meski sudah banyak laporan tentang korban pemaksaan keseragaman, yang mencuat justru setelah kita bebas dari rejim otoriter Orde Baru.

Ada banyak kisah yang mengingatkan, betapa warisan nenek moyang menghadirkan kedamaian di antara perbedaan, sehingga luka akibat perseteruan setempat pun dapat pulih kembali. Perbedaan ini menyangkut perbedaan keyakinan agama sampai perbedaan orientasi seksualitas.

Ada juga kisah yang memotret korban-korban ketidakadilan di negeri Indonesia, negeri demokratis dengan penduduk Muslim terbesar di dunia --korban ketidakadilan itu masih

banyak, walau kita dipimpin Presiden Joko Widodo, yang beresumpah akan “menghadirkan negara” dalam kampanyenya.

Setelah membaca, tidak cukup hanya menangis, marah, atau terharu. AJI mendorong lebih banyak penulis, wartawan, dan media, menyuarakan isi hati dan pengalaman mereka yang tertindas oleh upaya pemaksaan keyakinan, yang sering berkelindan dengan kepentingan politik.

AJI pun terus mendukung segala upaya untuk meningkatkan jaminan kebebasan berpikir, berpendapat dan berkeyakinan, agar tidak ada lagi warga negara yang harus ketakutan seperti dikejar teroris --bahkan terusir sampai hari ini dari kampungnya sendiri! Kisah-kisah ini mengingatkan betapa beradabnya masyarakat kita meski banyak berita tentang upaya penyeragaman.

Ancaman tentang dasar negara yang saling menghargai perbedaan tidak dapat dibiarkan. Nusantara yang kita pijak adalah hasil perjuangan kebebasan untuk setiap anak bangsa, bukan segolongan orang yang merasa lebih hebat di mata Tuhannya, dan merasa punya hak lebih menentukan keberadaan pihak lain.

AJI membela kemanusiaan, dan karena itu kami terus mendorong ketrampilan penulis dan wartawan Indonesia untuk membuat masyarakat Indonesia dan dunia luar lebih paham tentang seluk beluk Nusantara, termasuk pelajaran dari beragam pelosok tentang merawat bangsa yang lebih beradab. “Sekarang bukan zamannya intoleransi. Sudah saatnya ‘Om Toleran Om’” – warga Batu, Malang

Jakarta, 10 Maret 2017

Ati Nurbaiti

Redaktur Senior The Jakarta Post

KATEGORI CETAK

PEMENANG I:

Perjuangan di Jalan Damai

Fitri Kumalasari (Majalah *Gatra*) 3

PEMENANG II:

Intolerance Stains Yogya's Melting Pot Image

Bambang Muryanto (*The Jakarta Post*) 9

PEMENANG III:

Membaca Indonesia, Seni dan Budaya Jadi Medium Awal

Muhammad Ikhsan Mahar dan Rini Kustiasih (*Kompas*) 19

NOMINASI:

Wadah Berbagi Duta Toleransi

Flora Libra Yanti dan Putri Kartika Utami (Majalah *Gatra*) 25

Tukang Ojek Perajut Kerukunan dan Perdamaian I

Tajudin Buano (*Harian Ambon Express*) 31

Citro Menjaga Cahaya Lilin Tak Keluar saat Nyepi

Rika Irawati (*Harian Tribun Jateng*) 37

Satu Agama, Dua Ajaran

Edmiraldo N.N.Siregar (Majalah *Gatra*) 41

Direnggut Teror Setelah 'Amen'

Abdul Manan, Firman Hidayat, Deffan Purnama (Majalah *Tempo*) 45

Kami Dibayar Murah

Truly Okto Purba (*Harian Tribun Medan*) 53

Ida Ayu Akhirnya Bisa Beribadah di Pura

Furqon Ulya Himawan (*Media Indonesia*) 75

PERJUANGAN DI JALAN DAMAI¹

FITRI KUMALASARI

Para penghayat Budi Daya banyak terdapat di sekitar Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Jumlahnya, menurut Engkus, ada 350 keluarga. Lainnya ada yang tinggal di Subang, Indramayu, Majalengka, dan Sumedang. Namun, angka ini masih prediksi. Masih banyak warga yang sembunyi-sembunyi menganut Buhun. Mereka masih dikecam ketakutan dan teror.

Pada masa pemberontakan DI/TII tahun 1953-1954 para penghayat dijadikan sasaran intimidasi. Akibatnya, banyak di antaranya memeluk Islam. Pun, pada masa pemberontakan PKI orang Buhun dianggap tak memeluk agama dan komunis. “Masih banyak yang ketakutan sampai sekarang,” ulang Engkus.

Di Desa Wangun Harja sendiri, misalnya, dulu banyak penganut Budi Daya. Sekarang jumlahnya 25 kepala keluarga dengan total 150 orang penghayat. Umumnya mereka bekerja sebagai petani sayuran. Selama ini, penghayat selalu dicitrakan buruk. Terbatasnya kesempatan mereka mengakses media untuk memberikan siapa diri mereka kepada masyarakat luas dianggap sebagai salah satu sebab. “Kita, penghayat, secara

¹ Karya ini telah terbit di Majalah *Gatra*, 9 Juli 2016

umum dinilai sesat," kata Engkus.

Pemerintah pun memberlakukan diskriminasi terhadap penganut agama lokal dalam hal pemenuhan hak. Sebelum tahun 2007, kata Engkus, penganut agama minor in tak bisa menikah secara resmi. Baru saat UU Adminduk disahkan, para penghayat bisa menikah sesuai tata cara mereka.

Soal pendidikan, sulitnya regenerasi ajaran bagi penghayat adalah akses pendidikan agama di sekolah yang minim dan kadang tak diakomodasi. "Tidak ada ruang untuk mengajarkan (ajaran) kan susah." Meski demikian, sejak terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), perlahan pendidikan penghayat mulai bisa diperjuangkan. "Sekarang yang kita tuntut, penghayat juga berhak mendapat pendidikan di sekolah," Engkus menerangkan.

Sebab dalam salah satu pasal di UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dipeluknya dan diajarkan guru yang seagama. Selain itu, upaya pemenuhan hak untuk menjadi anggota Polri atau TNI, penghayat belum bisa. Sistem pendaftaran mereka hanya mencantumkan enam agama.

Untuk kolom agama meski sudah diberikan hak, Engkus menilai pemerintah masih setengah hati. Sebab, kekosongan dalam kolom agama masih dianggap sebagai ateis atau komunis.

Adalah Asep Setia Pujanegara, generasi muda Penghayat Budi Daya yang membantu advokasi warga penghayat memperoleh hak-hak sipil mereka. Asep bahkan mengalaminya sendiri ketika hendak menikah pada 2000 silam. Keduanya *kekeuh* menjalankan pernikahan seturut keyakinan penghayat. Sikap ini membuat pernikahannya tak tercatat negara.

Bersamaan dengan itu, pada tahun yang sama Asep mengajukan gugatan ke PTUN untuk peroleh hak agar pernikahannya diakui negara. "Saat itu saya sadar gugatan ini akan ditolak dan perjuangannya panjang," kata ayah dua anak ini.

Perjuangan ini dilalui Asep selama tujuh tahun hingga terbit UU Adminduk. Padahal gugatannya di PTUN dikabulkan majelis hakim sejak tahun 2002. Tetapi putusan ini dipetieskan oleh Mahkamah Agung hingga UU Adminduk terbit. Akta kelahiran anak pertamanya saja tak bisa dicantumkan nama ibu karena masalah ini. Pada saat UU Adminduk disahkan, nama ibu hanya ditambahkan dalam catatan pinggir alih-alih pembaharuan akta lahir. "Setelah itu saya merasa bahwa menjadi penghayat banyak yang harus diperjuangkan," aku Asep yang juga berprofesi sebagai arsitek.

Hal ini terus berlanjut saat Asep memiliki anak. Ia merasa harus memperjuangkan hak anak-anak penghayat lain dalam peroleh pendidikan agama sesuai yang mereka anut di sekolah. Di Organisasi Budi Daya, Asep menjadi penanggung jawab yang mengurus pendidikan warga penghayat.

Tak cuma soal advokasi ke sekolah-sekolah, tetapi juga menyusun kurikulum pendidikan agama bagi penghayat Budi Daya. Ia juga berperan sebagai pembimbing ajaran bagi penghayat muda. Pendidikan diberikan tiap malam Kamis dan hari Minggu tiap pekan.

Tanggung jawab ini ia emban sejak tahun 2008. Kepada pihak sekolah, Asep mendatangi sekolah anak-anak penghayat belajar. Ia melakukan sosialisasi tak hanya sebatas kepada warga penghayat, melainkan juga penghayat organisasi lain yang butuh bantuan. Sejak UU Adminduk diresmikan, perlahan warga di Kampung Cicalung menerima keberadaan

penghayat.

Seorang warga penganut, Ayi Endang, 44 tahun, mengakui perlahan warga memahami apa itu penghayat. Warga penghayat tak segan berbaur dengan warga biasa, termasuk membantu membangun masjid. Dalam acara-acara peringatan penghayat juga turut mengundang warga biasa. “Tetapi mereka masih segan datang. Masuk ke dalam (Pasewakan) saja takut-takut. Masih sering dianggap haram,” cerita ayah dua anak ini.

Ayi Endang secara turun-temurun tinggal di Kampung Cicalung. Pria kelahiran 14 April 1972 ini sehari-hari bekerja sebagai petani. Ia merasa tak ada kesulitan dalam kehidupan mereka semenjak 2006. Kolom agama yang mesti diisi di KTP sudah bisa dikosongkan. Pendidikan, diakui Ayi, tengah diupayakan organisasinya agar anak-anak penghayat bisa mendapat pendidikan agama penghayat di sekolah. “Pendidikan agama kami tidak mengikuti di sekolah,” imbuhnya.

Sebelum disahkannya UU Adminduk, pada kolom agama, Ayi Endang terpaksa memilih Islam agar bisa dicatatkan ke catatan sipil. Istrinya pun awalnya beragama Islam, tetapi perlahan istri mengetahui dan memahami ikut menjadi penghayat.

Kawin penghayat sendiri sama seperti kawin adat Sunda. Perihal ijab kabul pun ada. Namun, kata Engkus, prinsip perkawinan dalam penghayat yang mengawinkan orangtua. Adapun petugas catatan sipil hanya bertugas administratif saja. “Bagi kami, kawin beda agama itu tak masalah. Karena yang kawin itu orangnya, bukan agamanya,” kata dia.

Sementara itu, Ujang Iwan, 30 tahun, sudah sejak 2009 tinggal di Kampung Cicalung, Desa Wangun Harja, bersama

istri dan seorang anaknya. Sebelumnya Iwan berasal dari Desa Cikidang. Sehari-hari Iwan sibuk dengan percetakan miliknya.

Keluarga Iwan berlatar agama Islam hidup berdampingan dengan warga Penghayat Budi Daya sudah sejak lama. Menurutny, dalam kehidupan sehari-hari, hubungan sosial antara warga non-penghayat dan penghayat tak ada masalah. Eksistensi penghayat, kata Iwan, semakin kuat setelah mereka membangun Bale Pasewakan. Dana pemerintah juga turun untuk membantu para warga penghayat. Iwan sendiri pernah berupaya masuk Bale Pasewakan. Ia tahu acara perayaan penghayat biasanya pada 17 September.

Meski perlahan hak-hak masyarakat penghayat diakomodasi dalam UU Adminduk, sayangnya masih banyak aparat pemerintah yang belum memahaminya. Keberadaan penganut agama-gama minor ini masih dianggap sebagai bentuk kebudayaan saja. Bahkan, Kepala Dinas Kabupaten Bandung Barat, Wawan Herawan, menilai agama-agama minor ini sebagai kebudayaan. "Kita hanya mengawasi agar mereka tidak menjadi agama baru," ungkapnya saat ditemui *Gatra* di kompleks pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

Pengawasan ini pun dilakukan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas). Sebab, kata Wawan, hanya ada enam agama yang diakui oleh negara. Karena itu, jika kepercayaan-kepercayaan ini hendak menjadi agama sebaiknya jangan, "Kalau mereka mengaku sebagai kepercayaan ya tak masalah. Prinsipnya jangan sampai menjadi agama baru saja."

Wawan juga memaklumi jika kepercayaan-kepercayaan ini berbeda dari agama yang umum. Ia pun tak memaksakan kelompok kepercayaan ini untuk bergabung dengan salah satu agama resmi. "Sampai saat ini informasi yang kami

terima, mereka tidak menyebarkan ajaran. Hanya berkembang di sekitar lingkungan mereka saja. Justru yang kami hindari ekspansi mereka,” katanya menambahkan.

Meski dalam soal kependudukan warga penghayat diberi hak, dalam ranah pendidikan dasar anak-anak penghayat mesti tetap mengikuti pelajaran agama. Mereka diperbolehkan tak mengikuti pelajaran agama jika memang tak memiliki agama. Padahal dalam UU dijamin pemberian pelajaran agama oleh komunitas jika sekolah tak mengakomodasi guru yang seagama. “Tidak sampai sejauh itu. Itu kebijakan masing-masing kepala sekolahnya,” katanya.

Sejak kecil, Asep dikatakan musyrik dan kafir. Ia mengaku terbiasa dengan ujaran itu dan tidak lagi emosi. Namun, ia meminta pemerintah lebih bijak dalam menyikapi perbedaan. Ia hanya ingin agar hak-hak penghayat membuat KTP, mendapat pendidikan agama, dan pekerjaan tidak dipersulit hanya karena perbedaan keyakinan yang dianut. “Mereka juga warga negara Indonesia,” ungkapnya.

INTOLERANCE STAINS YOGYA'S MELTING POT IMAGE¹

BAMBANG MURYANTO

Yogyakarta has been famous as the Javanese cultural capital and a center of excellence. It has been a peaceful melting pot where people from around the world enjoy living thanks to its friendliness and affordable costs, but an increasing number of violent incidents has threatened its status as a “city of tolerance”.

When Papua Governor Lukas Enembe visited Yogyakarta recently, he spared time to meet Papuan students recovering from the trauma they suffered after police and violent vigilantes stopped them from staging a peaceful pro-independence rally.

Demianus Dabi, one of the dozens of Papuan students detained in the wake of the incident on July 15, recalled how police arrested him near his dormitory on his way from the market. He was forced to throw away the tubers he had purchased, a staple food in his ancestral land. “The pain from taking punches has gone, but the pain from seeing how they [police officers] treated my tubers remains,” he said fighting back tears. “For us Papuans, tubers symbolize motherly love.”

¹ This article was first published in *The Jakarta Post* paper edition on August 15th, 2016.

Police resorted to heavy-handed tactics and the presence of groups notorious for their intolerance, such as the Pancasila Youth, the Communication Forum of Indonesian Veterans' Children (FKPPI) and the Jogja Militia, was conspicuous. They hurled racist insults at the Papuans and the police did nothing to stop them.

In an episode reminiscent of a Hollywood cowboy flick, police officers caught a fleeing student, Obby Kogoya, on the road. He was thrown onto the asphalt, punched and kicked. An officer put his boot on Obby's head and would not let him rise, despite his begging for mercy.

On that day, social media was awash with hate memes and text messages under the hashtag of #PapuaNgamuk (Papuans run amok). Police moved in to block the students from taking to the streets and demonstrating their support for the United Liberation Movement for West Papua, which was seeking full membership in the Melanesia Spearhead Group.

"That was the first time Papuans in Yogyakarta came under extreme repression from the authorities," said Rizky Fatahillah, who is with the local chapter of the pro-bono Legal Aid Institute, which represented the students.

In Yogyakarta, the predominantly Christian Papuans have been stigmatized as heavy drinkers, shoplifters and troublemakers. Recently, the term "separatists" has been added to their ethnic profiling despite the constitutional guarantee of free speech they had planned to exercise.

Unfortunately, Sultan Hamengkubuwono X, who is also Yogyakarta's governor, did not exert his power to bring calm to the choppy political waters. Instead, he also labeled the Papuan students "separatists". "If they want to do it [promote separatism], they must leave Yogyakarta," he said.

The incident was only the latest of a large number than have increasingly tainted Yogyakarta's reputation as Indonesia's melting pot, where people from all ethnic, cultural and religious backgrounds live in harmony. The second-largest tourist destination after Bali, the city, along with Surakarta, is the center of both syncretic Javanese culture and feudalism.

Hosting such famous learning institutions as Gadjah Mada University and numerous top Islamic and Christian colleges and schools, Yogyakarta is also known as a center of excellence. Alumni leave the city having been "Javanized", or so the common adage goes. Some colleges reserve seats for and offer scholarships to students from the impoverished eastern provinces, especially Papua and East Nusa Tenggara.

But the continual violent and intolerant incidents make its nickname "City of Tolerance" sound cynical and its "miniature of Indonesia" status sound hollow.

Cases of intolerance began to rise in 2010 when conservative natives aggressively demanded that the central government endorse a law on Yogyakarta as a "special region", which was fundamentally anti-democratic. At that time, fanatical advocates were out to intimidate anyone opposing the law, asking them to leave.

Under the law passed in 2012, the royal families – the Kesultanan and Pakualaman – retained their privileges inherited from the colonial era. The provincial top job automatically goes to the sultan and deputy position to a Pakualam. While in other provinces non-private property belongs to the state, in Yogyakarta the land is claimed by the royal families, either as "Sultan ground" or "Pakualaman ground".

In a meeting with entrepreneurs in 2014, Hamengkubuwono

X made it clear that there is no such thing as “state land” in Yogyakarta; it is all the palace’s property. The families are now reregistering royal property, which often includes longtime residential areas.

The palace’s effort to reaffirm rights of land ownership already started numerous conflicts with citizens. A resort developer canceled a project at Watu Kodok Beach after residents violently rejected the palace’s claim over the property it meant to lease to the businessman.

A sand quarrying venture, which is partly owned by a royal company, PT Jogja Magasa Mining, in Kulon Progo has also met strong resistance from residents who refused to make way for the project. Within the city, construction of new hotels on property claimed by the palace also sparked disputes with locals.

Ahmad Nashih Lutfi, a lecturer at the National Land College, has recorded 16 major land ownership conflicts involving the royal families since Yogyakarta’s special status law took effect in 2012. One of them is the one on the acquisition of land to be developed into an international airport in Kulon Progo. The property is claimed as “Pakualaman ground”.

Xenophobia was exacerbated in the wake of the 2013 execution by Army Special Forces (Kopassus) commandos of six East Nusa Tenggara hoodlums detained at Cebongan Prison for drugs and the murder of one of their fellows. At the time, dark-skinned people from eastern provinces were labeled as unwelcomed “thugs”.

Yogyakarta hosts many intolerant groups, such as the Indonesia Islamic Front (FUI), the Front Jihad Islam, Laskar Jogja and Paksi Katon. Lately, the Pancasila Youth and the FKPPi have added themselves to the list. Their members

appear as “security personnel” or parking attendants at major hotels, entertainment centers and housing complexes.

Ethnic groups from eastern Indonesia, especially East Nusa Tenggara, have eastern Yogyakarta as their turf. Impunity has also given rise to the proliferation of intolerant groups that gained notoriety for attacking people of other faiths, LGBT people and events they suspect of “promoting communism”. They also often unlawfully ban construction of churches.

A 2014 survey by the Wahid Institute – a Jakarta-based rights group – placed Yogyakarta as the second-most intolerant city after Bogor, West Java, with 21 cases of sectarian violence. Police are not doing their job. They give the violent groups a free hand to go as far as suppressing freedom of speech, such as by forcibly dispersing public seminars and the screening of films they assume smack of communism.

Authorities have turned a deaf ear to intellectuals’ protests about them not doing enough to stop violence. Frustrated people have added question marks to the “Yogyakarta City of Tolerance” slogan emblazoned on banners at strategic places.

Kelli Swazey from Gadjah Mada University’s Center for Religious and Cultural Studies attributes the increasing criminality among local youths to their economic powerlessness in the face of a rising culture of consumerism that grows along with the mushrooming hotels, cafes, shopping malls and apartments.

Feeling alienated, many youths have become frustrated, short-tempered and easily tempted to join misguided religious-based groups, she says.

Arie Sujito, the head of Gadjah Mada’s school of social and political sciences, suspects that intolerant groups are in fact partners of local elites who use them as part of their tactics to

maintain control of their assets. One obvious indication: The thugs enjoy impunity.

The Indonesian police were internationally commended for bashing sophisticated terror networks, but why in the world do not they get these troublemaking vigilantes?

“Intolerance in Yogyakarta is growing because the political and economic elites have failed to cope with the social impacts of the fast economic development. They patronize intolerant groups to defend their resources,” Arie says.

You may wonder why the thugs also target intellectual exercises like public seminars. “Because these critical intellectuals are seen as a threat to the elites’ control of economic and political resources,” Arie says.

Cases of intolerance in Yogyakarta

<p>2010</p> <ul style="list-style-type: none">● When questions were raised about the special legal status enjoyed by Yogyakarta, banners were erected in many parts of the city urging those opposed to the province’s unique status to leave the province. <p>2011</p> <ul style="list-style-type: none">● November: Activist and lecturer George Junus Adijondro was driven out of his home by Yogyakartaans angry at him over statements they deemed offensive to the Yogyakarta palace.● December: A group of people calling themselves Warga Kawulo Ngayogya Hadinigrat came to the house of former Gadjah Mada University (UGM) rector Ichlasul Amal, asking him to apologize for his criticism of the public movement in support of Yogyakarta’s special status. <p>2012</p> <ul style="list-style-type: none">● January: Dozens of people from a number of Islamic mass organizations decried a discussion held by the Institute for Islamic and Social Studies that featured Canadian feminist Irshad Manji. Earlier, a planned discussion at the Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) of Gadjah Mada University (UGM) was canceled due to pressure from a number of organizations. <p>2013</p> <ul style="list-style-type: none">● October: The Indonesian Anti-Communist Front (FAKI) decried a gathering by families of victims of the 1965 tragedy at the Dharma Santi building in Godean, Sleman.● November: A number of Islamic mass organizations threatened to attack the Rausyan Fikr Foundation in Sleman, which they accused of promoting Shia beliefs. Banners	<p>condemning Shites were erected in a number of places across Yogyakarta city.</p> <ul style="list-style-type: none">● December: Sleman Regent Sri Purnomo led a campaign against the Shia branch of Islam at the UGM mosque. <p>2014</p> <ul style="list-style-type: none">● February: The Islamic Jihad Front (FJI) demanded that the Yogyakarta city administration not issue a permit for the construction of the Saksi Yehova Church in Bacio, Yogyakarta, on the grounds that it was located near a mosque.● September: Yogyakarta’s Islamic People’s Forum (FUI) demanded that a discussion on LGBT people at the Sanata Dharma University be canceled.● November: LGBT community members were attacked by a group of unidentified people while holding an event in the Tugu area.● December: A number of Islamic mass organizations expressed their objection to a joint Christmas celebration in Gunungkidul. <p>2015</p> <ul style="list-style-type: none">● July: An unknown group attempted to set fire to the Kristen Indonesia church in Sarnan, Bantul. Earlier, the FUI and FJI had protested against the church, which they claimed did not have a permit from the local administration. <p>2016</p> <ul style="list-style-type: none">● February: The FJI demanded that the Al Fatah boarding school, specifically allocated for transgender people, be closed.● May: The FKPPPI urged the police to halt the screening of <i>Pulau Buru Tanah Air Beta</i> at a number of campuses.
--	--

Young activists worried about the worsening intolerance have set up the Solidarity Forum for Peaceful Yogyakarta. They “mourn” the appalling state of intolerance in the city that

still proudly promotes itself as “peaceful-hearted”.

“Down the beaches and up the mountains, on campuses and in the streets, the peace is hard to find now,” says forum activist Ernawati. “This is because the greedy officials and their like-minded cohorts are busy fighting for a share of the ‘special region’ cake.”

Unfortunately, Sultan Hamengkubuwono X – who was awarded as a pluralist leader by the Interfaith Network in 2014 – has yet to take measures to restore Yogyakarta’s image as a city of tolerance.

RADICAL GROUP CLAIMS COORDINATION WITH POLICE, MILITARY

“Such organizations cannot be banned; they will reappear by other names anyway.”

One day in the 2015 fasting month, the field commander of the Yogyakarta chapter of the Indonesian Islamic Front (FUI), Muhammad Fuad Andreago, led dozens of his men to stage a rally at the Gunung Kidul regent’s office, 40 kilometers to the east.

Their mission: Asking her to reject the local Catholics’ application for a permit to build a grotto in the northern village of Sengonkerep. Before they marched to Gunung Kidul, they met with leaders of the Yogyakarta office of the Indonesian Ulema Council (MUI) and demanded a formal ban of Shia.

An umbrella for a host of notorious Islamic vigilante groups in Yogyakarta, the FUI is highly active and has no fear of prosecution because it coordinates with the police and military, or so it loves to claim.

During the controversy surrounding the screening of *Senyap* (Silent), a documentary on the 1965 tragedy, the FUI

forced the Indonesian Arts Institute (ISI) Yogyakarta and Gadjah Mada University (UGM) to cancel the movie screening on their campuses, although the event was strictly meant for academic purposes.

Fuad has defended his actions, which have been widely condemned as intolerant, on the pretext that FUI needs to help the short-staffed state apparatuses carry out their countless jobs.

Moreover, he knows police and military officers often lack confidence when handling certain cases, apparently for fear of losing their jobs if anything goes wrong. It is at this point, he said, that the authorities need the help of civil organizations like FUI.

Set up out of concern about the uncoordinated Islamic groups in the city, now the FUI oversees 120 paramilitary units, some 80 of which are affiliated with the Islamist United Development Party (PPP).

In addition to the FUI, Yogyakarta hosts numerous other vigilante groups — religious-based or otherwise — that have won notoriety for their intolerant actions: the Islamic Jihad Front (FJI), the Pancasila Youth, the Communication Forum of Indonesian Veterans' Children (the FKPPi, an association of families of military and police veterans), Paksi Katon, Laskar Jogja and the Indonesian Anti-Communist Front (FAKI). They were accorded an audience with Governor Hamengkubuwono in the wake of last month's incident in which police and violent groups brutally stopped Papuan students from staging a pro-independence street rally.

But in fact the various groups are not as united as they look. They disagree on some issues, resulting in occasional physical conflicts. Now, Fuad said he is planning to barge into

several “places of ill repute” defended by groups rival to the FUI.

The various vigilante groups operate on different turfs, often as rivals. True to experts’ assertion that they are groomed by political and economic elites to help protect their resources, their members are present in major establishments like hotels, entertainment centers, upscale housing complexes, bus terminals and malls, usually as “security personnel” or parking attendants.

“In the past, establishments used the service of groups affiliated with the PPP and the Indonesian Democratic Party of Struggle [PDI-P]. Now, hotels and apartments prefer using the services of professional security agencies belonging to the police and the military because the [vigilante] groups are prone to conflicts,” said Fuad, an ex-chairman of the Ka’bah Youth Movement affiliated to the PPP.

Apart from their religious motives, organizations like the FUI also enjoy the “pie” of the burgeoning tourism industry in Yogyakarta. The FUI uses its cooperative to administer a major tourist bus terminal and parking lots at business districts in the city, such as the iconic Malioboro.

The FUI started its lucrative businesses in 2008 after the then Yogyakarta mayor, Herry Zudianto, initiated empowerment programs for the masses. With it, he allowed civic groups to take part in the management of strategic places in the city.

The mushrooming intolerant groups in the city of “peaceful heart” has been blamed for increasing cases of violence that tarnish its image as a melting pot that attracts people of all backgrounds from across Indonesia.

Mr. Commissioner: National Commission on Human Rights (Komnas HAM) official Natalius Pigai talks to Papuan

students in a Papuan student dorm in Kamasan, Yogyakarta. Pigai paid a visit to investigate allegations of human rights violations by the police during a Papuan student rally in July. (The Jakarta Post/ Bambang Muryanto)

Yenni Wahid, director of the Jakarta-based rights group Wahid Institute, calls for legal action against people resorting to violence regardless of the ideology they use as a pretext. As the Indonesian Constitution guarantees freedom of association, banning bad organizations as some people are seeking will only make a mockery of democracy.

“Such organizations cannot be banned; they will reappear by other names anyway,” she says. “It is their members who trample on the laws that must be prosecuted,” said Yenny, who was only recently named co-chair of the US-Indonesia Council on Religion and Pluralism.

MEMBACA INDONESIA, SENI DAN BUDAYA JADI MEDIUM AWAL¹

MUHAMMAD IKHSAN MAHAR DAN RINI KUSTIASIH

Seni dan budaya menjadi medium dakwah para penyebar Islam pertama di Pulau Jawa. Wali sanga menjadikan seni dan budaya sebagai medium penyampai ajaran Islam, saat masyarakat Jawa pada masa itu masih dipengaruhi ajaran Hindu-Buddha. Dakwah seperti ini pun berhasil.

Di sejumlah daerah pesisir utara Pulau Jawa, karakter Islam yang pada masa awal kedatangannya di Nusantara membangun harmoni dengan adat dan budaya masyarakat setempat terlihat jelas hingga saat ini. Di Masjid Menara Kudus, Jawa Tengah, yang pada masa lalu jadi pusat dakwah Sunan Kudus, misalnya, kini masih bisa dilihat bukti arsitektur Jawa-Hindu.

Masjid Menara Kudus dengan tinggi sekitar 17 meter itu diperkirakan dibangun pada 19 Rajab 956 Hijriyah atau sekitar tahun 1549. Akulturasi antara Islam dengan kebudayaan Jawa-Hindu di masjid itu mewujud dalam bentuk bangunan menara. Kaki menaranya menyerupai Candi Jago di Malang, Jawa Timur. Candi itu dibuat pada masa Kerajaan Singasari.

Bagian tubuh hingga atap Masjid Menara Kudus serupa

¹ Karya ini telah diterbitkan Harian *Kompas* 7 Desember 2016

dengan Menara Kulkut di Bali. Seperti halnya Menara Kulkut, bagian itu juga berfungsi sebagai tempat menyampaikan pengumuman atau berita penting, misalnya, waktu dimulainya bulan Ramadhan.

Kini, ada masjid dengan kubah bercorak Timur Tengah yang dibangun belakangan untuk melengkapi menara Masjid Kudus. Nadjib Hassan (59), Ketua Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus, menerangkan, masjid baru itu dibangun untuk membuktikan bahwa Masjid Menara Kudus terbuka kepada semua kelompok.

Memasuki kompleks masjid, terlihat rombongan peziarah keluar-masuk makam Sunan Kudus yang berada di bagian belakang kompleks Masjid Menara Kudus. Jajaran makam tua di sana diperkirakan sudah ada sejak abad ke-15. Para pengunjung duduk di dekat pelataran makam dan berdoa.

Nuansa sakral terasa ketika memasuki areal makam Sunan Kudus yang berada di dalam cungkup tersendiri dengan kelambu putih yang menyelubungi. Makam tersebut sebenarnya berada di dalam sebuah bangunan khusus dengan atap kayu dan dinding kayu penuh ukiran. Bangunan itu dilengkapi sebuah pintu yang selalu ditutup. Para peziarah duduk mengelilingi bangunan berkelambu putih itu. Mereka berdoa dengan suara ritmis yang teratur.

Pada pertengahan Oktober lalu, kelambu putih yang menyelubungi makam Sunan Kudus baru saja diganti dalam suatu upacara *buka luwur*. Upacara ini dilakukan setiap 10 Muharam (10 Asyuro atau Suro). Dalam upacara ini, warga mengantre berkat, yakni bungkusan nasi dan lauk-pauk sebagai bagian dari upacara. Berkat itu dibagikan setelah luwur diganti. Setiap orang bisa mengantre berkat.

Menurut Nadjib Hassan, pada kegiatan tahun 2016, panitia

mencatat ada sumbangan 14,5 ton beras, 10 ekor kerbau, dan 70 ekor kambing untuk *buka luwur*. Semuanya berasal dari masyarakat. Setiap kali *buka luwur* bisa dihasilkan lebih dari 30.000 nasi berkat yang dibagi-bagikan kepada masyarakat.

Di kalangan wali sanga, Sunan Kudus dikenal sebagai penjaga syariat. Ia tak hanya mendirikan masjid, tetapi juga nagari Kudus yang multientnis dan multireligi. Hal itu ditunjukkan dengan larangan memotong sapi di daerah itu.

Pasalnya, bagi masyarakat setempat yang menganut Hindu ketika itu, sapi adalah hewan yang dihormati. Sebagai gantinya, warga memotong kerbau. Toleransi dan keberagaman dijunjung tinggi karena sejak dari dulu Kudus adalah wilayah yang multientnis.

HARMONI

Fenomena yang terjadi di Kudus juga bisa ditemui di Cirebon, Jawa Barat. Makan Sunan Gunung Jati selalu ramai pada malam tertentu. Seperti halnya di Kudus, nama-nama masjid awal di Cirebon juga memakai nama dalam istilah lokal.

Salah satu masjid tertua Cirebon, yakni Masjid Pejlagrahan, berada di belakang kompleks Keraton Kasepuhan Cirebon. Meski bangunan masjid itu telah banyak mengalami pemugaran, soko guru dari kayu dan bentuk atapnya yang bukan kubah tetap dipertahankan.

Ada pula Masjid Sang Cipta Rasa, yang tembok kelilingnya mengikuti gaya Majapahit atau Hindu-Jawa. Masjid yang letaknya tidak jauh dari Keraton Kasepuhan ini merupakan masjid wali sanga karena arsiteknya adalah Sunan Kalijaga.

Unsur kayu amat menonjol di Masjid Sang Cipta Rasa. Soko guru dan pasangan kayu melintang, menyusun konstruksi

bangunan. Bentuk semacam ini juga ditemui di Masjid Agung Demak dan Masjid Sunan Ampel di Surabaya. Atap masjid Sang Cipta Rasa berbentuk limasan tanpa kubah atau memolo.

Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat dari Keraton Kasepuhan Cirebon mengatakan, dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Barat seperti Cirebon, Sunan Gunung Jati tidak pernah memaksa. Unsur-unsur kebudayaan lama yang baik dan hidup di masyarakat tidak dihapuskan, melainkan justru diteruskan dengan dimasukkan unsur-unsur Islami.

Pendekatan itu diadopsi dengan baik, tidak hanya dalam penamaan dan arsitektur masjid-masjid, tetapi juga dipelihara dalam praktik budaya Cirebon. Seperti tradisi *mauludan* yang dirayakan besar-besaran dalam upacara Panjang Jimat. Dalam upacara ini, disajikan makanan dalam piring-piring panjang. Upacara peringatan *maulud* semacam ini juga dikenal di Keraton Mataram Islam di Yogyakarta, dan di Keraton Surakarta.

Tidak hanya itu, para wali juga menekankan upaya penanaman Islam melalui seni-budaya. Di Cirebon dikenal Tari Topeng yang mengisahkan lima karakter manusia. Sebagian sejarawan menilai gerakan-gerakan di dalam tari itu menyimbolkan ajaran Islam. Misalnya, Tari Panji yang dimaknai *mapan ning kang siji*, yakni Allah SWT, atau Tari Klana, yang menyimbolkan orang angkara murka yang tersesat dari ajaran agama.

Bentuk kesenian lainnya yang paling terkenal adalah wayang, yang diyakini juga menjadi media dakwah kelompok sufi tersebut. Selain melalui nyanyian anak-anak, dan alat musik seperti gamelan.

Kesinambungan dan harmonisasi adalah kata kunci dalam pendekatan damai yang diterapkan oleh wali sanga. Agus

Sunyoto, penulis buku *Atlas Walisongo*, menerangkan, kaum sufi bersifat terbuka, luwes, dan adaptif dalam menyikapi keberadaan ajaran atau aliran lain di luar Islam.

Alhasil, banyak hasil akulturasi dan asimilasi budaya antara Islam dengan Hindu- Buddha, antara lain *nyadran*, yaitu upacara mengirim doa kepada arwah leluhur yang menggantikan tradisi *sradha* yang merupakan upacara meruwat arwah seseorang setelah 12 tahun meninggal. Lalu, ada pula tradisi *tabarukan* di makam keramat, membuat bubur pada bulan Muharram, memperingati Maulid Nabi, dan peringatan *nisyfu sya'ban*.

Dengan pendekatan yang semacam itu, Islam diterima, dan cepat mendapatkan pengikut di Nusantara, utamanya di Jawa. Wali sanga dengan setiap wilayah penyebarannya sejak awal membawa pesan damai, harmoni, dan toleransi.

WADAH BERBAGI DUTA TOLERANSI¹

FLORA LIBRAYANTI DAN PUTRI KARTIKA UTAMI

Mengundang belasan anak dari sejumlah daerah di seluruh Indonesia untuk mengalami keragaman di Jakarta. Menanamkan nilai toleransi, pendidikan, dan keindonesiaan.

Pandangan Windi Magdalena menyapu sajian makan siang di Wihara Ekayana Arama, Jakarta. Mata gadis 12 tahun tersebut lantas beralih ke tangannya yang sedari tadi memutar-mutar tusuk sate. Ragu, Windi hendak memastikan sate tersebut bukan daging, melainkan jamur.

Windi sedang memastikan penjelasan Samanta, perwakilan dari pihak wihara, yang mengutarakan bahwa makanan yang dihidangkan di meja adalah menu harian yang biasanya disediakan untuk para biksu. Sederhana dan tidak ada daging. Tak mengherankan, seluruh penganan yang disajikan ala vegetarian, termasuk sate jamur bumbu kecap dan semur tempe. Untuk memastikan kebenaran ucapan Samanta, Windi melahap sate bumbu kacang tersebut. "Rasanya mirip daging, sih," ujarnya dengan rona wajah terkejut.

Bagi Windi, ini adalah kali pertama ia menyambangi

¹ Karya ini telah terbit di Majalah *Gatra*, 17 September 2016

wihara dan bertemu para pemeluk Buddha. Di lingkungan tempat tinggalnya, Desa Baumpondili, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, mayoritas penduduknya Kristen, dan sebagian kecil memeluk Islam.

Anak yang gemar menyanyi itu merupakan satu dari 14 anak peserta program SabangMerauke, akronim dari Seribu Anak Bangsa Merantau untuk Kembali. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, lantas berkumpul di Jakarta untuk melakukan serangkaian kegiatan dari 8 hingga 27 Agustus 2016. Pemilihan Jakarta sebagai lokasi program karena mencerminkan keberagaman. Berbagai suku, agama, dan ras, mudah dijumpai di kota metropolitan ini.

Kegiatan tahunan tersebut adalah sebuah program pertukaran pelajar antardaerah yang digelar SabangMerauke (SM). Mengusung moto: "Karena Toleransi Tidak Bisa Hanya Diajarkan, Toleransi Harus Dialami dan Dirasakan." Program ini menekankan tiga nilai penting untuk dikenalkan kepada para peserta: toleransi, pendidikan, dan keindonesiaan.

SM sendiri lahir dari rasa gusar tiga anak muda, yakni Ayu Kartika Dewi, Aichiro Suryo, dan Dyah Widyastuti, yang melihat konflik akibat sikap intoleransi. Keberagaman Indonesia yang seharusnya menjadi kebanggaan suatu bangsa, malah menjadi sumber pertengkaran. Mereka terpanggil menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, dideklarasikanlah SM pada 28 Oktober 2012.

"Ketiganya punya pengalaman hidup sebagai minoritas tetapi mereka merasa dihargai oleh mayoritas. Sayangnya, di Indonesia, kita sering menemukan kasus-kasus intoleransi. Itulah yang membuka mata para perumus untuk membuat gerakan SabangMerauke," ungkap Direktur Program SM, Rona Cahyantari, kepada *Gatra*.

Untuk bisa menjadi peserta SM, para calon harus menjalani serangkaian seleksi. Anak-anak yang lolos seleksi disebut Adik Sabang Merauke (ASM). Pendaftaran dibuka dari Desember hingga Februari untuk mengikuti program SM selama liburan sekolah. SM mensyaratkan para pendaftar berstatus pelajar SMP. Tujuannya untuk mengenalkan toleransi sedari dini. Karakter anak usia SMP juga lebih mudah dibentuk.

Selama mengikuti program SM, peserta bisa berbagi pandangan dan pengalaman. Kepada teman-temannya di Jakarta, misalnya, Windi ingin mengoreksi pemberitaan media soal kerukunan antarumat beragama di kampungnya, Kabupaten Poso. Selama ini Poso identik dengan konflik umat Kristiani dan Muslim. Belakangan, nama Poso kembali menghiasi pemberitaan media terkait penangkapan kelompok Santoso.

Windi lantas berkisah bahwa umat Kristen dan Islam kini hidup damai di Poso. Warga sudah bisa melihat persoalan secara jernih. Pada kasus aksi tertuduh teroris Santoso, misalnya, warga Poso melihat hal itu sebagai persoalan antara kelompok Santoso dan pihak kepolisian dan tentara. Bukan lagi jadi persoalan antara Muslim dan non-Muslim.

“Keadaan Poso tidak seperti yang ada di berita-berita media. Buktinya umat beragama di sana damai. Tahun 2016 baru terjadi malam takbiran yang dirayakan, dan itu ramai banget. Jadi Poso itu sudah damai banget,” kata siswi kelas VIII SMP Gereja Kristen 7 Tentena, Sulawesi Tengah, ini.

Selama tiga minggu menetap di Jakarta, Windi bermukim pada keluarga Muslim di kawasan Cinere. “Aku tidak ada masalah tinggal di rumah Pak Dani yang Muslim. Mereka baik. Sama anak-anaknya juga cepat akrab,” ujarnya.

Selama di Jakarta mereka tinggal di rumah keluarga

asuh yang disebut Famili SM (FSM). Menjadi FSM pun ada seleksinya. Tim SM akan mendatangi rumah para calon FSM untuk memastikan para calon FSM mendukung kesuksesan program SM. "Kita melihat interaksi di rumah, kelayakan rumah. *Home visit* ini tujuannya ingin melihat bagaimana nilai-nilai yang dianut keluarga ini," sebut Rona.

Masing-masing ASM juga akan didampingi mentor yang disebut Kakak SabangMerauke (KSM). Para KSM ini merupakan para mahasiswa. Untuk menjadi KSM pun tetap ada seleksinya. Tahun ini ada 450 KSM yang mendaftar untuk mendampingi 15 adik asuh. Kelima belas KSM yang lolos mendapatkan pembekalan materi psikologi remaja dan teknik fasilitasi. "Berharapnya mereka tidak hanya menjadi *baby sitter* si adik tapi menjadi mentornya. Satu kakak, satu adik, pendampingannya itu dari awal sampai akhir," Rona memaparkan.

Tim SM merancang ASM, pendamping KSM, serta FSM sekontras mungkin. Karakter, suku, dan agama diupayakan berbeda untuk menegaskan unsur keberagaman yang diusung SM. Salah satu orangtua FSM, Aldrin Matondang, 47 tahun, umat Kristen, misalnya, menjadi FSM dan dipercaya sebagai orangtua angkat Iseh Mohamad Asnawi dari Kudus. Asnawi berasal dari keluarga Muslim taat dengan adat-istiadat yang masih kental. Siswa kelas IX SMP 01 Kaliwungu Kudus ini bercita-cita membangun pesantren dan rumah sakit.

Aldrin memuji sosok Asnawi yang konsisten menjalankan ibadah meski tinggal di keluarga non-Muslim. Hubungan Asnawi dengan ketiga anak Aldrin pun berjalan baik. Bahkan, Asnawi kini getol belajar bahasa Inggris dibantu salah satu anak laki-laki Aldrin, Theo. Perbedaan ternyata malah menjadi perekat hubungan Asnawi dan keluarga Aldrin. Logat Jawa Asnawi yang kental sering menjadi pemecah es yang mengurai

tawa. "Saya belajar bahasa Inggris sama Theo, tapi karena saya orang Jawa, logatnya diketawain sama anak-anak Pak Aldrin," cerita Asnawi sambil tertawa.

Selama tiga minggu di Jakarta, anak-anak itu diajak mengunjungi berbagai tempat ibadah seperti masjid, gereja, wihara, dan pura. Para ASM juga dibawa tur keliling sejumlah kampus di wilayah Ibu kota agar mereka semangat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Untuk memupuk kecintaan terhadap Indonesia, para ASM diajak mengunjungi perusahaan nasional yang produknya kompetitif dengan produk luar. Selain itu, ASM bertemu sejumlah tokoh nasional. Tahun ini, mereka berkesempatan sowan ke Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan mantan Mendikbud, Anies Baswedan.

"Untuk nilai toleransi kita berkunjung ke sekolah atlet difabel. Untuk nilai pendidikan kita berkunjung ke Universitas Indonesia (UI). Kalau keindonesiaan kita ketemu para veteran. Terus kemarin dibantu Rentak Harmoni untuk mengenal kesenian daerah, belajar main musik, dan menari," Rona menjelaskan. Soal pendanaan, SM mengandalkan donasi dari perusahaan-perusahaan. Mereka juga memanfaatkan tren urunan dana melalui media sosial alias *crowdfunding*.

Selesai program SM, anak-anak ini kembali ke kampung halaman. Di daerah asal, mereka bertugas menjadi duta toleransi. Para pengurus berharap ASM nanti menyebarkan nilai-nilai toleransi, pendidikan, dan keindonesiaan yang didapat di Jakarta. Gerakan ini memanfaatkan bantuan KSM dan FSM untuk memantau perkembangan para ASM.

TUKANG OJEK PERAJUT KERUKUNAN DAN PERDAMAIAN¹

TAJUDIN BUANO

Upaya perdamaian dan kerukunan di Maluku, terus dilakukan seluruh lapisan masyarakat. Tak terkecuali, para pengojek dari komunitas Muslim dan Kristen. Mereka merajut kerukunan lewat aktivitas yang dilakoni. Stereotipe tentang Maluku yang belum sepenuhnya aman dengan provokasi yang negatif, perlahan dikikis.

Rabu (6/7) pukul 21.00 wit malam, pangkalan ojek Batu Merah Dalam, RT 002/RW 003 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirmau, Ambon masih terlihat ramai. Di pangkalan ini, Jeverson Latuharhary Ka

Berselang beberapa menit kemudian, seorang warga Muslim yang baru pulang silaturahmi dengan kerabatnya di Batu Merah Dalam, mencari tumpangan untuk kembali ke rumah. Jeverson lantas menawarkan jasa ojek. "Ojek, Pak?," tanya Jeverson.

Tak menunggu lama, Jeverson langsung mengeluarkan motor dari dalam pangkalan dan mengantar penumpang itu

¹ Karya ini telah terbit di Harian *Ambon Ekspres*, 4 Juli 2016

ke Kebun Cengkeh. Selain penumpang Muslim, dia mengantar penumpang Kristen yang bersilaturahmi ke kerabat dan teman di Batu Merah Dalam, saat Idul Fitri.

Jeverson adalah warga Kristen. Ia bermukim di OSM, Salobar, Kecamatan Nusaniwe. Seusai sholat Ied, Jeverson dan lima temannya sudah mangkal di pangkalan tersebut. Ini merupakan tahun kedua ia mangkal di situ saat lebaran Idul Fitri.

Kedatangan pengojek beragama Kristen, sudah diketahui dan dimaklumi pengojek beragama Muslim. Karena itu, usai sholat Ied, mereka mulai memarkir motor di luar areal pangkalan. Hubungan baik dan saling pengertian antara pengojek dua komunitas ini, sudah dibangun sejak 2013 lalu.

Warga setempat juga menjamu Jeverson dan teman-teman dengan makan dan minuman. "Setiap lebaran Idul Fitri, memang seperti ini. Makanya, kami sengaja tidak memarkir motor di dalam pangkalan. Di sini saja. Basudara pengojek Kristen juga sudah tahu itu. Selama dua hari mereka mencari di sini," kata Abdullah Rumalean (25), pengojek di pangkalan Batu Merah Dalam.

KESEPAKATAN PASSO-TULEHU

Tak hanya di Batu Merah, pemandangan yang sama juga terlihat di hampir semua pangkalan ojek di kawasan Muslim Kota Ambon. Bahkan, pengojek di Passo kecamatan Baguala, dan Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah sudah membangun kesepakatan bersama tahun 2008 silam.

Beberapa hari menjelang Natal, para pengojek dari Tulehu datang mangkal di pangkalan ojek depan Sekolah Kepolisian Negara (SPN) dan pangkalan Batu Gong, Passo. Mereka diberi waktu satu minggu atau sampai tahun baru, untuk mencari

mengantar basaudara Kristen yang merayakan Natal.

“Pada tahun 2008, kami pemuda Passo bekerja sama dengan pemuda Tulehu untuk rolling mengojek pada saat Natal dan Tahun Baru. Begitu juga saat Idul Fitri, kami mencari penumpang di Tulehu,” kata Yafet Koedoeboen, pengojek asal Passo yang mangkal di pangkalan Jalan Baru, Manusela, Kamis (7/7) atau hari kedua lebaran.

Untuk memastikan kenyamanan,antisipasi hal-hal buruk, Jafet yang juga ketua pemuda Passo, membuat pemberitahuan kepada sesama pengojek. Beberapa hari menjelang Natal dan Tahun baru, pangkalan sudah harus dikosongkan untuk pengojek dari Tulehu. Kebijakan ini pun dimaklumi teman-temannya.

Tahun 2009, aktivitas ini mulai merambah wilayah-wilayah Muslim di perkotaan Ambon. Hal ini bermula ketika Natal, beberapa pengojek dari Kebun Cengkeh dan Manusela mengojek di Passo.

Tetapi upaya ini ditafsir negatif oleh sebagian orang. Bahkan pernah ada yang mencoba membuat kekacauan. Namun segera dicegat agar tidak menjadi buah bibir negatif di masyarakat.

“Ada penilaian positif dan negatif. Kalau terjadi di Passo, kami langsung bertindak. Ada yang mabuk saja, langsung diamankan. Lalu, kami sampaikan yang mengojek adalah basudara Muslim. Jangan bikin tindakan yang menyinggung perasaan,” ungkap Yafet.

BERDAMPAK

Tindakan ini dilakukan atas dasar kesadaran bersama. Maluku, khususnya Ambon akan damai secara paripurna jika tidak ada lagi sekat-sekat curiga di masyarakat. Perspektif

inilah yang dipegang teguh sebagai modal keberanian mereka untuk mengantar penumpang hingga wilayah-wilayah rawan saat konflik di dua komunitas.

Yafet juga menegaskan, bukan uang yang menjadi satu-satunya tujuan. Namun, keinginan untuk menghilangkan prasangka negatif, demi terciptanya Ambon yang benar-benar aman dan damai adalah alasan kuat bagi mereka untuk mengojek di wilayah Muslim.

“Kami tidak merasa takut sedikit pun. Karena memang dalam hati, kami percaya bahwa basudara Muslim tidak akan berbuat buruk. Persoalan konflik Maluku sudah selesai. Begitu juga basudara Muslim dengan pikiran yang sama. Kalau memang terjadi, itu hanya oleh segelintir orang yang mau memprovokasi masyarakat,” kata Yafet yang pernah mengantar penumpang hingga ke Hitu, Mamala, Air Besar, dan beberapa wilayah Muslim lainnya itu.

Pengakuan yang sama juga disampaikan Iskandar Rumodar (25), pengojek asal Batu Merah Dalam dan beberapa temannya mangkal di pangkalan di samping Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Maluku, Batu Gajah. Kala itu, mereka mengantar penumpang hingga ke Hatalae, Kecamatan Leitimur Selatan.

Di pangkalan itu, mereka diperlakukan dengan baik dari pengojek dan warga setempat yang mayoritas Kristen. Bagi Iskandar, warga dan pengojek dari komunitas Kristen sangat terbuka. Hal ini yang membuat dia dan teman-teman tidak merasa khawatir. Apalagi terhadap isu-isu negatif yang sering mereka dapatkan.

“Basudara (saudara) Kristen sangat terbuka menerima dan menghargai kami. Mereka bilang, mengojek saja. Tidak perlu khawatir,” kata pria asal Pulau Gorom, Seram Bagian Timur itu.

KEADAAN BERBALIK

Aktivitas mengantarkan penumpang saat Natal dan Idul Fitri ini berbanding terbalik saat konflik komunal di Maluku 1999 hingga 2002 silam. Kala itu, sebagian pengojek (tukang ojek) ditengarai menjadi bagian pihak yang menyulut api konflik. Namun kini, mereka menjadi pembawa damai (*peace maker*).

Hal ini terjadi, karena pada hakikatnya semua manusia memiliki potensi damai yang diwariskan sejak lahir. Untuk itu, dalam kondisi traumana konflik sebesar apapun, nilai-nilai kemanusiaan dan kedamaian tetap dijunjung dan direalisasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari, tanpa sekat agama dan budaya.

“Sekarang justru sangat terbalik dan ini menunjukkan hakikat damai yang sesungguhnya. Terlepas dari budaya Maluku (Pela Gandong), tapi pada hakikatnya setiap manusia dilahirkan dengan potensi damai. Makanya, dalam kondisi konflik sebesar apapun, perdamaian tetap bisa dijaga,” kata salah satu pekerja perdamaian, Agus Loupaha.

Upaya mendamaikan Maluku secara totalitas, kata pendeta Gereja Protestan Maluku (GPM) Maluku itu, memang harus dimulai dari masyarakat yang paling bawah atau akar rumput. Sebab, upaya perdamaian yang direkayasa pemerintah, tidak sedikit yang dinilai gagal.

Masyarakat harus dibiarkan bersosialisasi dalam semua aspek kehidupan. Baik sosial, agama dan ekonomi. Perjalanan 17 tahun masyarakat Maluku lepas dari bara konflik, menjadi bukti bahwa perdamaian adalah suatu keniscayaan.

“Potensi damai ini jangan direkayasa dan dimanfaatkan siapapun untuk kepentingan tertentu. Tetapi ketika masyarakat dibiarkan untuk bersosialisasi dan mencari kehidupan di

mana saja, maka keadaan damai dan rukun itu tercipta dengan sendirinya. Lambat laun perasaan curiga hilang. Itu yang terjadi selama ini,” katanya menjelaskan.

Terlepas dari kebutuhan hidup, upaya yang telah dilakukan pengojek dari dua komunitas ini harus dijaga dan dilestarikan. Ia menjadi suatu konsep baru selain dari yang telah dilakukan sebelumnya, seperti *live-in* dan lainnya.

Upaya ini juga, menurut Loupahaa, mempan terhadap provokasi. Sebab, pengojek merupakan kelompok masyarakat bawah yang bersentuhan langsung dengan aktivitas sosial dan berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat. Jika ada isu yang bernilai provokasi, dengan cepat akan diredam.

“Dengan tindakan seperti ini, saya kira siapapun yang mencoba memprovokasi tidak akan mempan. Sebab, tanpa sadar, dari situ kita sudah membangun silaturahmi sosial yang luar biasa. Selain itu, masyarakat sudah sangat teruji dan punya pertahanan diri yang kuat dari isu-isu provokatif,” katanya menerangkan.

Yafet, Jeverson, Abdullah dan Iskandar dan pengojek lainnya, memiliki harapan yang sama. Karena mereka menilai, rasa persaudaraan yang telah terjalin di antara mereka, menjadi perekat yang sulit dilepaskan.

“Kami menganggap sebagai saudara dan keluarga. Kalau mereka ke sana, kami akan perlakukan dengan baik-baik. Karena saat Natal, basudara Muslim datang mengojek di OSM,” ucap Jeverson.

CITRO MENJAGA CAHAYA LILINTAK KELUAR SAAT NYEPI¹

RIKA IRAWATI

Toleransi seolah menjadi barang mahal. Namun, warga di Dukuh Jlono, Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, menepisnya. Pelaksanaan ibadah Nyepi menjadi bukti keragaman tak menghalangi rasa saling menghormati, bahkan semakin mempererat kekeluargaan.

Jarum jam menunjukkan angka 17.00 ketika matahari perlahan bergerak ke peraduan, Rabu (9/3). Cahaya yang meredup membuat suasana di Dukuh Jlono mulai temaram. Alih-alih menyalakan lampu yang ada di pinggir jalan dan teras, warga justru menutup rapat gordena dan pintu rumah agar sedapat mungkin, satu-satunya cahaya lampu di kamar tak memancar ke luar.

“Jangan sampai cahaya lampu rumah ke luar. Ini bentuk penghormatan kami kepada warga yang tengah menjalankan ibadah Nyepi,” ungkap Citro Suwarso, ketua RW 15 Dukuh Jlono yang beragama Islam.

Dukuh di ujung timur Desa Kemuning ini memiliki sekitar

¹ Karya ini telah terbit di Harian *Tribun Jateng*, 10 Maret 2016

35 rumah yang dihuni hingga 60 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, hampir separo beragama Hindu. Sisanya Islam dan Kristen.

Rabu (9/3), mulai pukul 06.00 hingga Kamis (10/3) pukul 06.00, umat Hindu di Jlon dan Desa Kemuning melaksanakan ibadah Nyepi. Ada yang di rumah namun tak sedikit yang memilih di Pura Tunggal Ika dan Jonggol Santiloka sebagai lokasi menyepi. Pura Tunggal Ika berada di utara desa sementara Pura Jonggol Santiloka ada di ujung timur Dukuh Jlon.

Saat umat Hindu melaksanakan catur brata, umat non-Hindu menjaga keamanan dukuh. Di sela kegiatan siang, sesekali kaum muda dan bapak-bapak warga dukuh setempat mengecek kondisi rumah warga yang ditinggal ke pura. Malam hari pun mereka keliling dukuh yang diselimuti kegelapan, sambil membawa senter, untuk ronda. Mereka bertugas layaknya pecalang (polisi adat di Bali).

“Sudah kebiasaan kami sejak dulu seperti ini. Kami harap, harmonisasi dan kerukunan ini juga tertular ke wilayah lain, bahkan di Indonesia,” ujar Hariyanto, warga Kristiani yang ikut berjaga.

Toleransi juga ditunjukkan keluarga Widyati Sutikno. Meski berjarak sekitar 200 meter dari Pura Tunggal Ika, lokasi Nyepi, dia tak menyalakan lampu di depan rumah dan sebagian di dalam rumah.

“Karena posisi rumah saya di bawah pura, kalau menyalakan lampu pasti kelihatan. Jadi, saya matikan agar kekhusukan umat Hindu yang tengah Nyepi terjaga,” ujarnya.

Di Pura Tunggal Ika, puluhan umat Hindu di Desa Kemuning, melaksanakan Nyepi secara berkelompok. Mereka mengadakan sembahyang secara bersama pukul 06.00, 12.00,

18.00 dan 06.00 keesokan hari. Di sela itu, mereka memperbanyak perenungan diri.

Saat gerhana matahari, warga sempat bersembahyang agar fenomena alam ini tak memberi pengaruh buruk. Seusai bersembahyang, ada pula yang menyaksikan gerhana matahari menggunakan kacamata ND5 sebelum melanjutkan tapa brata.

“Kami meminta Hyang Widi Wasa memberi ketentraman dalam kehidupan kami,” kata Suwito, warga Hindu yang melaksanakan Nyepi di Pura Tunggal Ika.

Bagi umat Hindu, Nyepi merupakan pergantian tahun menurut perhitungan kalender Hindu. Nyepi kali ini menjadi pertanda pergantian Tahun Baru Saka 1938. Saat Nyepi, mereka melaksanakan catur brata. Yakni, amati geni (tidak menyalakan lampu dan api), amati karya (tidak bekerja), amati lelungan (tidak bepergian), dan amati lelungan (tidak mencari hiburan). Dalam kesunyian ini lah diharapkan komunikasi dengan Hyang Widi sebagai Sang Pencipta, memberi pencerahan dalam diri umat.

Di Kemuning, jumlah pemeluk agama Hindu terbanyak kedua setelah Islam. “Toleransi umat beragama di Kemuning cukup tinggi. Kami akan terus menjaga keberagaman ini sebagai pemersatu warga,” kata Kepala Desa Kemuning Widadi Nurwidyo yang juga tokoh Hindu desa setempat.

SATU AGAMA, DUA AJARAN¹

EDMIRALDO N.N.SIREGAR

Terintegrasinya Kaharingan dengan agama Hindu menciptakan paradigma baru. Ajaran Kaharingan diwadahi di dunia pendidikan. Bisa menjadi role model bagi aliran kepercayaan lain.

Basir Rabiadi menaiki mimbar di Balai Baserah, Jalan Tambun Bungai, Palangkaraya, Kamis malam awal Juni lalu. Di hadapannya, sekitar 150 jamaah Hindu Kaharingan dengan busana rapi duduk bersila. Bau dupa begitu lekat di setiap pojok ruangan berukuran seluas lapangan basket itu. Ritual mingguan umat Hindu Kaharingan, yang disebut Baserah, telah dimulai.

Setelah memimpin doa, Basir Rabiadi meneruskan pembacaan kidung keagamaan. Mantra-mantra dalam bahasa Sangiang sebagai ungkapan rasa syukur pada Ranying Hatalla Langit diucapkan. Jamaah Baserah turut membaca mantra bersama-sama. Alunan kidung menggema hingga di luar ruangan.

Selesai kidung, Rabiadi turun mimbar. Posisinya digantikan seorang pengkhotbah bernama Sisilia. Sebelum memulai khotbah, Sisilia mengucapkan salam dalam agama

¹ Karya ini telah terbit di Majalah Gatra, 9 Juli 2016

Hindu “*Om swastiastu*” yang dibalas dengan ucapan yang sama oleh jamaah. Di akhir khotbah, Sisilia juga tidak lupa mengucapkan “*Om santi santi santi Om*”. Sebuah pertunjukan nyata dari integrasi Kaharingan dengan Hindu. “Tidak ada yang memperlmasalahkan ini. Umat menerima dengan baik,” kata Basir Rabiadi kepada *Gatra*.

Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MD-AHK) Kota Palangkaraya Parada L. KDR menegaskan, memang ada pihak-pihak yang kerap kali mempertanyakan wujud integrasi Hindu-Kaharingan. Namun, tidak pernah ada yang mampu menjamin umat Kaharingan diperlakukan adil jika berdiri sendiri.

Seperti yang dia alami sebelum masa integrasi. Surat lamaran masuk pegawai negeri sipil tidak pernah diproses. “Setelah kasih berkas ya, sudah. Nasibnya *enggak* jelas, ikut tes pun tidak,” kenangnya.

Namun, beragam kemudahan, bisa diterima Parada dan umat Kaharingan yang lain setelah berintegrasi dengan Hindu. Sebut saja, kemudahan untuk mendapat pengakuan negara dalam pernikahan umat Kaharingan. Surat pengantar telah menikah yang dikeluarkan MD-AHK telah diakui dan diterima kantor Catatan Sipil. “Sekarang, saya juga sudah jadi PNS. Siapa yang bisa beri jaminan seperti ini jika kami tidak integrasi,” tanyanya.

Mengenai hak menerima pendidikan agama Hindu Kaharingan bagi siswa sekolah, disebut Parada, juga telah terakomodasi. Pasalnya, guru-guru agama Hindu Kaharingan telah tersebar, setidaknya di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Ketersediaan itu, tidak lepas dari peran Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (STAHN-TP), Palangkaraya. “Alumminya telah tersebar untuk mengisi

mata ajaran Hindu Kaharingan,” katanya.

Wakil Kepala I STAHN-TP Pranata menyebut, STAHN-TP memang bersimbol Hindu. Namun, sekitar 50 persen dari konten ajarannya adalah ajaran Kaharingan. Misalnya, mata kuliah tentang Panaturan, bahasa Sangiang, teologi agama Kaharingan, dan upacara agama Kaharingan. “Kita juga belajar Weda dan ajaran Hindu lain,” katanya kepada *Gatra*.

Sejak berdiri tahun 1992, STAHN-TP telah meluluskan 1.004 alumni dari berbagai jurusan, termasuk jurusan Pendidikan Agama Hindu. Para alumni ini, rata-rata menjadi guru mata pelajaran Hindu di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari SD, SMP hingga SMA. “Nomenklaturnya Hindu, tapi disesuaikan dengan nuansa lokal, yakni Kaharingan,” katanya.

Misalnya, ketika mengajarkan kitab Kaharingan Panaturan, maka Weda selaku kitab Hindu juga diajarkan. Nantinya, jika seorang siswa lebih tertarik mempelajari Weda ketimbang Panaturan, Pranata pun tidak khawatir. Alasannya, inti dari kedua agama ini, menurutnya, hampir sama. “Kaharingan mau ke pura juga tidak masalah dan yang Hindu Bali mau ibadah ke Balai Baserah juga boleh,” katanya.

Menurutnya, yang berbeda hanya soal penyebutan nama Tuhan. Lalu, hal itu pun sebenarnya bukan hanya terjadi antara Hindu dan Kaharingan. Bahkan, penyebutan nama Tuhan dan ritual ibadah bagi sesama umat Kaharingan juga berbeda-beda. Tergantung, lokasi dan bahasa sehari-hari yang digunakan umat Kaharingan itu.

Misalnya penamaan Tuhan Ranying Hatalla Langit bagi umat Kaharingan di Katingan dan Palangkaraya berbeda dari di Barito yang menamakannya Yustu Ha Latalla. Juga di Pasir Panjang yang menuhankan Sanghyang Dewata. “Kalau

di Katingan, upacara kematian disebut Tiwah. Sementara di Barito disebut Wara," ucapnya.

Sayangnya, kompromi Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) dengan berintegrasi ke Hindu, tidak bisa diikuti seluruh umat Kaharingan. Di era reformasi, muncul berbagai organisasi agama Kaharingan seperti Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (MAKRI) dan Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI) yang menuntut pemisahan.

Ketua Umum MAKI, Bambang, menjelaskan keinginan memisahkan Kaharingan dari Hindu, semata-mata demi mempertahankan kemurnian Kaharingan. Dia khawatir, materi ajaran agama Hindu Kaharingan yang diajarkan di sekolah-sekolah justru mengikis kemurnian Kaharingan. "Di sekolah yang diajarkan sebagian Hindu, sebagian Kaharingan. Lama-kelamaan, punya kita bisa lenyap. Padahal, di Kalimantan ini, ya, Kaharingan," katanya.

DIRENGGUT TEROR SETELAH 'AMEN'¹

ABDUL MANAN (JAKARTA), **FIRMAN HIDAYAT** (SAMARINDA),
DEFFAN PURNAMA (KUNINGAN)

Gadis cilik meninggal terbakar api bom molotov di Gereja Oikumene, Samarinda. Pelaku residivis teror bom di Jakarta dan Banten.

Intan Olivia Banjarnahor menggelayut manja di pangkuan bapaknya, Ahad pagi dua pekan lalu. "Pak, saya mau main," kata bocah dua setengah tahun itu kepada sang bapak, Anggiat Manuppak Banjarnahor.

Intan tergoda oleh ajakan temannya, Trinity Hutahayan, yang berlari-lari di dekat barisan bangku belakang Gereja Oikumene, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Melihat Intan dipangku, Trinity, 3 tahun, menjulurkan tangan. "Ayo, Tan, main," katanya.

Tak menunggu Intan merajuk, Anggiat melepaskan anaknya dari pangkuan. Intan dan Trinity berlari kecil ke luar pintu gereja. Anggiat sama sekali tak menyangka itulah pangkuan terakhir untuk buah hatinya.

Sekitar dua menit setelah Intan lepas dari pangkuan ayahnya, seseorang melemparkan bom molotov ke halaman

1 Karya ini telah terbit di Majalah *Tempo*, 27 November 2016

gereja di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 37 itu. Selain merusak empat sepeda motor, api bom molotov membakar tubuh empat anak balita, termasuk Intan.

Luka bakar Intan, di lebih dari 70 persen tubuhnya, paling serius dibanding korban lain. Paru-paru bocah ini pun membengkak karena menghirup asap ledakan. Di rumah sakit, Intan hanya bertahan 17 jam. "Intan meninggal karena luka bakar yang parah," kata Rachim Dinata, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah A.W. Sjahranie.

Pelempar bom molotov yang menewaskan Intan bernama Juhanda, 33 tahun. Warga sekitar Gereja Oikumene mengenal dia sebagai takmir atau penjaga Masjid Al-Mujahidin. Jarak masjid itu dengan Gereja Oikumene hanya sekitar 200 meter. Sehari-sehari Juhanda berjualan ikan yang dia besarkan dalam keramba di Sungai Mahakam, tepat di belakang masjid.

Bom molotov di Gereja Oikumene bukan teror pertama dari Juhanda. Sulung dari tiga bersaudara ini terlibat teror bom buku di Jalan Utan Kayu, Jakarta Timur. Serta teror bom Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, pada 2011. Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 29 Februari 2012 menghukum Juanda 3 tahun 6 bulan penjara.

Sejak bebas bersyarat pada 28 Juli 2014, Juhanda menetap di Samarinda. Setelah melemparkan bom molotov, Juhanda berusaha kabur dengan mencebur ke Sungai Mahakam. Ia berenang menuju kapal pengangkut pasir yang berlayar di tengah sungai. Warga yang marah terus mengejar Juhanda. Terkepung di atas kapal, Juhanda akhirnya tertangkap. Massa sempat menghajar lelaki kelahiran Kuningan, Jawa Barat, itu sebelum menyerahkannya kepada polisi.

PAGI hari itu, kehidupan di rumah kayu di Jalan Jati 3 Nomor 70, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, menggeliat seperti hari-hari Ahad sebelumnya. Jarum jam menunjukkan pukul 06.00 ketika Intan terbangun dari tidur lelapnya.

Intan lalu membangunkan ayahnya, Anggiat, 33 tahun. Ibunya, Diana Susan Sinaga, 32 tahun, yang bangun terakhir, bergegas ke dapur untuk menyiapkan sarapan pagi sebelum keluarga ini berangkat ke gereja.

Jarak dari rumah Intan ke Gereja Oikumene tak lebih dari lima kilometer. Dengan sepeda motor, mereka hanya perlu waktu sekitar setengah jam untuk tiba di gereja. Setelah memandikan Intan, Diana menyerahkan anak itu kepada ayahnya. Diana kembali ke dapur. "Saya memasak telur dadar. Itu sarapan kesukaan Intan," kata Diana, mengengang pagi itu, Kamis pekan lalu. "Kalau pakai telur dadar, dia bisa nambah makannya."

Diana menyuapi putri semata wayang-nya itu sampai nasi terakhir. Setelah sarapan kelar, Intan kembali kepada Anggiat, yang sudah siap dengan setelan baju dan celana. "Bukan itu pasangannya, Pak," ujar Intan ketika melihat baju pilihan ayahnya. "Terus yang mana?" tanya Anggiat.

Intan tak menjawab, tapi telunjuknya mengarah ke celana jins berwarna merah. "Ini pasangannya. Cantik kan, Pak?" kata Intan.

Gadis cilik itu memilih setelan baru hadiah pamannya dari Medan. Semua persiapan baru kelar ketika jarum jam menunjukkan pukul 08.00. Berboncengan di atas sepeda motor, keluarga ini bergegas menuju gereja. Mereka tiba di gereja

setelah ibadat pagi berjalan setengah jam. "Kami terlambat," ujar Anggiat.

Setelah memarkir sepeda motor, Anggiat buru-buru masuk ke gereja. Sedangkan Diana mengantar dulu Intan ke sekolah ibadat Minggu di belakang gereja. Karena tak masuk bersamaan, di dalam gereja, pasangan ini duduk terpisah. Anggiat duduk di sisi kiri barisan kursi paling belakang. Sedangkan Diana duduk di sisi kanannya.

Mereka dipisahkan deretan bangku bagian tengah. Ketika Anggiat khusyuk berdoa, Intan masuk ke gereja diantar temannya. Anggiat tak sempat bertanya mengapa Intan menangis. Tak mau mengganggu ibadat, Anggiat segera menggendong Intan ke luar. Setelah tangisan Intan mereda, Anggiat kembali ke tempat duduknya semula. Intan belum turun dari pangkuan sang ayah.

Tak berselang lama, Trinity melintas di dekat tempat duduk Anggiat. Intan berbisik meminta izin bermain. Kedua anak perempuan itu tinggal berdekatan. Rumah mereka hanya terpisah dua rumah tetangga. Intan biasa memanggil Trinity "Kakak" karena umurnya lebih muda sekitar enam bulan.

Anggiat masih mengingat dengan jelas bagaimana Intan dan Trinity berlari kecil, sambil bergandengan tangan, menuju pintu keluar gereja. Di mimbar, kala itu pendeta baru saja mengucapkan kata "Amen". Jemaat menimpali dengan kata yang sama.

Tepat pukul 09.50, ibadat pagi selesai. Jemaat bersalaman untuk berpamitan. "Saya sedang berjalan menuju pintu keluar," ujar Mawarni Hutahayan, anggota jemaat. Saat itulah terdengar ledakan dari luar. Jemaat panik ketika melihat kepulan asap hitam masuk melalui sela-sela pintu gereja.

Anggiat seketika teringat pada anaknya. Tak menghiraukan

asap hitam itu, setengah berlari dia menuju halaman gereja. Tapi, di luar, pandangan Anggiat tersaput asap. Ketika asap mulai menipis, Anggiat melihat tubuh Intan seperti bersujud di lantai. Lidah api masih menjilati baju merah anak itu. "Saya tak tahu posisi korban lain di mana. Saya hanya tahu anak saya," ujar Anggiat.

Pagi itu, empat anak bermain di halaman gereja. Di samping Intan dan Trinity, ada Alvaro Sinaga, 5 tahun, dan Isabel Sihotang, 2 tahun. Anggiat berusaha memadamkan api di tubuh Intan. Ia melepaskan baju anaknya yang masih terbakar. "Saya tak peduli tangan saya ikut terbakar," kata Anggiat.

Ketika baju yang terbakar dibuka, kulit Intan ikut terkelupas. Anggiat langsung memeluk buah hatinya. Setelah itu, ia menyerahkan anaknya ke Diana. Perempuan yang tengah mengandung empat bulan itu memeluk Intan dengan erat. "Saya hanya sanggup memeluk dia," ujar Diana.

Sampai akhirnya ada orang yang mengambil Intan dari pelukan Diana dan membawanya ke puskesmas terdekat. Keempat anak yang terluka bakar dibawa ke Puskesmas Loa Janan, sebelum dirujuk ke Rumah Sakit I.A. Moeis. Intan masih menangis ketika dibawa ke puskesmas dan Rumah Sakit I.A. Moeis. Intan dan Trinity akhirnya dibawa ke RSUD A.W. Sjahranie karena luka bakarnya lebih serius. Dua anak lain, karena luka bakar di tubuhnya di bawah 20 persen, tetap dirawat di Rumah Sakit I.A. Moeis.

Sejak dibawa ke RSUD A.W. Sjahranie, Intan tak pernah sadar lagi. Keesokan harinya, pukul 05.00, Intan meninggalkan kedua orang tua, kerabat, dan semua teman dekatnya untuk selamanya.

DITEMUI di rumahnya, Kamis pekan lalu, Diana mengenang kembali dua insiden sandal Intan yang tertinggal. Sehari sebelum hari nahas itu, Sabtu siang, Diana

membawa Intan naik sepeda motor ke Pasar Harapan Baru. Setelah Diana selesai berbelanja, ketika hendak pulang, perhatian Intan tersedot oleh tumpukan pentol, penganan berbentuk bulat dari tepung, yang dijual di pinggir jalan. Intan minta dibelikan jajan itu, tapi Diana tak menurutinya. "Dia merajuk," kata Diana.

Dalam perjalanan pulang, satu blok sebelum sampai di rumah, Intan tiba-tiba berteriak, "Bu, sandal Intan dibuang." Diana mendadak menarik rem sepeda motor karena kaget. Ia menanyakan di mana Intan membuang sandalnya. Intan tak menjawab dengan jelas.

Diana memutar balik sepeda motor ke arah pasar. Sepanjang jalan, Diana melihat-lihat sekeliling. Sandal Intan akhirnya ditemukan di pasar. Ketika hendak pulang, Intan kembali minta dibelikan pentol. Kali ini, Diana memenuhi permintaan anaknya. "Pentol memang kesukaan dia," ujar Diana.

Di rumah, sore harinya, Diana bersiap ke luar rumah lagi. Malam itu, Diana harus menghadiri arisan keluarga di Kelurahan Sungai Keledang, Samarinda Seberang. Acara dimulai pada pukul 19.00. Biasanya, acara baru berakhir pada pukul 22.00.

Di tengah obrolan arisan keluarga, Intan rupanya mengantuk. "Bu, minta bantal sama kipas," kata Intan. Diana tak memenuhi permintaan itu. Tanpa bantal dan kipas angin, Intan berbaring di paha ibunya. "Dia seperti kepanasan.

Bajunya sampai disibakkan ke atas,” ujar Diana.

Setelah hampir satu jam dininabobokan, Intan baru terlelap. Gadis itu tak terjaga ketika dibopong pulang. Esok paginya, Diana baru menyadari sandal kesayangan Intan tertinggal lagi di tempat arisan. Ketika pergi ke gereja, Intan terpaksa memakai sepatu.

Diana memasukkan sandal kesayangan anaknya itu ke dalam peti jenazah. Bukan hanya sepasang sandal yang menemani Intan di kuburan. Kerabat yang bekerja sebagai bidan, Asmiana Nainggolan, memasukkan barang kesayangan Intan lainnya ke dalam peti mati. Salah satunya stetoskop.

Asmiana bercerita, Intan senang bermain peran sebagai dokter cilik. Suatu hari, Intan mengenakan stetoskop dan memeriksa Asmiana, yang pura-pura sakit. Adegan itu terekam di dalam telepon seluler Asmiana. “Ini, Mas, Intan sedang memeriksa saya,” kata Asmiana menunjukkan rekaman video itu kepada Tempo.

Intan dimakamkan di permakaman Kristen Putaq, Desa Loa Duri Ilir, Kutai Kartanegara, pada Selasa pekan lalu. Upacara pemakaman berlangsung di tengah guyuran hujan. Diana hanya sanggup bersandar di dada Anggiat. Sang suami sekuat tenaga memapah sang istri yang berduka kehilangan anak tercintanya.

KAMI DIBAYAR MURAH¹

TRULY OKTO PURBA

Wajah Bobby (bukan nama sebenarnya) tampak sumringah ketika teman sekerjanya memperlihatkan sebuah iklan lowongan pekerjaan yang dipasang InqilabiInk sebagai sales yang tayang di situs OLX.co.id. tanggal 26 Maret 2016 lalu. Penghasilan sebesar Rp 1,2 juta-4 juta yang ditawarkan distributor tinta spidol tersebut membuatnya memiliki pemikiran untuk pindah dari pabrik tempatnya bekerja saat ini.

Namun, wajah sumringahnya seketika berubah kecewa ketika membaca persyaratan yang diminta perusahaan yang beralamat di Jalan Besar Tembung, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara tersebut. Dari sembilan persyaratan, InqilabiInk meminta persyaratan “Tidak Terlibat LGBT” di urutan paling atas.

Bobby yang mengaku sebagai transman ini merasa yakin kalau dirinya pasti ditolak saat mengajukan lamaran. Penampilannya saat ini sudah cukup bagi perusahaan tersebut untuk menilai kalau dirinya memang seorang LGBT (transman).

Sekilas, Bobby yang memang berjenis kelamin perempuan itu terlihat seperti lakilaki. Rambut pendek, mengenakan anting

1 Karya ini telah terbit di Harian *Tribun Medan*, 17 April 2016

khas lakilaki di telinga kiri, intonasi suara yang agak berat dan perawakan (fisik) yang tergolong tegap untuk ukuran lakilaki. Bobby mengaku kecewa ketika harus mengalami diskriminasi yang berulang-ulang dalam hal pekerjaan dikarenakan orientasi seksualnya. Bekerja di sebuah pabrik mebel di kawasan Sunggal, Deli Serdang, Bobby mengaku kalau penampilannya yang terlihat tomboy ini membuatnya dibayar murah di pabrik tersebut.

Pimpinan Bobby di pabrik memang mencari buruh yang penampilannya tomboy. Karena terlihat seperti lakilaki, maka Bobby bisa ditempatkan di bagian yang biasanya diisi lakilaki, seperti di bagian mesin dan pemotongan. Bagian operator mesin dan memotong adalah bagian yang pekerjaannya biasanya diisi lakilaki, mengingat beban kerja dan risiko kerja yang cukup besar. Tapi upah tetap dibayar sebesar upah perempuan.

Selain Bobby, ada tiga temannya di pabrik yang memiliki orientasi seksual sebagai transmen. Dua orang di bagian di pemotongan dan seorang lagi di operator mesin. Untuk upah per hari, kecuali hari Minggu, kalau lakilaki dibayar Rp 47 ribu dan perempuan dibayar Rp 40 ribu. Meskipun bekerja di bagian yang ditempati pekerja lakilaki, tapi karena Bobby dan ketiga temannya yang transman, tetap dibayar Rp 40 ribu.

“Kami merasa perusahaan hanya memanfaatkan orientasi seksual kami ini saja. Akhirnya kami dibayar murah. Padahal risiko kerja tidak kecil. Di bagian pemotongan misalnya, salah potong saja, jari tangan bisa terpotong. Bukan itu saja. Di sini buruh juga tidak ditanggung BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Jadi kalau kami sakit, kita tahan sendiri. Kalau berobat, biaya berobat kami tanggung sendiri. Ada 500 pekerja di sini. Mayoritas tak ada fasilitas BPJS. Palingan karyawan yang sudah bekerja di atas 15 tahun yang dapat,”

kata Bobby kepada Tribun, akhir Maret lalu.

Transman kelahiran 1991 ini mengatakan, mereka pernah protes ke perusahaan terkait upah yang mereka terima dan fasilitas BPJS yang tidak ada. Tapi tak ada tanggapan dari perusahaan. Protes mereka sama sekali tak digubris. “Malah dibilang, kalau mau kerja, ya kerja. Kalau enggak mau ya udah keluar. Karena yang mau lamar besok banyak. Begitu kata pimpinannya. Ya sudahlah, kitapun malas protes lagi,” kata Bobby.

Di tempat kerjanya saat ini dan di tempat kerja sebelumnya, Bobby mengaku tidak mendapat ejekan dari temanteman sekerjanya karena orientasi seksualnya. Bobby sudah beberapa kali berpindah kerja sebelum bekerja di tempatnya sekarang, antara lain sebagai waitress, sales di mal dan operator mesin di sebuah pabrik AgarAgar di Kelambir Lima, Deli Serdang. Namun, di pabrik mebellah Bobby cukup betah, sampai tiga tahun.

“Terpaksa. Daripada tidak bekerja, terpaksa saya jalani meskipun upah kami yang transmen ini dibayar murah dan tak sesuai dengan beban kerja,” katanya.

Bobby dan temantemannya yang transmen pernah berpikir untuk pindah kerja dan melamar di pabrik yang berdekatan dengan pabrik mereka saat ini. Tapi lamaran mereka ditolak karena pabrik tersebut tidak menerima transman, dan hanya menerima pekerja dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Penolakan tersebut didasarkan pada penampilan mereka yang tomboy.

“Alasan pimpinannya, mereka takut kami berantem (berkelahi). Padahal kita kan niatnya mau bekerja. Masa hanya karena melihat kami tomboy sudah disebut transmen. Padahal belum tentu tomboy itu transmen. Ada perempuan tomboy

yang memang tidak transmen. Tapi memang penampilannya yang tomboy. Kalau anggapannya sudah seperti ini, maka pelamar perempuan yang tomboy tapi bukan transmen tetap akan ditolak juga karena penampilannya itu. Padahal belum tentu kinerjanya jelek," ujarnya.

Kisah para kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di dunia kerja tak selamanya prihatin seperti yang dialami Bobby. Ada juga yang bekerja dengan cukup nyaman.

Pengalaman ini diungkapkan Adinda Didi Rusdianto. Transwoman kelahiran 1984 ini bercerita, setelah lulus kuliah program Diploma Komputerisasi Akuntansi dari sebuah PTS di kawasan Jamin Ginting Medan tahun 2005, dirinya diterima bekerja sebagai layouter dan desain grafis di sebuah perusahaan penerbitan di Medan.

Selama kurun waktu empat tahun hingga 2009, Didi berpindahpindah bekerja di lima perusahaan penerbitan. Perusahaan penerbitan kelima yang dimasuki Didi adalah perusahaan penerbitan nasional dan memiliki kantor perwakilan di Medan. Hingga saat ini, Didi masih bekerja di perusahaan tersebut.

Selanjutnya tahun 2007, Didi diterima bekerja sebagai desain grafis di sebuah perusahaan ritel di eMedan. Jadilah Didi mengambil dua pekerjaan sekaligus dengan posisi desain grafis dan layouter. Pagi sampai sore di perusahaan ritel dan sore hingga malam di perusahaan penerbitan.

Saat pertama sekali bekerja, penampilan Didi masih terlihat maskulin. Namun temanteman kerjanya sudah mengetahui orientasi seksualnya sedari awal bekerja. Didipun merasa tak harus mengakui (*coming out*) kalau dirinya seorang transwoman.

Didi memutuskan untuk merubah secara perlahan penampilannya layaknya seorang perempuan sejak tahun 2012. Mulai dari memanjangkan rambut seperti rambut Rihanna dan mengenakan pakaian semifeminim ke kantor (kombinasi kemeja lengan panjang dan celana panjang). Didi juga memakai pemerah bibir, eye shadow, eye liner dan perawatan wanita lainnya.

Meskipun secara perlahan sudah merubah penampilan seperti perempuan dan perusahaan tahu kalau dirinya transwoman, Didi tidak mendapatkan diskriminasi dari perusahaan. Misalnya, diminta mundur atau kembali keadaan awal yakni sebagai lakilaki. Yang ada sebagian temanteman kerjanya menyindir dirinya dengan pernyataan-pernyataan verbal seperti: "Lakilaki kok kecewekcewekan", "Kamu kok makin hancur".

Ada juga teman kerja lakilaki berbicara ke temannya yang lakilaki bertujuan menyindir dengan kalimat, "Kau tobat kenapa, sih." atau "Kusodok burit (anus) kau nanti." "Pernyataan-pernyataan verbal seperti itulah yang kudengar di kantor. Aku hanya bilang ke mereka, ini hakku. Inilah aku dan aku sudah berdamai dengan hatiku. Terserah kalian menganggap saya seperti apa. Yang penting, aku di sini bekerja untuk hidup, mencari nafkah dan untuk keluarga. Aku punya hak yang sama dengan kalian. Aku bilang seperti itu," kata Didi, awal Maret lalu.

Kasus pemberitaan LGBT yang heboh-hebohnya Februari lalu, juga sempat membuat Didi menjadi bahan *bully* di kantor perusahaan ritel. Sebuah wallpaper bertuliskan "Menolak Keras LGBT, Lesbi, Gay, Bencong, Transgender", Merusak Generasi Muda Bangsa" dengan dominasi warna merah terpampang di monitor PC kantor.

“Aku tahu siapa yang membuat wallpaper tersebut. Bagiku wallpaper itu sudah termasuk ujaran kebencian dan bertujuan memecah belah. Tapi itu tadi, aku anggap biasabiasa saja. Aku merasa nyaman dengan orientasi seksual seperti ini dan bersyukur bisa bekerja di dua perusahaan yang bisa menerima keberadaan ini,” katanya.

Kenyamanan yang sama juga dirasakan Ame. Transman kelahiran tahun 1988 ini sekarang bekerja sebagai financial manager di sebuah perusahaan sekuritas di Medan. Ame menceritakan, kenyamanan tersebut ditunjukkan dari penerimaan temantemannya di kantor hingga ke pimpinannya.

Sejak awal bekerja, pimpinan Ame tidak pernah memperlakukan orientasi seksualnya. “Dari awal memperkenalkan diri, aku maskulin. Aku kerja dengan jas dan dasi atau dengan ekspresi yang aku mau. Aku juga memperkenalkan pasangan perempuan saya dan kuajak bekerja di situ,” kata Ame akhir Maret lalu.

Ame menegaskan, pimpinannya tidak pernah mempersoalkan orientasi seksualnya. Sebaliknya yang dipersoalkan adalah profesionalitasnya dalam bekerja. Ame menceritakan, dirinya pernah mengundurkan diri pada September 2014, atau setelah tiga tahun bekerja.

Kata Ame, perusahaan sangat kehilangan karena selama bekerja dirinya tidak mempunyai rekam jejak pekerjaan yang jelek. “Pengunduran diriku sempat di-*hold* (tahan) oleh perusahaan. Aku diminta untuk tidak mundur. Tapi karena ada hal yang harus aku kerjakan, aku harus mundur sebentar. Tapi bulan Maret lalu aku bergabung kembali di perusahaan yang sama,” katanya.

Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Panca Budi mengaku, dirinya mengundurkan diri justru bukan pada masa

down grade (jelek kinerja atau tidak mencapai target berapa lama). Kalaupun tak tercapai target perusahaan sebesar 100 persen, target minimal 50 persen selalu dia capai.

Ame pun beberapa kali mendapat *reward* atas prestasinya ini. "Sampai aku keluar pun, hubunganku dengan manajer tetap hangat dan dekat. Komunikasi tetap berlangsung. Kami sering BBM an dan bercerita soal kegiatan kami masingmasing," katanya.

Senada dengan Didi, Ame tak harus mengaku kalau dirinya transman. Penampilannya saat ini sudah cukup untuk memberitahu siapapun, kalau dirinya adalah seorang transman. "Aku memang orang yang beruntung yang bisa bekerja di wilayah formal dengan ekspresi yang kuinginkan tanpa tekanan dari perusahaan. Aku tak pernah mendapat bully atau ejekan di kantor. Semuanya nyaman bergaul dan tidak lagi mempermasalahkan orientasi seksual yang kupunya," ujarnya.

Keberuntungan yang sama juga dialami Laina (bukan nama sebenarnya), seorang transwoman yang bekerja sebagai instruktur di sebuah kursus bahasa Inggris terkemuka di Medan. Alumni Sastra Inggris sebuah PTN di Medan ini mengaku ada hal yang membuatnya nyaman terkait orientasi seksualnya yakni pernyataan dari World Health Organization (WHO) yang menyebut bahwa LGBT bukanlah penyakit. "Artinya kami sama dengan manusia lain yang normal. Saya lebih percaya ilmu pengetahuan yang secara ilmiah terbukti kebenarannya," katanya.

Bekerja selama lima tahun, kelahiran 1987 ini mengatakan, dirinya tak harus mengakui (*coming out*) terkait orientasi seksualnya. Menurutnya temanteman seprofesinya termasuk pimpinannya sebenarnya tahu tentang orientasi seksualnya

meskipun dirinya tidak harus mengakuinya.

Hampir semua rekan kerjanya tahu kalau malam minggu dirinya sesekali ke tempat hiburan dengan dandanan perempuan. Seringkali, temanteman sekantornya juga menyebut Laina cantik. Namun, Laina menganggapnya hanya sebagai candaan. "Hidup ini terlalu indah untuk dilewatkan. Saya nikmati apa yang bisa saya nikmati, buat apa menghabiskan waktu untuk membahas hal-hal yang tidak perlu seperti menyalahkan LGBTIQ. Banyak hal yang lebih penting yang harus dibenahi di negara ini, terutama untuk mendapat kualitas hidup yang lebih baik," katanya menjelaskan.

Secara pribadi, Laina mengaku tidak melihat diskriminasi di tempatnya bekerja. Kalau kantor tempatnya bekerja melakukan diskriminasi, barangkali dirinya sudah dikeluarkan. Pimpinannya, kata Laina menganggap orientasi seksual itu sebagai urusan pribadi yang tak elok dicampurkan dengan urusan pekerjaan. "Saya bangga ada di perusahaan ini. Belum tentu perusahaan lain bisa menerima orang-orang seperti saya," kata Laina.

Pimpinannya justru memprioritaskan Laina dibanding dengan pengajar lainnya yang sudah 20 tahun atau 10 tahun bekerja. Hal itu karena Laina dianggap lebih berkualitas di bidangnya dan berperilaku baik seperti semangat kerja, kejujuran dan tanggung jawab moral.

"Setiap orang harus menjadi yang terbaik untuk dirinya dan orang lain dalam hal kepribadian dan dalam segala hal yang mungkin. Tidak ada gunanya terus menyimpan kebencian dan emosi negatif, tetapi bebaskanlah semua hal negatif untuk kesehatan otak atau urat syaraf kita," kata Laina.

Sepanjang Berkontribusi Positif, Tak Masalah

PERTAMA kali melihat Didi, Dina (bukan nama sebenarnya), merasa biasa saja dan tidak ada yang aneh. Perempuan 27 tahun yang menjadi atasan Didi ini mengatakan, Didi bukanlah LGBT pertama yang menjadi partner kerjanya lima tahun terakhir. Saat ditempatkan di Pematangsiantar (Sumatera Utara) dan Lhokseumawe (Aceh) dirinya sudah berpartner bersama karyawan dengan orientasi seksual gay. “Jadi bagi saya sudah biasa ya. Sama dengan karyawankaryawan lain,” kata Dina kepada Tribun, awal April lalu.

Dina menjelaskan, orientasi seksual karyawannya yang LGBT merupakan domain pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pekerjaan. Baginya, orientasi seksual karyawannya apapun itu, baik lesbi, gay, biseksual dan trans bukanlah sesuatu yang penting untuk diurus.

“Yang perlu saya urusi adalah pekerjaan mereka. Bagi saya, mereka bekerja dengan baik dan profesional sudah cukup. Esensi bekerja itu adalah profesionalitas. Ketika mereka bekerja dengan baik, saya apresiasi. Dan ketika sudah

menyalahi prosedur yang ada, baru saya panggil,” kata Dina.

Dikatakan Dina, sebagai pimpinan di divisi marketing, maka dirinya membutuhkan orang-orang yang kreatif karena identik dengan orang-orang yang kreatif. Menurut Dina, orang kreatif itu tidak dibatasi gender ataupun orientasi seksual. “Mau dia laki-laki, perempuan dan LGBT sekalipun saya tidak memperdulikannya. Apa yang menjadi buah pikiran merekalah yang menjadi nilai bagi dia. Untuk Didi, mau dia laki-laki, perempuan atau apapun, maka bagi saya, output dari pekerjaannya yang penting. Memuaskan kinerja, disiplin dia, atau bagus tidak etikanya. Itu yang saya nilai,” kata Dina.

Sepanjang berpartner dengan Didi, sebut Dina, Didi masih bisa mengikuti apa yang diminta dan disarankan perusahaan. Nilai kreatif Didi, kadangkadang *out of the box*, karena hasil kerjanya terkadang melebihi target yang diminta. Dari rentang 1 sampai 10, Dina menyebut memberikan nilai akhir 7 kepada Didi untuk gabungan beberapa aspek penilaian seperti kinerja, attitude, disiplin atau kerajinan.

Jika Dina meminta pekerjaan khusus untuk mendesain bahan promo, nilai Didi berada di angka 8. “Jadi menurut saya, kembali kinerja

masingmasing karyawan, termasuk Didi dan kelompok LGBT lainnya. Sepanjang masih bisa memberikan kontribusi positif, dan anaknya kreatif, maka tidak masalah bagi kami untuk menerimanya bekerja di sini. Begitupun kalau dia salah, tetap kita tegur,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Risa (bukan nama sebenarnya), relation manager di perusahaan tempat Ame bekerja. Risa mengaku, melihat apa yang bisa dihasilkan Ame untuk perusahaan. Kalau memang hasilnya positif, tak ada alasan bagi perusahaan untuk menolak.

Pengalaman Risa, biasanya orang-orang LGBT adalah orang yang memiliki sifat yang supel, pintar membawa diri, sangat cepat masuk ke pergaulan dan apa adanya. “Sifat ini sangat menguntungkan mereka dalam bekerja, mengingatkan karakter kerja kami ada berhubungan dengan pencarian dan pengelolaan nasabah. Sifat mereka ini juga sangat membantu mengelola emosional mereka dalam menghadapi tuntutan kerja kami yang *stressfull* dan *underpressure*. Sekilas, pekerjaan kami memang terlihat santai, tapi sebenarnya cukup membuat stres,” katanya.

Risa mengakui, selain Ame yang sudah bergabung di timnya sebulan terakhir, dalam timnya juga bergabung seorang gay sejak dua tahun terakhir. Secara umum, kata Risa, Ame

dan karyawan yang gay tersebut bekerja sangat profesional.

Keduanya mengetahui jam kerja, memahami tugas dan tanggung jawab dan cekatan dalam menjual produk-produk investasi yang ditawarkan perusahaan. Keduanya juga selalu mendapatkan nasabah dalam jangka waktu yang tidak lama. Mereka juga profesional dalam menjaga nasabah agar tetap percaya dengan perusahaan.

Soal prestasi, baik Ame maupun rekan kerjanya yang gay punya pencapaian yang baik. Selama bekerja di perusahaan tersebut, keduanya beberapa kali mendapat *reward* sebagai “ganjaran” atas target yang mereka capai. Biasanya *reward* ini diberikan kepada karyawan jika pencapaiannya melebihi 50 persen target yang dibebankan. “Melihat prestasi dan kinerja mereka, tentu tak ada alasan bagi kami untuk mengeluarkan mereka,” katanya.

Staf InquilabiInk, Erwin saat ditemui *Tribun*, awal April lalu mengatakan, persyaratan tidak terlibat LGBT awalnya tidak dicantumkan dalam persyaratan lamaran. Tapi beberapa hari setelah diiklankan, ada dua perempuan berpenampilan tomboy datang mengajukan lamaran. “Keduanya perempuan, tapi kayak lakilaki. Dan saya tahu mereka ini pacaran,” kata Erwin.

Menurut Erwin, aturan dalam agama yang

melarang keberadaan LGBT menjadi alasan bagi mereka untuk menolak siapapun yang terlibat dalam LGBT untuk bergabung dalam perusahaan mereka. "Itu alasan utama kami. Akhirnya, setelah kedatangan dua pelamar perempuan itu, kami ganti kembali iklannya dengan mencantumkan syarat 'Tidak Terlibat LGBT'," kata Erwin.

Erwin menjelaskan, untuk pelamar yang transmen atau transwomen memang relatif lebih mudah mengenalinya, berdasarkan penampilan mereka. Beda halnya dengan pelamar yang orienteasi seksualnya lesbian, gay, atau biseksual. Tanpa ada pengakuan, sulit untuk mengenali kalau mereka adalah lesbian, gay, atau biseksual.

Kalau kemudian ada lesbian dan gay yang masuk, Erwin mengaku tak bisa berbuat apaapa. "Kami tidak ada membuat seleksi khusus untuk mengenali apakah palamar itu terlibat lesbian atau gay. Kalaupun pada akhirnya lolos dan ketahuan, saya belum memikirkan tindakan apa untuk mereka," katanya.

IRNA MINAULI, PSIKOLOG MINAULI CONSULTING

Syarat “Berpenampilan Menarik” Saja Sudah Diskriminasi

DALAM lowongan kerja sebaiknya memang tidak ada tindakan atau pernyataan-pernyataan diskriminatif. Persyaratan “berpenampilan menarik” atau “*good looking*” yang banyak dicantumkan perusahaan saat mencari kerja sudah salah dan memberikan diskriminasi bagi mereka yang tidak menarik.

Pada dasarnya, semua orang berhak mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Penerimaan kelompok LGBT di dunia kerja harus dilihat dari dua hal yang berbeda yakni masalah orientasi seksual dan masalah kompetensi kerja (*performance*).

Sepanjang pengalaman saya, memang cukup banyak perusahaan yang tidak mau mencampuradukkan kedua hal ini. Artinya, masalah orientasi seksual tidak berkaitan dengan *performance* kerja. Bisa saja, kelompok LGBT mempunyai kemampuan kerja yang baik.

Kalau mereka (perusahaan) mau bijak, terimalah si pelamar yang LGBT dan jalankan seluruh rangkaian seleksi. Kalaupun mensyaratkan

penampilan harus menarik, good looking dan syarat-syarat lainnya, maka bisa dilakukan (dinilai) saat wawancara. Artinya tidak harus dilakukan di persyaratan awal saat memasukkan lamaran.

Sebaiknya, jangan jadikan penampilan sebagai alasan untuk menolak. Penting diketahui, kesadaran masyarakat akan HAM akan semakin tinggi. Jadi diharapkan lebih bijak membuat iklan. Artinya kalau persyaratan menyangkut agama dan diskriminasi, sebaiknya jangan diekspos di media massa.

KISAH KELOMPOK LGBT DI DUNIA KERJA
DI SUMATERA UTARA (HABIS)

PENDIDIKAN CUKUP, BISA BEKERJA DI SEKTOR FORMAL

Meskipun masih menjadi pro dan kontra, keberadaan pekerja LGBT di dunia kerja tak bisa diacuhkan begitu saja. Diharapkan ada solusi bijak untuk dapat menerima mereka bekerja sesuai dengan kemampuannya.

DARI beberapaorientasi seksual yang berkembang saat ini, lesbi dan gay dianggap cukup aman untuk dapat bekerja di perusahaan formal baik swasta ataupun pemerintah dibandingkan transmendan transwoman. Namun, rasa aman kelompok lesbi dan gay tersebut dengan satu syarat, mereka tidak *coming out* (mengakui).

Ketua Cangkang Queer Sumut, Dika Butarbutar menjelaskan, terkait pekerjaan, kelompok LGBT biasanya dibagi menjadi dua frame. Pertama, teman yang lesbi dan gay, artinya penampilannya biasa aja, maskulin dan feminin. Terkadang kalau ditempat kerja mereka (lesbi dan gay) tidak coming out, maka relatif amanaman saja. Yang jadi masalah ada kelompok trans Kadang kalau di tempat kerja, mereka tidak coming out, maka amanaman aja. Tapi yang jadi masalah adalah yang kedua, yakni kelompok trans.

Masalah kemudian timbul karena secara ekspresi sudah

terlihat. Dari penampilan mereka pun sudah ketahuan kalau mereka itu trans. Akhirnya banyak yang bekerja di informal. Kalau transwomen bekerja di salon, atau jadi pekerja seks, sedangkan transmen berjualan bakso di tamantaman kota atau tukang parkir. Kalau yang bekerja di sektor formal hanya beberapa. Itupun karena tingkat pendidikan mereka yang cukup baik.

Usia anakanak tanpa pendidikan yang layak dan penerimaan lingkungan yang tidak mendukung menjadi penyulut kelompok trans akhirnya hanya mampu bekerja di sektor informal yang dianggap kelas bawah dan menjurus hina seperti pekerja salon, tukang parkir dan pekerja seks.

Di umur 6 tahun misalnya, mereka sudah berdandan. Lakilaki memakai lipstik dan daster ibunya. Ketika orangtuanya mengetahui ada yang berbeda dari anaknya, mereka tidak terima dan memaksa si anak harus kembali ke kelamin awal. Tak hanya di rumah, di sekolah si anak menjadi tidak nyaman karena terus diejek dan dibully. Karena tak tahan, si anak kabur dari rumah atau diusir orangtua. Sekolah pun tidak tamat.

Usia mereka saat keluar dari rumah pun masih dini, ada yang 12 tahun, 13 tahun hingga 17 tahun, atau masih dalam masa sekolah. Anak yang dari kampung, nekat pergi ke kota. Permasalahannya, di kota, mereka tak tahu mau berbuat apa. "Akhirnya karena mungkin sudah terdesak dan untuk mempertahankan hidup, mereka hidup di jalanan, jadi pekerja seks. Kalau ada keahlian, mereka ya di salon. Kalaupun mereka mau bekerja di instansi formal, kan tidak gampang. Pendidikan dan keahlian harus ada. Hal itulah yang membuat temanteman trans khususnya transwoman banyak yang berada di jalanan. Berbeda memang dengan lesbi dan gay. Sepanjang mereka tidak membuat pengakuan (coming out), keberadaan

mereka di tempat kerja memang relatif cukup aman,” kata Dika.

Terkait masih adanya tindakan diskriminasi yang dialami kelompok LGBT, khususnya trans, Dika meminta semua pihak melihatnya tetap dalam kerangka HAM. Artinya ketika temanteman trans jadi pekerja seks dan akhirnya pun nyaman sebagai pekerja seks, maka negara harus melindungi dan member rasa aman. Tapi faktanya di lapangan, Satpol PP sebagai perwakilan negara justru jadi pelaku dan bukan melindungi.

Dika mengharapkan negara memfasilitasi temanteman trans yang tidak sekolah atau sudah putus sekolah, misalnya dengan mengikuti kejar paket A, paket B atau paket C. Fasilitas akademik merupakan tanggung jawab negara dan ketika pendidikan sudah diperoleh dengan baik, maka hal ini menjadi modal penghidupan yang layak bagi warga negara.

Selanjutnya untuk institusi pendidikan harus menjamin temanteman trans bisa belajar dengan nyaman. Sekolah harus menjamin kelompok trans bebas berekspresi di sekolah dan tidak dipaksakan menjadi kehendak masyarakat. Siswasiswa yang selama ini dianggap normal dapat diberikan pendidikan *sexual orientation, gender identity and gender expression* (SOGIE) agar dapat menerima keberadaan kelompok LGBT.

Dika berharap, soal pekerjaan dan penghidupan, semua warga negara kembali ke konstitusi misalnya, bahwa negara harus menyediakan lapangan pekerjaan. Tapi lapangan pekerjaan yang bagaimana? Jangan memberikan lapangan pekerjaan tetapi justru dijejali dengan syarat-syarat yang menghambat ekspresi kelompok trans.

“Jadi bukan semata-mata menyediakan, tapi melihat lebih dalam bagaimana temanteman trans nyaman bekerja misalnya

mendukung dari sisi ekspresi. Pemerintah harus meyakinkan siapapun, bahwa orientasi seksual tidak ada hubungannya dengan kinerja dan kemampuan seseorang dalam bekerja," katanya.

Staf InqilabiInk, distributor tinta spidol yang menolak keberadaan LGBT di InqilabiInk mengatakan, kepada perusahaanperusahaan yang sudah terlanjut memiliki karyawan dari kelompok LGBT, maka sebaiknya bisa membantu mereka agar kembali ke jalan yang menurut agama adalah jalan yang benar. Namun, Erwin tak setuju jika mereka yang sudah terlanjut menjadi karyawan harus dipecat. Penanganan kelompok LGBT tak melulu dikaitkan dengan HAM, saja tapi aspek agama juga harus diperhitungkan.

"Tapi kalau dipecat sebaiknya jangan, justru tak bagus secara sosial. Tapi kalau dari awal sudah ketahuan dihalangi saja dulu," ujar Erwin.

Dina, Marketing Manager di sebuah perusahaan yang mempunyai sejumlah karyawan trans dan gay mengatakan, setiap perusahaan memang sudah punya prosedur dan peraturan yang berbedabeda dalam menerima karyawan. Tetapi secara pribadi, Dina berharap kelompok LGBT bisa diterima bekerja karena kreatifitas dan pilihan hidup mereka. Menurutnya, tak ada siapapun yang ingin hidupnya berubah di tengah jalan. Semuanya lebih ke pilihan hidup walaupun ada yang mengatakan secara agama itu salah.

"Tapi ada sebuah contoh, orang yang sakit AIDS yang penularannya tak melulu dari hubungan bebas. Masa hanya garagara sakit AIDS dia enggak boleh kerja bagus dan berprestasi. Itulah intinya. Dalam hati nuraninya, dia sebenarnya pengen hidup, ini lho saya bisa berkarya. Saran saya, penerimaan karyawan bukan melihat dia pria, wanita dan

LGBT, tapi terimalah mereka karena prestasi dan kinerjanya,” kata Dina.

“Saran saya ke temanteman LGBT, ciptakanlah prestasi. Jadi orang bukan karena melihat apa yang menyimpang dari dia dan pilihan hidupnya. Tapi justru karena prestasinya. Hal ini malah akan memotivasi orang. Jadi orang tidak salah fokus. Bukan fokus ke LGBTnya lagi, melainkan fokus ke prestasinya. Kinerja dan prestasi ini bagi saya lebih berguna dibicarakan daripada membicarakan orientasi seksualnya,” ujar atasan Adinda Didi ini.

Hal senada juga dikatakan Risa, relation manager di perusahaan tempat Ame bekerja. Bagi Risa pribadi, tak ada manusia yang tidak berdosa, apapun itu jenis kelamin dan orientasi seksualnya. Menurutnya, soal dosa, biarlah itu menjadi urusan yang bersnagkutan dengan Tuhannya. Risa mengaku tak ingin terlalu naif dengan menolak kelompok LGBT saat datang melamar tanpa pernah memberikan mereka kesempatan untuk bekerjasama.

“Kita tak akan pernah tahu hasilnya seperti apa sebelum bekerja sama dengan mereka. Jika ternyata mereka mampu menghasilkan sesuatu yang positif dan memberikan motivasi untuk bergerak ke arah yang baik, maka ajaklah bergabung,” katanya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Bukit Tambunan mengatakan, sepanjang kepemimpinannya, belum pernah ada kasus diskriminasi terhadap pekerja LGBT yang mereka tangani di Disnaker. Namun melihat kasus yang dialami Bobby di Deli Serdang, maka disarankan perusahaan membayar upah pekerja sesuai dengan upah minimum kota (UMK) yang berlaku di daerah tersebut.

Bukit mengatakan, dirinya juga tidak mempermasalahkan

keberadaan pekerja LGBT di sektor formal baik perusahaan swasta maupun pemerintah sepanjang yang bersangkutan bisa bekerja dengan profesional, berkontribusi untuk perusahaan dan berkompeten. "Saya pikir perusahaan lebih mengetahui siapa pekerjanya yang memenuhi standar profesional dan kompeten. Nilailah berdasarkan kompetensinya, bukan karena LGBTnya," kata Bukit.

Terkait penolakan calon karyawan yang terlibat LGBT dan sudah dicantumkan sebagai persyaratan awal lamaran, Bukit menilai hal tersebut sudah menyalahi ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni Bab III pasal 5 dan 6 tentang Kesempatan dan Perlakuan yang Sama. "Atas dasar apapun mulai dari suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan kapanpun itu, baik saat memasukkan lamaran hingga sudah bekerja, maka diskriminasi terhadap tenaga kerja tidak diperbolehkan," kata Bukit.

Pekerja LGBT di Medan, Adinda Didi, Laina dan Ame berharap masyarakat tidak menilai kelompok LGBT sebagai kelompok yang berbahaya. Menurut mereka, bahaya itu tergantung pada diri masing-masing, baik itu kelompok homo atau hetero. Justru banyak yang hetero lebih berbahaya. Menurut mereka, orientasi seksual adalah hak yang sangat pribadi. Siapapun tidak perlu tahu apa orientasi seks seseorang. Biarkan alam yang berbicara pada saat yang tepat.

Terkait kesempatan kerja dan pendidikan khususnya untuk kelompok LGBT, Didi, Laina dan Ame mengharapkan semua pihak memberikan kesempatan yang sama. Didi mengaku beruntung bisa bekerja di dua tempat formal sekaligus. Bukan itu saja, temanteman kerjanya yang berasal dari berbagai etnis dan agama cukup memberikan penerimaan yang baik terhadap orientasinya. Meskipun tak bisa dipungkiri, ada satu dua yang mencibir. Namun, Didi tak mempermasalahkannya.

“Banyak temanteman transwomen yang berada dipinggir jalan mendapatkan kesempatan yang tidak sama. Jujur aku seperti ini karena perjuanganku. Aku pengen mereka mendapat kesempatan yang sama yakni bekerja di tempattempat publik dan mendapat pendidikan di tempat yang seharusnya. Semoga pemerintah bisa mengakomodir hal ini,” katanya.

IDA AYU AKHIRNYA BISA BERIBADAH DI PURA I

FURQON ULYA HIMAWAN

Keceriaan Ida Ayu Putu Sudiartini Damayanti, 50, tidak bisa disembunyikan, setelah 14 tahun tidak bisa masuk ke pura untuk beribadah. Sejak menggunakan kursi roda, Ida Ayu tidak bisa masuk ke pura karena tiada akses baginya untuk masuk. “Kini saya bisa ikut masuk dan beribadah di pura,” kata Ida Ayu se usai memasuki Pura Jagatnatha, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (27/9).

Selama ini Ida Ayu hanya bisa berdoa di rumah. Padahal, ia ingin beribadah dan berdoa di pura seperti pemeluk Hindu lainnya. Dahulu Ida Ayu sering ditanya sesama pemeluk Hindu lainnya, pura mana yang ia datangi ketika beribadah. Namun, ia hanya menjawab tidak pernah masuk pura. “Karena sulit aksesibilitasnya,” ujarnya.

Sebenarnya, Ida Ayu sering ke Pura Jagatnatha bersama adiknya. Namun, dia hanya menunggu di luar atau di dalam mobil. Penderita polio sejak usia tiga tahun itu tidak bisa menapaki undak-undakan di pura yang cukup tinggi. Kini penantiannya selama 14 tahun terbayar sudah. Pura Jagatnatha menyediakan ram atau jalur khusus bagi pengguna kursi roda.

1 Karya ini telah terbit di *Harian Media Indonesia*, 29 September 2016

Tujuannya agar umat Hindu yang memiliki kebutuhan khusus seperti Ida Ayu itu tetap bisa masuk pura untuk beribadah. "Saya sudah mencobanya dan bisa masuk," ujar Ida Ayu dengan tersenyum lega karena bisa masuk pura dengan memakai kursi roda.

Kelegaan Ida Ayu juga menuliri Selamet Rahayu, 47, seorang muslim yang harus menggunakan tongkat saat berjalan. Dia senang lantaran masjid di kampungnya, Masjid Baitul Makmur, Sidoarjo, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Yogyakarta, sudah memiliki jalur khusus bagi penyandang tunanetra yang menuntunnya langsung masuk masjid atau ke tempat wudhu. "Lebih mudah ketimbang biasanya," kata Selamet yang rumahnya hanya berjarak 300 meter dari masjid.

Biasanya, Selamet kesulitan ketika mau masuk masjid karena konblok atau ubin dari halaman masjid semua sama. Kini, setelah ada ubin khusus, jalannya tidak susah lagi.

Selain jalur khusus penyandang tunanetra, di Masjid Baitul Makmur juga dibangun tempat wudhu khusus dengan tempat duduk.

Setia Adi Purwanta, Direktur Dria Manunggal, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam isu-isu kelompok penyandang disabilitas, mengatakan, "Kami mendorong terwujudnya aksesibilitas rumah ibadah bagi penyandang disabilitas," ujarnya di sela-sela kunjungan ke beberapa rumah ibadah di Yogyakarta yang memiliki aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.

Saat ini ada lima tempat ibadah di DIY yang memiliki akses untuk kelompok penyandang disabilitas, yakni Masjid Baitul Makmur, Gereja Kristen Jawa Wirobrajan, Gereja Katolik Kemetiran, Wihara Karangdjati, dan Pura Jagatnatha Banguntapan.

KATEGORI ONLINE

PEMENANG I:

Kisah Penghancuran Kepercayaan Asli Mentawai Febrianti (www.jurnalistravel.com)	81
---	----

PEMENANG II:

Mereka yang Terbuang Mustakim, Rifki Arsilan, Oh Nadlir, Ade Alfath, Syaefullah, Suparman, Nur Faishal, Daru Waskita, Zahrul Darmawan (www.viva.co.id).....	89
--	----

PEMENANG III:

Wajah Radikal dan Moderat Peranakan Arab Indonesia Heyder Affan (www.bbc.com)	101
--	-----

NOMINASI:

Perjuangan Julia, Anak Korban Kerusuhan Sambas Sampaikan Pesan Keberagaman, Tak Ingin Konflik Terulang Heriyanto (www.pontianakpost.co.id)	111
---	-----

Kemesraan Islam dan Nasrani yang Menggetarkan di Adonara Amar Ola Keda (www.liputan6.com).....	117
--	-----

Gus Nizam Masuk Gereja: Kita Diperintah Bergaul dengan Siapa Saja dengan Pergaulan yang Baik Pipit Maulidiya (surabaya.tribunnews.com)	121
---	-----

Masjid, Gereja dan Pura Berdampingan di Mopuya Tak Masalah Saat Jam Ibadah Bertepatan Finneke Wolajan (manado.tribunnews.com)	125
--	-----

Di Balik Merahnya Gincu Bibir Waria Dyah Ayu Pitaloka (www.rappler.com)	131
--	-----

Menjaga Kebinekaan Kota Batu dengan Tradisi Anjungsana Miski Sinau (www.malangvoice.com)	141
---	-----

Keluarga Keren, Tetap Guyub Rukun Walau Beda Agama Ummi Hadyah Saleh (www.suara.com)	151
---	-----

KISAH PENGHANCURAN KEPERCAYAAN ASLI MENTAWAI¹

FEBRIANTI

Dalam kegelapan hutan sagu, sebatang pohon durian yang amat besar berdiri menjulang. Kami berhenti di depannya, berdiri di belakan Pak Malaikat Sarokdog, 60 tahun, yang membawa kami ke tengah hutan sagu di pedalaman Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai.

Pak Malaikat yang berdiri di depan batang durian itu lalu berbicara pelan seperti sedang menyapa. Tangannya menyibak daun-daun bunga yang tumbuh di sekeliling batang durian yang ternyata memiliki akar yang besar-besar menapak dengan kokoh ke bumi.

Saya terpana saat melihat gambar sepasang telapak kaki yang terukir di pohon durian itu. Guratnya begitu halus mengikuti alur garis telapak kaki manusia. Itulah kirekat. Kirekat adalah tanda kenangan terhadap orang yang meninggal. Kirekat berupa ukiran cetakan telapak kaki dari orang yang telah meninggal di batang pohon durian di tengah hutan.

Kirekat dibuat dengan cara garis-garisnya digambar langsung dari telapak kaki atau telapak tangan orang yang

¹ Karya ini telah diterbitkan di www.jurnalistravel.com, 25 Desember 2016

baru meninggal ke pelepah batang sagu. Pelepah sagu ini diiris sesuai gambar dan menjadi cetakan untuk ditoreh di batang durian.

Pohon durian yang digunakan untuk mengukir kirekat harus dari pohon durian yang paling baik. Pohonnya besar, buahnya banyak, dan rasa buahnya enak. Pohon durian yang sudah jadi Kirekat tidak boleh ditebang dan tidak boleh dijadikan “alak toga” atau mas kawin untuk perempuan.

Di pohon durian yang menjadi kirekat yang ada di depan kami itu, selain ukiran telapak kaki juga dibuat penanda untuk postur tubuh dengan menandai pohon dengan lubang kecil untuk posisi lutut, pinggang, bahu, dan kepala.

Itu adalah kirekat kerabat Pak Malaikat yang meninggal dunia setahun lalu. Bila rindu, keluarganya akan datang ke tempat itu.

Wajah Pak Malaikat tampak sendu saat berbicara kembali ke arah pohon dengan suara lirih dalam bahasa Mentawai. Dalam perjalanan pulang saya tanyakan arti ucapannya.

“Saya katakan kepadanya, kami datang padamu bukan ingin mengganggu, tetapi karena rindu padamu,” katanya.

Ia bercerita, pohon durian itu adalah pohon durian kesayangannya, karena buahnya sangat lebat dan rasanya enak. Pohon itu warisan dari ayahnya yang sudah meninggal.

Itulah satu-satunya simbol budaya Mentawai dan kepercayaan Arat Sabulungan yang tersisa di Rogdok yang saya temui.

Tidak ada lagi uma atau rumah besar Mentawai yang ditinggali banyak keluarga. Bahkan juga tidak ada sikerei ahli pengobatan dan dukun penghubung dengan roh.

AGAMA ASLI MENTAWAI

Arat Sabulungan adalah agama tradisional di Mentawai yang percaya kepada roh-roh. Upacara-upacara besar kerap dilakukan di uma-uma. Namun pemerintah melarang kepercayaan Arat Sabulungan pada 1954 dan memaksa orang Mentawai memeluk salah satu agama yang diakui pemerintah saat itu.

Di masa-masa itu hingga pertengahan 1970-an menjadi masa kelabu bagi masyarakat Mentawai karena terjadi penghancuran secara besar-besaran terhadap kepercayaan Arat Sabulungan.

Setiap uma diperiksa dan barang-barang untuk ritual dibakar. Peralatan Sikerei juga disita, dibakar, dan banyak Sikerei yang ditangkap.

Pemerintah juga membentuk pemukiman baru untuk mengontrol masyarakat dan menjauhkan mereka dari uma yang berada di pedalaman. Rumah ibadah didirikan di pemukiman baru. Agama baru berdatangan, Protestan, Islam, Bahai, dan Katolik.

Tetapi meski sudah memiliki agama baru, Arat Sabulungan tetap hidup dalam hati masyarakat di pedalaman Siberut. Punen atau pesta adat tetap dilangsungkan. Sikerei masih dipanggil dari kampung lama mereka yang jauh untuk upacara dan pengobatan.

Kemungkinan, karena itulah perbedaan agama tidak menjadi masalah yang besar di Mentawai. Ada keluarga yang anggotanya bisa memeluk agama yang berbeda. Pak Malaikat sendiri sekeluarga memeluk Katolik.

Tetangganya di Rogdok, Robertus, juga Katolik, tetapi seorang adiknya berpindah ke Islam saat meneruskan sekolah ke Padang.

“Perbedaan agama tidak ada masalah, saat diadakan punen atau pesta adat di keluarga besar kami, untuk adik kami yang sudah muslim, kami sediakan ayam, yang lain menyantap babi,” kata Robertus.

Di Muntei, Siberut Selatan, agama lama Mentawai, Arat Sabulungan, juga masih tetap hidup di tengah warga yang kini sudah punya agama baru. Ditandai dengan bunga-bunga kembang sepatu merah dan puring yang masih banyak ditanam di halaman rumah.

Kembang sepatu merah dan daun puring itu selalu dipakai Sikerei untuk menghiasi tubuhnya saat melakukan punen atau ritual adat. Kedua tanaman yang mudah ditemui di halaman uma dan rumah warga di pedalaman Siberut mengisyaratkan tak ada lagi larangan kepada semua acara ritual Arat Sabulungan.

KENANGAN PENGHANCURAN

Saya berkunjung ke rumah seorang Sikebukut Uma atau kepala suku di Muntei. Namanya Hendrikus Sakukuret. Dengan ingatan yang masih tajam dia menceritakan kisah masa lalu.

Waktu itu 1960-an, Hendrikus masih remaja. Kepercayaan Arat Sabulungan sedang dihancurkan secara besar-besaran oleh pemerintah. Setiap uma diperiksa, barang-barang untuk ritual seperti Buluat, tempat meletakkan persembahan untuk roh dibakar. Peralatan Sikerei juga disita dan dibakar. Polisi bersama pendeta melakukan razia.

“Semua peralatannya dibakar, buluat, gajeuma, peralatan sikerei juga dibakar, seperti manik-manik kerei, lonceng, hiasan kepala, mereka para Sikerei juga ditahan selama tiga hari baru dilepas,” kenangnya.

Akhirnya warga menjalankan ritual punen secara diam-diam karena mereka tidak bisa melepaskan begitu saja budaya dan kepercayaan yang sangat melekat. Upacara pun dilakukan tengah malam.

Di uma Hendrikus yang luas kini masih terdapat semua peralatan untuk punen yang lengkap. Di pintu masuk uma dihiasi puluhan tengkorak hasil buruan, seperti monyet, babi, dan burung. Di tengah uma ada perapian dari tungku tempat memanaskan gajeuma atau gendang.

Di ruangan bagian belakang ada ruangan untuk meletakkan Buluat atau tempat persembahan yang hanya boleh digunakan oleh Sikebukut Uma, pemimpin suku. Bulua terdiri dari wadah tabung bambu, peralatan gong dan gajeuma dan bunga-bunga yang telah kering bekas punen sebelumnya.

Arat Sabulungan adalah agama tradisional di Mentawai. "Arat" artinya kepercayaan, "sa" artinya orang dan "bulungan" artinya roh. Jadi Arat Sabulungan berarti orang-orang yang percaya kepada roh-roh.

Ada banyak roh, karena semua benda bernyawa seperti kayu untuk rumah dan sampan juga memiliki roh, karena dulunya mereka berasal dari pohon yang ditebang. Ada roh yang mengatur alam semesta, roh hutan, roh laut, roh langit, roh nenek moyang, dan roh pada diri masing-masing manusia. Di atas semua roh itu ada Ulau Manua yang diyakini sebagai penjaga alam semesta. Ulau Manua mirip dengan Tuhan pada agama samawi.

Untuk menjaga agar roh-roh tidak marah, mereka melakukan sesuatu dengan hati-hati dan selalu minta izin kepada roh melalui punen. Dan tokoh sentral dalam punen ritual Arat Sabulungan adalah Sikebbukat Uma. Sikebbukat Uma adalah orang yang paling dituakan dan dipilih menjadi

pimpinan karena memiliki kearifan, memiliki pengetahuan, dan pemahaman yang sangat baik terhadap adat-istiadat.

MEMILIH SATU AGAMA

Pada 1954 adalah masa paling berat bagi orang Mentawai yang menganut Arat Sabulungan karena mereka dipaksa pemerintah memilih salah satu agama resmi. Waktu itu di tiap-tiap ibu kota kecamatan di Mentawai digelar rapat tiga agama: Protestan, Islam, dan Arat Sabulungan.

Keputusan pelarangan secara resmi dari pemerintah terhadap kepercayaan Arat Sabulungan dan orang Mentawai diminta untuk memilih agama yang ada di Mentawai saat itu dalam tempo tiga bulan: Kristen, Protestan, atau Islam. Jika dalam tempo tiga bulan belum memilih, semua alat keagamaan akan dibakar polisi dan mereka akan dihukum.

Arat Sabulungan kemudian dilarang dengan melibatkan polisi untuk menghentikan semua aktivitasnya. Di antara yang dihentikan adalah memanjangkan rambut bagi laki-laki, melakukan semua ritual yang melibatkan sikerei (dukun), menato tubuh, dan meruncing gigi.

Pemerintah pun melakukan program transmigrasi lokal untuk menjauhkan orang Mentawai dari budaya lama. Akibatnya, Arat Sabulungan yang menjadi jantung kebudayaan Mentawai pun menghilang.

Di empat pulau besar di Keulauan Mentawai, Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan, hanya di Siberut Arat Sabulungan dan aktivitas Sikerei tersisa. Di tiga pulau lain sudah lenyap. Di tiga pulau ini sudah lama tak ada sikerei dan kegiatan adat lainnya. Bahkan orang yang bertato hanya tinggal satu atau dua orang.

Arat Sabulungan bisa bertahan di sebagian Pulau Siberut,

selain karena pusat kebudayaan Mentawai dan dipercayai sebagai daerah asal kebudayaan Mentawai, juga karena pulau terbesar ini banyak memiliki suku yang tinggal di pedalaman yang sulit dijangkau dari luar. Selain itu agama belakangan masuk dibanding di Pulau Pagai dan Sipora.

Hendrikus Sakukuret adalah nama baptis. Nama aslinya Jogjog Kerei Sakukuret. Ia memilih Katolik karena agama itu lebih menerima budaya Mentawai dibandingkan Islam dan Protestan.

Walaupun telah memeluk agama baru, namun Arat Sabulungan tetap dijalankan. Di umanya ia memasang salib kayu sederhana tak jauh dari barisan tengkorak kepala babi yang tergantung.

Dalam perjalanan kapal pulang ke Padang saya bertemu seorang penyiur agama di Mentawai. Ia mengaku sudah mengislamkan lebih tujuh ribu orang di Mentawai sejak pertengahan 1960-an. Tetapi dia juga terlihat sudah berdamai dengan kepercayaan dan budaya Mentawai.

“Arat Sabulungan itu punya Tuhan yang sama dengan kita, hanya caranya yang berbeda,” katanya tersenyum ketika saya Tanya tentang kepercayaan asli Mentawai itu.

MEREKA YANG TERBUANG¹

**MUSTAKIM, RIFKI ARSILAN, OH NADLIR, ADE ALFATH,
SYAEFULLAH, SUPARMAN (BANDUNG),
NUR FAISHAL (SURABAYA), DARU WASKITA (YOGYAKARTA),
ZHRUL DARMAWAN (DEPOK)**

Adzan subuh baru saja berkumandang. Udara pun masih terasa dingin menusuk tulang. Sementara di luar rumah, kabut tampak menggelayut di pohon dan rerumpunan. Namun, kesibukan sudah terdengar dari ruang belakang. Gemicik air beradu dengan dentingan gelas dan piring yang terbuat dari beling.

Suratmi terlihat sibuk. Kepala perempuan 44 tahun itu terus menunduk. Sementara kedua tangannya dengan cekatan mencuci dan membersihkan gelas, piring dan perlengkapan makan yang menumpuk di pojok ruangan bagian belakang. Ia lalu menjerang air dan menyapu halaman. Tak lupa, ia memberi makan ayam yang mulai keluar dari kandang.

Selang setengah jam, ia kembali masuk ke rumahnya, tepatnya ruang yang memanjang dengan satu kamar di tengahnya. Ia bersama suami dan tiga anaknya sudah menempati rumah petak seluas separuh lapangan bulu tangkis ini selama tujuh bulan.

Tak ada meja dan kursi, apalagi kulkas dan televisi di rumah ini. Hanya ada karpet kumal dan tumpukan barang

1 Karya ini telah diterbitkan di *www.viva.co.id*, 14 Oktober 2016

dagangan di pojok ruang depan. Pemandangan serupa juga terlihat dari kamar yang selalu terbuka. Tak ada lemari pakaian atau meja rias. Hanya ada koper dengan tumpukan pakaian di atasnya.

Sisanya, busa tipis yang tergeletak di lantai dengan kelambu yang tampak kusam menggantung di atasnya. Sementara di ruang belakang, hanya ada kompor gas dan peralatan dapur ala kadarnya.

Menjelang siang, Suratmi keluar dengan tumpukan pita dan sedotan di nampan. Usai menggelar karpet sisa bantuan dari Kementerian Sosial, ia langsung duduk dan khusus dengan pita dan jarum di jarinya. Pelan-pelan, ia mengiris pita berukuran sekitar 12 sentimeter tersebut jadi beberapa bagian. Pita itu kemudian ditempel di sedotan dengan selotif. Ia kemudian menarik pita itu dan membentuknya menyerupai bunga.

“Inilah pekerjaan saya sekarang mas,” ujarnya membuka percakapan saat *VIVA.co.id* berkunjung ke rumah kontraknya, Rabu, 28 September 2016. Suratmi mengaku, ia kembali menekuni pekerjaan lamanya itu setelah dipulangkan dari Singkawang, Kalimantan Barat. Ini gara-gara ia tercatat sebagai bekas anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

DIBUANG DAN DIKUCILKAN

Bunda Ratmi, demikian ia biasa disapa mengatakan, ia sudah tujuh bulan tinggal di Subang, Jawa Barat. Ia terpaksa ‘mengungsi’ setelah pihak kelurahan tempatnya selama ini tinggal memintanya angkat kaki. Kelurahan Mekarjati, Haurgeulis, Indramayu, Jawa Barat melarang ia dan keluarganya tinggal di sana. Tak hanya itu, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nya juga diambil

paksa pihak kelurahan.

Setali tiga uang, sikap tak ramah juga ditunjukkan para tetangganya. Sejak ia dipulangkan dari Singkawang, tetangganya selalu menatapnya dengan curiga. Bahkan, anak-anak Bunda Ratmi tak bisa bermain dengan teman sebayanya. “Mereka langsung menutup pintu jika anak saya mau ikut nonton televisi,” ujar ibu tiga anak ini sambil berkaca-kaca.

Berangkat dari kondisi itu, ia dan suaminya memutuskan untuk pergi dan menetap di Subang. Beruntung, suaminya punya kenalan di sana. “Dulu suami saya pernah kerja sama orang sini dan diminta bantuin ngurus kebunnya,” ujarnya menambahkan.

Suratmi tak sendiri. Tetangganya, Ucup Suharna (52) juga mengalami nasib serupa. Pria yang menjadi anggota Gafatar sejak 2011 ini harus keluar dari desanya usai dipulangkan dari Mempawah, Kalimantan Barat. “Saya dijauhi keluarga dan dikucilkan sama tetangga,” ujarnya kepada *VIVA.co.id*, Rabu, 28 September 2016.

Pria yang berprofesi sebagai perupa ini mengungkapkan, sejak Gafatar divonis sebagai aliran sesat, teman-temannya menjauh. Menurut dia, tak sedikit warga yang dulu berteman baik dengan dia menjauh dan menghindar. “Akhirnya saya memilih pindah ke sini,” ujar ayah empat anak ini.

Perlakuan yang sama juga dialami Mohamad Djarot (46). Bekas Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gafatar Kabupaten Subang ini mengatakan, anak-anaknya dicap sebagai anak orang sesat. Akibatnya, anak-anaknya tak bisa bermain dan dijauhi teman-temannya. “Itu kan yang membuat saya menangis, Mas,” ujarnya saat *VIVA.co.id* berkunjung ke kebunnya di Cidahu, Subang, Rabu, 28 September 2016.

Sama seperti Ucup dan Suratmi, pria kelahiran Boyolali,

Jawa Tengah ini juga mengaku dijauhi keluarga dan warga sekitar. Warga memandangnya dengan curiga dan terus mewaspadai setiap aktifitasnya. Bahkan, hanya gara-gara membuat saung di kebun, ia dilaporkan warga ke kelurahan dengan tuduhan akan membuat keonaran. “Sampai saat ini beberapa anggota keluarga saya masih membenci saya,” ujarnya getir.

Lain lagi yang dialami Parwanto. Pria kelahiran Desa Terbit, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur itu kini hanya bisa mengandalkan otot dalam mengais rejeki. Dia menjadi kuli bangunan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Awalnya, Parwanto lumayan berkecukupan. Bersama istrinya, dia merantau ke Kota Surabaya. Di Kota Buaya, dia mengandalkan keahliannya mengemudikan kendaraan roda empat. “Saya jadi sopir sebuah perusahaan,” ujarnya kepada VIVA.co.id, Kamis, 29 September 2016.

Kesulitan hidup Parwanto dimulai ketika ia dipulangkan dari Mempawah. Saat pulang ke Trenggalek, Parwanto dan istrinya mengaku ditolak keluarga mertuanya. Berbeda dengan Suratmi, Parwanto dilayani dengan apik saat mengurus administrasi di kantor desa dan kecamatan. “Cuma ketika mengurus SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) di Kepolisian saya kurang sreg,” ujarnya menambahkan.

Saat mengurus SKCK di Kepolisian Sektor Panggul, dia dilempar ke Kepolisian Resor (Polres) Trenggalek. “Biasanya kalau yang lain kan cukup SKCK Polsek,” ujarnya. Namun, ia menurut dan mendatangi Polres Trenggalek. “Saya dibuatkan SKCK. Cuma di keterangannya ditulis bahwa saya pernah melakukan perbuatan kriminal sesuai pasal eks Gafatar. Ketika dikasih keterangan seperti itu, saya diam saja dan SKCK saya bawa ke Surabaya,” ujarnya mengengang.

Gara-gara SKCK tersebut, Parwanto akhirnya urung melamar kerja. Dia akhirnya ikut tinggal di kontrakan orangtuanya di Kabupaten Gresik dan menjadi kuli bangunan. “Kalau SKCKnya seperti itu siapa yang mau menerima.”

Juru Bicara eks Gafatar, Yudhistira Arif Rahman Hakim mengakui, banyak koleganya eks Gafatar yang mendapatkan perlakuan diskriminatif, baik oleh masyarakat maupun pemerintah setempat. “Iya benar. Perlakuan diskriminatif bisa dilihat dalam penerbitan SKCK oleh Polres Trenggalek yang mencantumkan warga eks gafatar sebagai pelaku kriminal,” ujarnya kepada *VIVA.co.id*, Selasa, 27 September 2016.

Selain SKCK, perlakuan diskriminatif yang lain adalah pengucilan dari masyarakat, tidak diundang lagi dalam arisan kampung maupun diusir dari kontrakan.

KEPINCUT GAFATAR

Bunda Ratmi mengatakan, ia sudah bergabung dengan Gafatar sejak 2012. Ia tertarik karena Gafatar banyak melakukan kerja-kerja sosial. “Waktu itu saya lihat mereka sedang melakukan kerja bakti, bersihin got,” ujarnya. Berangkat dari situ, ia pun menemui orang Gafatar dan menyampaikan niatnya untuk bergabung.

Selama gabung dengan Gafatar, ia mengaku banyak melakukan kerja-kerja sosial, mulai dari kerja bakti, membersihkan lingkungan hingga pasar murah dan donor darah. Ia juga rajin ikut diskusi dan seminar yang diselenggarakan ormas tersebut. “Banyak ilmu yang saya dapatkan.”

Ungkapan senada disampaikan Djarot. Ia mengatakan, Gafatar banyak melakukan kerja-kerja sosial. Ia juga kepincut dengan budaya gotong royong yang dikembangkan organisasi

ini. Selain itu, Gafatar juga mengajarkan Pancasila dan mencintai Tanah Air. Ia yang semula acuh dan abai dengan Pancasila menjadi cinta dengan dasar negara tersebut. “Saya lebih bisa memahami Pancasila setelah bergabung dengan Gafatar. Padahal dulu saya tidak suka dengan Pancasila,” ujarnya.

Selama bergabung di Gafatar, ia juga banyak belajar. Mulai dari soal kemasyarakatan, kebangsaan hingga pertanian dan bercocok tanam. Tak hanya itu, Gafatar juga rajin mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah. “Tercatat sejak 2012 hingga 2015, ada 86 kali bakti sosial yang dilakukan Gafatar di Subang,” ujar mantan petinggi Gafatar Subang ini.

Sementara, Haris Setiawan mengaku tertarik dengan Gafatar karena kegiatannya bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan dan banyak membantu dan meringankan beban keluarga tidak mampu. “Pada tahun 2012 saya mulai bergabung merupakan saatnya saya senang ikut organisasi. Gafatar yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan sangat menarik hati saya,” ujar jebolan UIN Sunan Kalijaga ini kepada *VIVA.co.id*, Kamis, 29 September 2016.

Meski Gafatar telah bubar, diakui Haris ada program yang cukup menarik dari Gafatar yakni soal kedaulatan pangan. Menurut dia, itu merupakan program yang menjanjikan ketika Indonesia masih tergantung impor pangan. “Saya memutuskan untuk berangkat ke Mempawah, Kalimantan Barat sesuai dengan hasil rapat bersama,” ujar warga Yogyakarta ini.

Haris menjelaskan, berangkat ke Mempawah Kalimantan Barat bersama 30 eks Gafatar lainnya dengan menggunakan jalur laut melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menuju Pontianak. “Saya memutuskan berangkat

pada bulan Oktober 2015 melalui jalur laut. Tiba di Mempawah, Haris mengaku memilih untuk bekerja di lahan dan bukan menyiapkan rumah untuk para pendatang baru eks Gafatar.

Pada awal kedatangannya semua sesuai dengan prosedur yang berlaku bahkan mendapatkan surat keterangan surat tinggal sementara dari pemerintah setempat. “Kita datang dengan cara legal, silaturahmi dengan warga setempat. Dan dicatat, kita datang bukan karena paksaan.”

DIUSIR DARI TANAH HARAPAN

Menurut Haris, kedatangan ratusan warga eks Gafatar diterima dengan baik oleh warga setempat. Bahkan, pemerintah setempat menyiapkan lahan yang belum digarap warga untuk digarap warga eks Gafatar. “Hubungan kita dengan warga sekitar sangat baik. Tak ada gesekan bahkan saling membantu,” ujarnya menerangkan.

Namun, setelah hampir enam bulan tinggal di Mempawah dan 60 persen rumah sudah terbangun. Serta lahan pertanian siap panen, timbul masalah yang dipicu oleh orang dari luar Mempawah. Mereka menuding eks Gafatar merupakan pengikut aliran sesat dan harus pergi dari Mempawah. “Sempat dilakukan negosiasi dengan pemerintah dan kelompok yang menuntut eks Gafatar angkat kaki. Namun negosiasi gagal,” ujarnya.

Puncaknya, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2015, massa yang tak dikenal mendatangi kampung eks Gafatar dan mengusir mereka. “Belum satu kilo dari kampung, massa telah membakar rumah dan melakukan penjarahan,” ujarnya mengenang.

Warga eks Gafatar yang direlokasi juga diperintahkan hanya membawa baju seadanya dan harta lainnya ditinggal.

Namun setelah ditinggal justru dijarah. “Kita bukannya direlokasi namun ditempatkan di markas tentara dan selanjutnya dipulangkan tanpa membawa harta benda kecuali pakaian di badan.”

Parwanto menambahkan, pada Agustus tahun 2015, ada pengumuman yang mengajak eks anggota Gafatar untuk hijrah ke Mempawah, Kalimantan. Di sana, anggota yang mau ikut akan diberikan lahan untuk bercocok tanam. “Tidak ada paksaan, yang mau ikut ayo, yang tidak mau tidak ada apa-apa,” ujarnya.

Bersama istri dan anaknya yang baru lahir, Parwanto memutuskan untuk ikut program semacam transmigrasi itu. Di Mempawah, Parwanto tinggal secara berkelompok di rumah-rumah yang dibangun bersama. Dia menyebut, ada sekitar 150 kepala keluarga tinggal di situ. Mereka kemudian menggarap lahan yang disediakan untuk bercocok tanam. “Warga Dayak menerima kami dan hidup berdampingan,” ujarnya.

Namun, entah bagaimana, tiba-tiba ada sekelompok orang yang tidak senang dengan mereka. Massa yang tak senang itu membakar pondok Parwanto dan rekannya. Dia terusir dari Mempawah lalu dipulangkan ke daerah asal oleh pemerintah. “Saya yakin ada provokasi. Kami hidup tenang dengan warga Dayak di Kalimantan,” ucapnya. Sampai hari ini Parwanto mengaku heran. Kenapa ia dan rekan-rekannya diusir dari Kalimantan. Padahal, ia mengaku hanya ingin bercocok tanam.

PEMERINTAH MEMBANTAH

Direktur Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) dari Kementerian Sosial, Sahabudin, mengatakan pihaknya sudah memulangkan eks Gafatar dari Kalimantan ke seluruh pelosok nusantara. “Kita bersinergi terkait masalah

itu dengan institusi lain. Dari segi pengamanannya TNI Polri. Dari segi transportnya Kementerian Perhubungan. Kemensos itu yang dilakukan di penanganan permukiman logistik. Jadi Kemensos itu ketika ada penampungan di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, tugas pokoknya adalah logistiknya,” ujarnya.

Menurut dia, memang ada wacana agar para eks Gafatar ditransmigrasi, di arahkan ke tempat tempat yang ada lapangan pekerjaan. “Kan mereka cocok di pertanian dan perkebunan. Kemarin kan kita sudah rakor kemana-mana, ke Kementerian Desa Transmigrasi diarahkan ke sana untuk memberikan lapangan kerja kepada mereka,” ujarnya menambahkan.

Ia menjelaskan, para eks Gafatar sudah kembali ke masyarakat. Menurut dia, kalau sudah kembali, mereka bukan lagi Gafatar tapi sudah menjadi bagian dari masyarakat paada umumnya. Kalau memang layak dibantu, mereka akan dibantu dengan program bantuan regular.

“Contohnya kita kasih bantuan keserasian sosial. Kita kasih dana Rp9 juta, mereka mau bikin apa di kampung halamannya. Tujuannya itu terwujudnya konektifitas masyarakat. Ada juga namanya keluarga harapan. Kalau memang layak dibantu mereka tergolong sebagai keluarga miskin pasti kita bantu.”

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengaku heran dengan kasus penarikan KTP dan KK warga eks Gafatar. Pasalnya, itu merupakan identitas yang melekat dengan penduduk. Untuk itu ia memerintahkan agar pemerintah daerah memberikan kembali identitas penduduk sesuai data base atau domisilinya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Pemkab Bantul, Yogyakarta, Mahmudi mengatakan, seperti penanganan di daerah lain, Gafatar yang merupakan warga Bantul harus menjalani “karantina” di Asrama Haji Donohudan setelah

tiba dari Kalimantan. Selanjutnya dikirim ke Youth Center di Sleman selama tiga hari untuk mendapatkan pendampingan dan pembelajaran bila bangsa dan agama. “Setelah itu dikirim di penampungan sementara di masing-masing kabupaten-kota. Kebetulan untuk di Bantul ditampung di SKB Sewon,” ujarnya.

Ia mengakui, dari 45 eks anggota Gafatar yang dipulangkan ke Bantul, terdapat satu keluarga eks Gafatar yang ditolak untuk kembali ke kampungnya. Padahal semua harta bendanya sudah dijual untuk mencari penghidupan lain di Kalimantan.

“Penolakan itu diduga kuat karena ia mengajarkan aliran agama yang dinilai melenceng dari agama Islam. Sehingga ketika pulang ke kampung halamannya disumpah terlebih dahulu dan harus mengikuti tradisi yang ada di kampung.”

Dari 48 anggota eks Gafatar yang dipulangkan ke Bantul saat ini telah mengurus administrasi kependudukan dan kembali menjadi penduduk Bantul dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga Bantul. “Kita tidak mempersulit warga eks Gafatar untuk kembali menjadi warga Bantul karena pemerintah juga sangat terbuka. Mereka adalah korban,” ujar Sunarto, Asisten I Bidang Pemerintahan, Pemkab Bantul.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Arifin, mengatakan penanganan eks anggota Gafatar yang berasal dari Indramayu, Subang, Bogor dan Depok difokuskan pada pembinaan sosial masyarakat. Menurutnya, pembinaan ini diserahkan langsung kepada Dinas Sosial di masing masing Kabupaten Kota. “Sekarang fokus kita ke bermasyarakatnya. Jangan lagi ada embel embel soal Gafatar ada saat mereka sudah di sini. Kalau ada lagi, ya akan jadi lagi,” ujar Arifin saat dihubungi *VIVA.co.id*, Jumat, 30 September 2016.

Arifin mengatakan, dari monitoring dan koordinasi pembinaan di daerah masing - masing, para eks Gafatar ini sudah mendapatkan hak kelayakan meski berbeda dengan kondisi ekonomi sebelumnya. "Pada umumnya mereka ini sudah survive. Ada yang sudah punya pekerjaan, ada yang berprofesi dagang. Walaupun memang kondisinya masih tidak mencukupi," ujarnya.

Menurut dia, pembinaan untuk eks Gafatar bukan perkara mudah. Untuk menstabilkan kondisi sosial kemasyarakatannya, pihaknya merangkul ahli agama, tokoh masyarakat untuk membimbing. Bahkan, penanganan eks Gafatar mulai dari biaya makan minum, hingga kebutuhan sekunder, sudah memakan biaya cukup besar. "Anggaran yang sudah dikucurkan itu Rp1,3 milyar. Walaupun sudah diserahkan ke daerah masing - masing, pembinaan masih terus jalan, salah satunya di Bogor."

Soal janji Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan memberikan santunan Rp10 ribu rupiah perorang selama tiga bulan, menurut Arifin, pihaknya hingga saat ini belum menerima tembusan apapun. "Gak tahu itu, belum *nyampe* juga. yang pasti di sini program terus berlanjut. Mulai dari program Jamkesmas, pendidikan, PKH bagi ibu hamil. Yang penting mereka bisa kembali bermasyarakat."

Hari beranjak siang. Suratmi segera merapikan pita, jarum, gunting dan sedotan serta peralatan lain. Ia pun masuk ke rumah dan berkemas. Tak lama kemudian, ia membopong kotak plastik berisi barang kerajinan. Barang-barang itu akan ia jajakan di sekolahan.

Usai pamit dengan suami dan tiga anaknya, Suratmi langsung menggenjot sepeda mininya, menuju sekolah tempat ia bisa menjajakan kerajinan pita dan patung mininya.

WAJAH RADIKAL DAN MODERAT PERANAKAN ARAB INDONESIA¹

HEYDER AFFAN

Wajah radikal peranakan Arab Indonesia --yang sebetulnya minoritas-- lebih sering mendapatkan tempat ketimbang sisi moderatnya. Catatan Heyder Affan, wartawan BBC Indonesia yang kebetulan juga keturunan Arab.

Sepertinya tidak ada aktivitas yang mencurigakan malam itu. Hanya terdengar lagu-lagu Natal dan doa-doa dari jemaat gereja di berbagai sudut kota Malang.

Sebagian warga kota kecil itu juga barangkali asyik di depan layar kaca --termasuk saya dan keluargaku. Lainnya mungkin sudah terlelap tidur. Hari itu, 24 Desember 1984.

Namun demikian, di sudut lain kota Malang, ada sejumlah pria berjalan mengendap-endap. Mereka barangkali berkeringat dingin --dan sedikit gemetar. Dan membawa bahan peledak.

"Bleng!" Bom itu meledakkan gedung Seminari Alkitab Asia Tenggara dan Gereja Sasana Budaya Katolik di Malang, Jawa Timur.

Bunyi ledakan itu terdengar hingga ruang tengah rumah

¹ Karya ini telah diterbitkan di *www.bbc.com*, 13 November 2015

keluarga saya --yang berjarak sekitar 500 meter dari gereja Katolik itu. “Mungkin cuma tabrakan,” begitu kata yang terlontar saat itu. Saya saat itu berumur 17 tahun.

BOM BOROBUDUR 1985

Satu bulan kemudian, 21 Januari 1985, ledakan bom dalam skala lebih besar mengguncang dan merusakkan sembilan stupa dan dua patung Buddha di Candi Borobudur. Siapa pelaku peledakan bom di Malang dan candi Borobudur? Semua masih menjadi misteri, sampai terjadi peristiwa lain, dua bulan kemudian.

Jaringan pelaku peledakan bom itu baru terungkap setelah sebuah bom meledak di dalam bus Pemuda Express. Bom itu meledak saat melintas di Desa Sumber Kencono, Banyuwangi pada 16 Maret 1985. Penyelidikan polisi menyimpulkan bom itu hendak diledakkan di Kuta Bali.

AL-HABSYI BERSAUDARA

Empat pelaku tewas dalam ledakan di dalam bus itu, tetapi satu orang lainnya hanya terluka. Namanya: Abdul Kadir Ali Al-Habsyi. Polisi kemudian menyeret kakaknya, Husein Ali Al-Habsyi, sebagai pelaku lainnya.

Walaupun gagal menangkap otak pelaku bernama Mohammad Jawad alias “Ibrahim” alias “Kresna”, dua orang bersaudara itu belakangan dianggap sebagai pelaku peledakan bom Borobudur. Saya masih ingat, melalui cerita ayah atau ibuku, sebagian warga Indonesia keturunan Arab di Malang saat itu merasa “risau”, setelah dua orang warga Indonesia keturunan Arab itu disebut sebagai pelakunya.

Selama persidangan kasus ini, jaksa menuduh pengeboman candi Borobudur terkait peristiwa Tanjung Priok, 12 September

1984. Keduanya semacam melakukan aksi balas dendam atas penembakan aparat terhap kelompok sipil dalam kasus Priok.

Abdul Kadir kemudian divonis 20 tahun penjara, sementara Husein divonis penjara seumur hidup. Setelah kekuasaan Presiden Suharto berakhir, pada 1999, keduanya masing-masing mendapat remisi dan grasi.

ISIS DAN VIDEO ABU JANDAL

Lebih dari 30 tahun setelah teror Bom Borobudur, warga Indonesia peranakan Arab di kota Malang, kembali dikejutkan isi pidato seorang pria yang disebut sebagai Salim Mubarak Attatimi alias Abu Jandal.

Melalui video yang diunggah di *Youtube*, Salim Mubarak Attamimi, pada Desember 2014 lalu, telah mengeluarkan ancaman serangan terhadap institusi TNI, kepolisian dan organisasi NU.

Attamimi diyakini telah berada di Suriah dan bergabung dengan kelompok militan Negara Islam atau ISIS. Sebelumnya dia disebutkan mendirikan perkumpulan yang bersifat tertutup di Malang. "Pesan ini, saya tujukan (kepada) Panglima TNI Muldoko, Polri dan Banser," ujar pria yang mengenakan penutup kepala hitam dan berjaket warna gelap. Polisi meyakini pria itu adalah Salim Mubarak Attatimi, seorang keturunan Arab.

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyad Mbai mengatakan, keberadaan Abu Jandal terkait dengan keberangkatan belasan WNI yang berangkat ke Suriah pada Maret 2015 lalu. "Itu Abu Jandal dan satu orang semacam LO (*liaison officer*)-nya ISIS dengan militan kita di sini," kata Ansyad Mbai.

TEMAN BERMAIN SEPAK BOLA

Awal November 2015 lalu, saya pulang ke rumah orang tua saya di Malang, usai meliput peringatan Sumpah Pemuda keturunan Arab 1934 yang digelar di Surabaya.

Di kota itu, saya bertemu seorang teman masa kanak-kanak ketika dulu aktif di klub sepak bola *Al Badar*. Perkumpulan sepak bola ini didirikan warga keturunan Arab di kota Malang, walaupun anggotanya tidak melulu etnis Arab. "Sudah dengar teman kita di Al Badar, Abdul Hakim, yang diadili karena terkait ISIS?" Tanya temanku itu. Saya mencoba mengingat sosok Abdul Hakim, tetapi lupa sepenuhnya.

Pada 25 Maret 2015, Abdul Hakim Munabari, warga kelurahan Kasin, Malang, ditangkap pasukan elit kepolisian anti-teror Densus 88. Dia diduga terlibat kelompok militan Negara Islam atau dulu disebut ISIS.

Abdul Hakim Munabari diadili bersama lima terdakwa lainnya, diantaranya Ridwan Sungkar dan Helmi Alamudi, dua orang warga keturunan Arab asal Solo dan Tulungagung. Polisi menduga mereka terkait dengan jaringan yang dipimpin Abu Jandal alias Salim Attamimi.

'PROBLEM KETURUNAN ARAB'

Seperti yang dirisaukan warga peranakan Arab di Malang ketika "dua Al-Habsyi" diputus bersalah dalam kasus bom Borobudur (1985), warga keturunan Arab saat ini sepertinya juga dihadapkan persoalan yang sama.

Di Surabaya, saya bertemu pria keturunan Arab yang selama ini memberikan perhatian penuh terhadap dinamika keturunan Arab di Indonesia. Namanya Hasan Bahanan, yang dikenal pula sebagai staf pengajar di Fakultas Komunikasi, Universitas 17 Agustus, Surabaya.

“Itu menjadi problem di kalangan anak-anak (keturunan Arab) itu sekarang, ketika mereka dikaitkan ideologi trans-nasional, dan kemudian konteks kearaban diangkat sebagai suatu citra yang berubah sekarang ini,” kata Hasan.

Hasan tidak sendirian. Saya sebelumnya juga mengundang secara khusus dan mewawancarai seorang perempuan keturunan Arab asal Pekalongan, Jateng, yang dikenal sebagai komedian.

‘HANYA HITUNGAN JARI’

Sakdiyah Ma’ruf, 33 tahun, melalui panggung komedi, acap menyuarakan kegelisahannya terhadap sikap radikal yang ditunjukkan sebagian warga keturunan Arab di Indonesia. “Di masa post-reformasi, kita menghadapi minoritas keturunan Arab yang suaranya keras, termasuk kelompok radikal dan fundamentalis,” kata Sakdiyah.

Sakdiyah, yang telah meraih penghargaan *Vaclav Havel International for Creative Dissent 2015* di Oslo, Norwegia, juga tidak memungkirkan sebagian anak muda keturunan Arab tertarik ideologi ISIS.

“Komunitas Arab seperti terhubung lebih mudah -ketimbang masyarakat lain- dengan orang-orang di Timur Tengah. Ini terjadi karena situasi geopolitik yang mencair,” katanya setengah menganalisa. “Sebagian orang-orang Arab Indonesia ini kemudian mencari rujukan baru,” ujarnya, “Di sinilah isu trans-nasional menemukan tempatnya.”

Namun demikian, Sakdiyah dan Hasan Bahanan meyakini jumlah anak muda keturunan Arab yang tertarik radikalisme Islam jumlahnya kecil. “Itu hanya hitungan jari saja,” kata Hasan. “Dan dia kalau mau memimpin organisasi, ya, organisasinya bukan organisasi utama (keturunan Arab).”

BA'ASYIR, SUNGKAR, PATEK

Pertanyaannya kemudian, sejak kapan warga keturunan Arab mulai terlibat dalam gerakan radikal Islam di Indonesia?

Ismail Fajrie Alatas, mahasiswa Program Doktor Antropologi dan Sejarah, Universitas Michigan, AS, mengatakan, awal mula radikalisasi keturunan Arab di Indonesia “tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik global”.

Radikalisasi pada sosok Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar --pendiri pondok pesantren Al-Mukmin di Solo, Jateng, pada awal 1970-an, yang mencita-citakan penerapan Syariat Islam di Indonesia-- disebutnya tidak terlepas pada masa “akhir perang dingin antara AS dan Soviet”.

Di awal 1983, Ba'asyir dan Sungkar dituduh menghasut menolak penerapan azas tunggal Pancasila dan divonis sembilan tahun penjara. Saat memasuki proses kasasi, mereka kemudian melarikan diri ke Malaysia.

Di Malaysia, mereka berperan mengirim warga Indonesia yang bersedia berperang ke Afghanistan --diantaranya ada yang keturunan Arab.“Dua orang yang Anda sebut (Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar) berperan besar dalam proses radikalisasi orang-orang yang akhirnya berangkat ke tempat-tempat seperti Afghanistan,” kata Fajrie.

“Tokoh-tokoh ini (di antaranya Umar Patik alias Hisyam Bawazir, tersangka kasus bom Bali 2002 dan Natal) yang pergi ke Afganistan dan mencoba menggunakan taktik kekerasan untuk digunakan di Indonesia,” kata Fajrie.

“Sekarang ini era digital, di mana orang begitu cepat bisa merespon apa yang terjadi, maka sisi-sisi keradikalan mereka (keturunan Arab) itulah yang banyak diungkap.”

– Purnawan Basundoro, staf pengajar Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga.

Pengamat masalah keturunan Arab, Hasan Bahanan mengatakan, radikalisme Islam di Indonesia --yang antara lain melibatkan keturunan Arab-- tidak terlepas dari persoalan global, seperti di Afganistan, Palestina dan kini di Irak dan Suriah. “Ketika terjadi perang Afganistan, semua yang anti Komunis berbondong-bondong ke sana. Ketika sudah selesai, muncul lagi radikalisme baru. Katakanlah Taliban. Dan ketika ini reda, muncul ISIS,” kata Hasan.

PERAN KELOMPOK MODERAT

Walaupun aktivitas radikalisme Islam di Indonesia disebut hanya melibatkan segelintir orang-orang peranakan Arab, tetapi tetap saja gaungnya lebih terasa. “Sekarang ini era digital, di mana orang begitu cepat bisa merespon apa yang terjadi, maka sisi-sisi keradikalan mereka (keturunan Arab) itulah yang banyak diungkap,” kata Purnawan Basundoro, staf pengajar Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga.

“Mengapa? Karena tindakan radikal ini ‘kan di luar nilai-nilai kemanusiaan. Biasanya tindakan seperti itu jauh diingat orang daripada tindakan baik,” jelasnya lebih lanjut.

“Karena itu, mari wajah radikal itu diminimalisir. Mari masyarakat keturunan Arab yang selama ini memilih jalan moderat, damai, mencegah orang-orang yang mau berbuat radikal.”

– Purnawan Basundoro.

=Purnawan selama ini dikenal pernah meneliti dan rajin mengamati dinamika keturunan Arab Indonesia. Dia diundang sebagai pembicara dalam diskusi memperingati Sumpah pemuda keturunan Arab 1934, Minggu (01/11) lalu di Surabaya.

Dia kemudian melanjutkan: “Karena itu, mari wajah radikal itu diminimalisir. Mari masyarakat keturunan Arab yang selama ini memilih jalan moderat, damai, mencegah orang-orang yang mau berbuat radikal.”

KEHADIRAN ULAMA KETURUNAN ARAB

Ketika seorang warga kota Malang yang berlatar etnis Arab, Abdul Hakim Munabari, ditangkap pada akhir Maret 2015 lalu, Wali Kota Malang Muchamad Anton menyerukan agar “kaum ulama, kiai dan para habib ikut berperan menangkal radikalisme”. “Agar memberikan pemahaman yang benar soal Islam,” kata Anton, seperti dikutip media.

Juru bicara BNPT, Irfan Idris juga meminta agar kaum ulama keturunan Arab memperkuat jaringan agar “kaum muda keturunan Arab tidak terbawa arus radikalisasi”.

Usulan serupa juga disarankan Ismail Fajrie Alatas. Menurutnya, kehadiran para ulama keturunan Arab --yang menolak aksi kekerasan dalam menjalankan dakwahnya-- dapat menjalankan perannya dalam kasus ini.

“Banyak ulama-ulama Arab Habaib ataupun non-Habaib, mereka berjubah, bersorban, dan berjenggot, tetapi tidak mendakwahkan kekerasan,” papar Fajrie yang tengah menyelesaikan disertasinya tentang formasi sosial di kalangan Arab Alawiyin di Indonesia. “Di sinilah pentingnya sosialisasi dan pendidikan di keturunan Arab sendiri,” katanya menambahkan.

MENDENGARKAN ULAMA SENIOR

Namun demikian, Fajrie menyadari keterbatasan peran dan wewenang para ulama tersebut di dalam menjalankan tuntutan peran itu, “Karena tidak ada struktur, tidak ada hirarki dalam kelompok keturunan Arab. Setiap ulama dapat membentuk jamaah masing-masing, yang kadang-kadang di antara mereka *clash* memperebutkan jamaah,” jelas Fajrie.

Di sinilah, lanjutnya, yang bisa dilakukan para ulama itu “terus mengumandangkan wacana Islam keindonesiaan yang moderat.”

Suara agak optimis diutarakan Abdullah Aljufri, yang berusia 37 tahun, pegiat di LSM Mutafannin yang bergerak di bidang penulisan tentang masalah sosial budaya peranakan Arab Indonesia.

Abdullah memberikan contoh, kaum peranakan Arab relatif berhasil membentengi kaum mudanya dari arus radikalisis karena kekuatan bertumpu pada sosok ulama yang dihormati. “Mereka itu seperti benteng kita. Kita bernaung pada mereka. Dan akhirnya kelompok-kelompok garis keras itu tersingkir. Saya melihat ini sudah dilakukan,” kata Abdullah.

PERJUANGAN JULIA, ANAK KORBAN
KERUSUHAN SAMBAS

SAMPAIKAN PESAN KEBERAGAMAN, TAK INGIN KONFLIK TERULANG¹

HERIYANTO

Julia (25) anak korban kerusuhan Sambas mampu membuktikan bahwa dia bisa bangkit dan sukses menjadi sarjana. Kini dia menjadi pendamping masyarakat dan aktif menyebarkan pesan keberagaman. Julia tak ingin apa yang pernah menimpanya terjadi pada orang lain.

Julia masih ingat dengan jelas peristiwa memilukan yang dialaminya pada 1997 itu. Saat itu usianya baru enam tahun. Rumahnya dibakar sekelompok orang. Suara tembakan terdengar begitu dekat. Orang-orang berlarian ke sana kemari menyelamatkan diri. Dia hanya bisa menangis ketakutan.

Julia digendong ibunya, Fatimah dan diselamatkan sejumlah tentara bersenjata. Sebuah truk militer menunggu tak jauh dari rumah. Bersama warga lain, mereka diungsikan menuju Pontianak. "Kami hanya membawa baju yang melekat di badan," kata Julia saat ditemui di rumahnya di Gang

¹ Karya ini telah diterbitkan di www.pontianakpost.co.id, 26 Desember 2016

Sambas Mandiri, Kelurahan Batu Layang, Pontianak Utara, Sabtu (24/12).

Di pengungsian, Julia dan keluarga tidur bersama para pengungsi lain di sebuah gedung di Pontianak. Beruntung ada keluarga yang menjemput mereka dan memberi tumpangan tempat tinggal. “Kejadian itu tak akan pernah terlupakan,” kata Julia.

Meski sudah 19 tahun berlalu, konflik yang terjadi di Sambas itu masih terekam jelas di memorinya. Tak mudah baginya melupakan peristiwa kelam itu. Dia berharap kejadian itu tak terulang lagi. “Jangan sampai ada anak-anak mengalami nasib seperti saya,” katanya.

Tentu bukan hal mudah bangkit dari trauma masa kecil. Namun sedikit demi sedikit Julia mampu melaluinya. Di Pontianak dia bersyukur masih bisa bersekolah. Mulai jenjang sekolah dasar hingga SMA. Atas perjuangan ayahnya, dia bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. “Saya salut dengan Bapak, walau hanya bertani dan memelihara sapi bisa menyekolahkan saya dan adik-adik,” katanya.

Mereka memang pernah menjalani masa-masa sulit selama berada di pengungsian dan harus memulai hidup dari nol. Dari hasil bekerja orangtua Julia mengumpulkan uang untuk membeli tanah di Gang Sambas Mandiri dan membangun rumah di sana. Kini setelah beberapa tahun berlalu, warga eks pengungsi itu sudah bisa hidup mandiri.

Tahun lalu, Julia lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pontianak. Kini Julia aktif menjadi pendamping bagi Unit Pengelola Keuangan (UPK) dalam Program Kota Ku (Program Kota Tanpa Kumuh). Program ini merupakan kelanjutan dari PNPM Mandiri. Warga binaanya beragam. Mulai dari Melayu, Tionghoa, Jawa, hingga Madura. “Pokoknya multietnis,” kata

Julia.

Tugas pokok Julia adalah memberi pendampingan keuangan bagi warga binaannya. Tapi di sela-sela tugas pokok itu, Julia kerap menyisipkan berbagai pesan tentang toleransi dan keberagaman. Bagaimana agar warga bisa rukun meski berbeda etnis dan agama. Agar warga bisa menerima dan memahami orang luar dengan terbuka. Juga bisa saling toleran. "Saya sering sampaikan pada ibu-ibu untuk tidak membeda-bedakan suku dan agama dalam bergaul," katanya.

Julia juga kerap mendampingi para perempuan untuk belajar menenun. Keahlian menenun didapatkan Julia dari ibunya, Fatimah. Fatimah sendiri belajar menenun saat masih tinggal di Sambas.

Fatimah adalah sosok perempuan tangguh. Bayangkan, bersama suaminya, dia harus menghidupi 12 anak. Maka untuk bertahan hidup, berbagai pekerja bisa dilakoninya, mulai dari bertani hingga beternak.

Beruntung, Fatimah punya keahlian menenun. Aktivitas ini sudah dilakoni sejak dia masih remaja sampai kerusakan itu terjadi. Kini Fatimah mengaku lebih fokus untuk menenun. Setelah dihitung-hitung olehnya, penghasilan dari menenun ternyata jauh lebih besar dari penghasilan lain.

Fatimah bergabung dengan 50 perempuan lain yang juga kini aktif menenun di Gang Sambas Mandiri. Di sana hampir setiap rumah memiliki alat tenun. Alat tenun itu biasanya diletakkan di dapur atau di ruangan khusus. Mereka biasa mulai menenun setelah pekerjaan rumah tangga selesai dilakukan.

Aktivitas menenun ini jelas membantu ekonomi keluarga. Kebanyakan warga di sana memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Penghasilan para suami kebanyakan adalah bertani dan

beternak sapi. Karena itu para perempuan juga harus bekerja untuk menambah penghasilan. “Kalau mengharapkan suami saja tidak cukup,” katanya.

Keahlian menenun juga menjadi sarana bagi Julia untuk menyuarakan pesan keberagaman. Kain tenun Sambas khas Melayu ini justru dikerjakan perempuan-perempuan dari etnis Madura. Dengan keahliannya, Julia bersedia mengajari siapapun yang mau belajar menenun. “Saya selalu katakan, siapapun bisa mengerjakan tenun ini, asal mau belajar,” ujarnya.

MENIKAH

Akhir November lalu, Julia mengakhiri masa lajang setelah menikah dengan Gilang Andri Agustian, kakak kalasnya di sekolah dulu. Tapi perjuangan untuk sampai pada tahap pernikahan itu tidak mudah. Dalam tradisi keluarga, menikah haruslah dengan satu etnis. Tapi Julia menikah dengan suku Melayu. Sesuatu yang jarang dilakukan dalam tradisi keluarganya. Menurut Julia, ibunya awalnya tidak setuju dia menikah dengan Gilang. “Keluarga masih ada yang mempertanyakan, mengapa menikah dengan lain ‘bangsa?’” ujarnya.

Namun Julia berupaya memutus tradisi itu. Menurut Julia, tidak masalah baginya menikah dengan siapapun. Meski bukan satu etnis. “Saya ingin semua bisa membaur, termasuk menikah dengan etnis lain. Itu kan tidak ada salahnya. Yang penting bisa saling memahami,” lanjutnya.

Direktur Mitra Sekolah Masyarakat, Subro mengatakan, apa yang dilakukan Julia dan komunitas korban kerusakan Sambas di Gang Sambas Mandiri adalah sesuatu yang positif. “Di satu sisi, mereka pernah diusir, tapi hubungan baik tetap

terpelihara. Itu sangat positif,” katanya.

Menurut Subro, Kalbar cukup rawan terjadi konflik sosial. Sudah belasan kali konflik di provinsi ini. Dua konflik yang paling disorotinya adalah pada 1999 dan 1997. Banyak orang yang harus meninggalkan kampung halaman, mengungsi ke tempat lain.

Salah satu pencegahan konflik, kata Subro, warga harus bisa membaur dengan suku atau komunitas lain. Sehingga bisa saling memahami. Apa yang dilakukan komunitas di Gang Sambas Mandiri menjadi contohnya. Mereka tetap melestarikan tradisi tenun yang merupakan tradisi selama di Sambas. Hasil tenun juga dijual ke Sambas, sementara benangnya didatangkan dari sana. “Itu menjadi fakta bahwa hubungan baik itu masih terjalin baik. Masih saling mengunjungi. Bahkan ada yang berjodoh lagi,” katanya.

KEMESRAAN ISLAM DAN NASRANI YANG MENGGETARKAN DI ADONARA¹

AMAR OLA KEDA

Tak ada yang istimewa menyambut hari kelahiran Yesus Kristus atau Natal di dusun itu. Tak ada pohon Natal mewah terpampang di rumah, yang terdengar hanyalah dendang lagu rohani dari suara bocah-bocah kampung.

Namun, ada yang istimewa di sana. Ternyata warga Adonara, Dusun III Walang Baran Tawan, Desa Nisa Nulan, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, memiliki tradisi Natal yang unik.

Di desa itu, toleransi antarumat beragama begitu kental terasa saat hari raya keagamaan kaum muslim maupun umat Kristiani. Seperti saat perayaan Natal pada Minggu, 25 Desember 2016.

Usai Misa Natal di Gereja Santa Ana, kaum muslim turut mempersembahkan kasidah di hadapan pastor dan umat Kristiani. Usai menampilkan kasidah, umat Islam mulai menyalami seluruh jemaat yang hadir dengan suasana penuh kedamaian.

¹ Karya ini telah diterbitkan di www.liputan6.com, 26 Desember 2016

Karim Abdulah selaku Imam Masjid Al-Hidayah, Desa Nisa Nulan mengatakan, menampilkan kasidah dan salaman sudah seperti tradisi yang diwariskan dari nenek moyang. Saat hari raya umat Muslim, lanjut Karim, pihak gereja turut berpartisipasi seperti melakukan penjagaan hingga acara salaman.

“Toleransi ini sudah diwariskan dan sudah dijadikan sebagai tradisi di desa ini,” ucap Karim kepada Liputan6.com melalui telepon seluler, Senin (26/12/2016).

Kepala Desa Nisa Nulan, Yohanes Neti Kemedok mengatakan, Muslim di Desa Nisa Nulan merupakan minoritas. Namun, tradisi toleransi di desa itu selalu diwujudkan dengan kebersamaan dan kerja sama.

“Saat pembangunan gereja, hampir setiap hari umat Muslim turut membantu. Dan sebaliknya saat pembangunan masjid, umat Kristen ikut membantu hingga selesai,” kepala desa itu memungkasi penjelasan seputar toleransi antarumat beragama di desanya.

JINDAHNYA TOLERANSI, KASIDAHAN BUKA PESTA PADUAN SUARA GEREJA

Warga Alor, Nusa Tenggara Timur, bukan hanya berteori soal menjunjung toleransi antar-umat beragama. Di Jazirah Kabola, Alor, NTT, warga Muslim bahkan membuka acara Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesperawi) yang diikuti seluruh kecamatan di Kabupaten Alor.

Kaum Muslim memeriahkan acara dengan menampilkan grup kasidahan dari Majid Kadelang. Bahkan, hampir semua kontingen yang datang pada ajang yang berlangsung sejak Rabu 9 November 2016 itu diketuai oleh warga yang beragama Islam.

“Hampir semua ketua kontingen beragama Islam. Gema kerukunan telah dimulai dari Alor. Saya sangat terharu dengan kerukunan yang terjalin saat ini. Hal ini sangat berharga dalam sejarah,” ujar Deny Padabang, Ketua Panitia Pesparawi Kabupaten Alor, kepada **Liputan6.com**.

Bupati Alor Amon Djobo mengatakan, kerukunan antarumat beragama di Alor terjalin dari awal masuknya agama Islam dan Kristen di Alor dan masih dijaga hingga saat ini. Hal itu menunjukkan bahwa Alor memang benar-benar surga di Indonesia timur.

“Di tempat lain, suku, agama dan ras dipakai sebagai alasan untuk saling berperang, tetapi di Alor tidak. Justru, perbedaan dijadikan kekayaan untuk membangun Kabupaten Alor,” ujar Amon.

ADEM, GRUP KASIDAH TAMPIL DI GEREJA LEMBATA NTT

Toleransi antarumat beragama di Nusa Tenggara Timur layak menjadi contoh. Umat Islam turut terlibat dalam acara keagamaan Nasrani di Lembata, NTT, di tengah gejolak sentimen keagamaan di Indonesia.

Momen keren ini terjadi pada Selasa, 4 Oktober 2016. Saat itu, tampil grup kasidah, kelompok musik yang biasa membawakan lagu rohani Islam, dalam perayaan iman Katolik, yakni Penerimaan Sakramen Penguatan oleh Uskup Larantuka Mgr Frans Kopong Kung, Pr di Gereja Paroki Kristus Raja Wangatoa Lembata.

Dalam acara itu, grup kasidah dan sejumlah tokoh Muslim serta Gereja Bethel Wangatoa (Protestan) hadir meramaikan perayaan itu. Sedikitnya dua acara berupa lagu dan tarian kasidah yang dibawakan oleh sekitar 11 grup kasidah

dari grup kasidah Masjid Nurul Salam Wangatoa-Lembata-NTT, memberi warna tersendiri.

Sebelumnya, pada Sabtu, 1 Oktober 2016 sebelum puncak perayaan, tokoh agama Islam mengambil bagian dalam prosesi penjemputan Uskup Kopong Kung. Hajah Manzur yang didampingi Haji Manzur Masan Purab selaku alim ulama mengalungkan selendang kepada uskup.

Gereja Katolik menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan beragama. Karena itu, hidup dalam kebersamaan dan saling toleransi dengan sesama umat agama lain adalah *spirit* dalam hukum cinta kasih," ujar Uskup Mgr Fransiskus Kopong Kung, Pr, kepada Liputan6.com, Selasa, 4 Oktober 2016.

Uskup mengatakan, sebagai umat beragama hendaklah saling menghargai meski memiliki iman yang berbeda.

"Kehadiran saudara kita umat Muslim dalam kegiatan ini merupakan wujud penghargaan sebagai umat beragama meski dengan perbedaan keyakinan," kata Uskup.

GUS NIZAM MASUK GEREJA:
**KITA DIPERINTAH BERGAUL
DENGAN SIAPA SAJA
DENGAN PERGAULAN YANG
BAIK¹**

PIPIT MAULIDIYA

Duduk sendiri di baris kursi belakang acara pagelaran wayang kulit bertema “*Dalam Kasih Membangun Persaudaraan*”, Sumini seorang yang lanjut usia tampak tak sabar menyaksikan acara peringatan 17 Agustus itu.

Pandangannya mengarah ke panggung megah di lapangan parkir Gereja Katolik Redemptor, Jalan Dukuh Kupang Barat I Nomor 7 Surabaya, Sabtu (27/8/2016) malam. Perempuan 62 tahun ini menunggu sang dalang, beserta penabuh memainkan alunan musik tradisional.

Selain Sumini masih ada ratusan orang lainnya yang terdiri dari warga RW 3 Dukuh Kupang, RW 8 Dukuh Kupang, dan RW 3 Dukuh Pakis Surabaya, tak sabar menyaksikan pertunjukan wayangan. “Keburu ngantuk,” celetuk Sumini lalu tertawa kecil.

Sumini tak bisa menyembunyikan kegembiraan yang terpancar di wajahnya. Ia terus menebar senyum sapa kepada

1 Karya ini telah diterbitkan di *www.surya.co.id*, 28 Agustus 2016

warga yang baru datang, dan menempati kursi. Meski harus menonton wayang sendiri karena suaminya masih bertugas di gereja, ia tak merasa sedih.

Banyak tetangga di kanan dan kirinya yang berbaur jadi satu di baris kursi penonton. «Saya senang ada ramai-ramai begini. Apalagi panitia mengundang para pemuka agama, kami jadi merasa dapat berkah atas doa-doa mereka,” ia menambahkan dengan tersenyum sambil menoleh ke arah tetangganya yang berkerudung, meminta persetujuan.

Sesaat kemudian nama pemuka agama dipanggil untuk memberikan doa, sebelum acara wayangan dimulai. Satu per satu, pemuka agama Islam, KH Mohammad Nizam As-Shofa, pemuka agama Kristen, Pendeta Simon Filantrofa, pemuka agama Katolik, RD Fanny S Hure, pemuka agama Hindu, Pinandito I Wayan Suraba MpDh (Ketua Umum Majelis Tertinggi Agama Hindu Kota Surabaya), pemuka agama Kong Hu Cu, Js Anuraga, pemuka agama Budha, Romo Abaya dan penghayat kepercayaan kepada Tuhan, Ny Mamik Djaka Wahyudi.

Mereka membacakan doa sesuai keyakinan. hadirin dari Muslim, Nasrani, Kong Hu Cu, dan Hindu berdiri ikut mengangkat tangan mengamini doa para pemuka agama.

Kekompakan warga sekitar Gereja Katolik Redemptor juga patut diacungi jempol. Ini lantaran mereka yang beragam kepercayaan, namun tetap guyup dalam meramalkan acara peringatan hari kemerdekaan Indonesia. “Kami memperingati 17 Agustus dengan cara seperti ini. Membangun kekeluargaan dan persaudaraan. Artinya kita tidak mampu berdiri sendiri. Terlebih saat ini gencar pemberitaan teroris, mereka musuh kita bersama karena berusaha memecahkan kesatuan kita,” kata Ketua panitia acara, Kol (Purn) Theodorus Warman saat

ditemui SURYA.co.id.

KH M Nizam As Shofa (Gus Nizam) atau yang sering dikenal sebagai pencipta Syi'ir Tanpo Waton, ikut membenarkan hal itu. Bersama 23 anggota Walima (Waktunya Peduli Sesama) bentukannya, Gus Nizam hadir hingga rangkaian acara selesai. Bahkan Gus Nizam sempat mengikuti acara Misa di gereja dan memberikan sedikit wejangan kepada para jamaah.

Ia sempat menceritakan perihal pelantun Syi'ir Tanpa Waton karyanya, yang dikira suara almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur), oleh kebanyakan orang. "Banyak orang masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya dan sekitarnya menganggap bahwa itu suara Gus Dur. Mudah-mudahan anggapan banyak orang itu menjadi doa bagi saya, bisa melanjutkan harapan, cita-cita, dan perjuangan guru kita Gus Dur tercinta," katanya di hadapan para jamaah, istri dan anggota Walima (Waktunya Peduli Sesama) yang juga duduk tertib di dalam gereja.

Nizam menuturkan saat dipersilakan memberikan wejangan di gereja, dirinya menyampaikan ajakan menjaga perdamaian. Sesuai perintah Allah pada surat Al Baqarah. "Telah disebutkan, sesungguhnya orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang Tabi'in (dari Bahasa Arab yang berarti pengikut, orang-orang yang hidup setelah zaman Nabi Muhammad). Mereka itu adalah orang yang beriman di hari akhir. Dari ayat ini kita diperintah menjalin ukhwh persaudaraan seiman antaragama Samawi," katanya usai acara.

Nizam melanjutkan, kedatangannya ke gereja adalah bagian dari upaya menyadarkan umat, khususnya bagi jemaah As Shofa di Wonoayu, Sidoarjo, yang dipimpinnya. Katanya, wawasan keislaman sesungguhnya adalah antikekerasan, antiteroris. "Dalam Agama Islam, kita diperintah mempergauli

siap saja dengan pergaulan yang baik," katanya dengan nada tegas.

Vinsensius Awey, jemaat gereja yang juga anggota Komisi C DPRD Surabaya, memberikan sedikit wejangan pihak Kevikepn Surabaya Barat untuk saling percaya dan saling cinta sesama manusia. "Perayaan ini mengingatkan kita kembali bahwa kemerdekaan itu diraih bukan karena kesamaan agama dan suku, tapi kesamaan cita-cita," ujarnya.

MASJID, GEREJA DAN PURA BERDAMPINGAN
DI MOPUYA

TAK MASALAH SAAT JAM IBADAH BERTEPATAN¹

FINNEKE WOLAJAN

Lantunan azan menggema, lonceng gereja berbunyi dan sesekali bau dupa dari halaman pura tercium. Desa Mopuya Selatan, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, membawa pesan damai di tengah kemajemukan.

Gereja GMIBM Immanuel, Masjid Al Mihajirin dan Pura Puseh berdiri berdampingan di sudut desa terpencil di Sulawesi Utara ini. Gereja yang tepat berada di sudut, diapit oleh masjid di samping kanan dan pura di belakangnya.

Mata Pendeta Remmy Tololiu Kapahang (47) berbinar ketika bercerita bagaimana jemaatnya hidup damai dengan warga Muslim maupun Hindu. Tak pernah ada gesekan soal keyakinan masing-masing. Dalam ucapannya, ada senyum semringah yang menghias di wajahnya. "Di sini luar biasa," ucap wanita yang sudah hampir genap lima tahun melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat GMIBM Immanuel Mopuya.

Perbincangan singkat dengan Tribun Manado, Sabtu (10/12) itu terjadi di samping gereja. Tepatnya di garasi mobil

¹ Karya ini telah diterbitkan di www.tribunmanado.co.id, 12 Desember 2016

konsistori atau rumah pendeta. Toleransi di desa ini sangat tinggi menurutnya. Saling menghargai, saling menghormati begitu melekat pada tiap warga. Bahkan ketika jam ibadah bersamaan, itu bukan menjadi masalah bagi siapapun.

“Misalnya kami ibadah, lalu azan berbunyi itu sudah biasa. Tak saling mengganggu. Kalau di pura, mereka memang tak sering ibadah. Paling hanya hari-hari raya besar. Kalau dari pura, paling hanya bau dupa yang tercium,” ucap Remmy.

Seperti waktu-waktu menyambul natal seperti sekarang ini. Gereja biasanya memasang lagu-lagu natal di toa. Namun ketika azan berbunyi, seketika toa tersebut diberhentikan sementara. “Kalau sudah baru kami lanjutkan. Pun dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi kami sudah tahu kapan waktu-waktu mereka salat lima waktu,” ucapnya.

“Bahkan sering, azan berbunyi, kami pun melantunkan puji-pujian. Di pura mereka sedang ibadah juga. Semua bertepatan. Mungkin saat itu Tuhan bingung mau dengar ibadah yang mana dulu,” ucapnya bercanda lalu tertawa.***

SELALU INGATKAN ANAK-CUCU PELIHARA KEMAJEMUKAN KUNCI KERUKUNAN DI DESA MOPUYA

Kerukunan di Desa Mopuya Selatan, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow ini menggugah hati Remmy. Kerukunan yang selalu menyentuh nuraninya.

Momen yang takkan Remmy lupakan adalah di mana para tokoh agama berdoa bersama untuk bangsa dan negara. Momen ketika desa Mopuya Raya merayakan ulang tahun. “September tiap tahunnya. Saya selalu diundang. Kami pun tokoh agama Kristen, Muslim dan Hindu berdoa bersama di

momen itu. Saya terharu. Betapa indahny kemajemukan itu," ujarnya.

Toleransi ini adalah tugas semua pihak. Namun Remmy sebagai tokoh agama punya tanggung jawab lebih besar untuk itu. Pesan damai selalu menyelinap di tiap kesempatan. "Selalu ingatkan pelihara kemajemukan ini. Kebersamaan, kekeluargaan, toleransi. Pupuk terus. Kasi tahu ke jemaat wariskan ke anak cucu," ucapnya.

Muhammad Nuri (50), Imam Masjid Al Mihajirin juga tampak semringah, mengungkap bagaimana jemaahnya hidup dengan warga Kristen dan Hindu. "Kami tak saling ganggu. Tak ada kendala sama sekali," ucapnya dengan senyum tipis di bibirnya.

Perbincangan dengan Tribun dilakukan di rumahnya yang berada di samping masjid, di hari yang sama. Nuri yang sudah 13 tahun menjadi imam masjid ini menceritakan, ketika ada hari raya Idul Fitri, warga Kristen maupun Hindu sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Bahkan turut meramaikan perayaan tersebut. "Malah mereka sama-sama ikut malam takbiran. Kalau acara natal diundang juga ikut perayaan. Atau acara saudara-saudara dari hindu," ucapnya.

Ibadah yang bertepatan pun tak jarang. Salat di masjid, ibadah di gereja, dan sembahyang di pura. "Di sini azan, di gereja bernyanyi, di pura mereka memainkan alat musik dan memasang dupa. Tak masalah, itu sudah biasa dan kami saling mengerti," ujarnya.

Di tiap kesempatan, Nuri selalu menyelinapkan pesan damai itu. Untuk lestari hingga seterusnya. "Selalu diingkatkan. Jangan sampai ada gesekan. Jaga kerukunan, wariskan pada anak dan cucu kita nanti," ungkapnya.

Nuri senang, jemaahnya makin giat ibadah, dibanding

tahun-tahun sebelumnya. Tingginya toleransi ini ternyata memotivasi ia dan jemaahnya untuk lebih bertaqwa. “Jadi motivasi kami untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk kebaikan bersama,” ucapnya disertai senyum.

Bolmong memang merupakan daerah transmigrasi pada zaman orde baru. Warga dengan suku berbeda rela pindah berkilo-kilo meter dari tempat asal untuk mengadu nasib di daerah yang telah disediakan pemerintah ini. Warga Minahasa yang memeluk Kristen, Jawa yang memeluk Islam dan Bali yang memeluk Hindu berkumpul di tempat ini.

PLURALISME DAN KEMAKMURAN DI MOPUYA

Desa Mopuya Selatan, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondowg memiliki luas kurang lebih 32.11 kilometer persegi ini pernah menjadi proyek percontohan atau model toleransi dan pluralisme agama bagi masyarakat internasional.

Dari catatan Humas Pemkab Bolmong, Selasa 14 Juni 2011 lalu, mengungkapkan penelusuran yang dilakukan pada berbagai sumber di Dumoga Bersatu yang terdiri dari Dumoga Timur, Dumoga Barat, dan Dumoga Utara, tentang sejarah berdirinya enam rumah ibadah di desa ini.

Berawal ketika bulan September 1972, sekitar 100 Kepala Keluarga dari Bojonegoro dan Banyuwangi di Jawa Timur berangkat menuju Pelabuhan Inobonto, Bolmong dengan kapal laut.

Mereka adalah para transmigran yang akan ditempatkan di Desa Mopuya Selatan, Kecamatan Dumoga Utara.

Daerah baru ini masih hutan belantara, namun pemerintah telah menyiapkan rumah-rumah dengan tipe rumah sangat sederhana untuk mereka. Untuk mencukupi kebutuhan

sehari-hari, mereka bercocok tanam jagung dan kedelai.

Selain orang Jawa, di Mopuya juga terdapat orang Bali. Warga Bali ini mulai banyak ke luar dari daerahnya setelah meletusnya Gunung Agung pada tahun 1963. Di Dumoga, mereka tersebar di beberapa desa, termasuk Mopuya. Kala itu, jumlah transmigran 1.549 jiwa atau 349 KK dan ditempatkan di Desa Werdhi Agung.

Para transmigran berikutnya ditempatkan di Desa Kembang Mertha (1964), Mopuya (1972/1975), Mopugad (1973/1975), Tumokang (1971/1972), Sangkub (1981/1982), Onggunoi (1983/1984), Torosik (1983/1984), dan Pusian/Serasi (1992/1993). Seiring berjalannya waktu, lalu muncul ide dari pemerintah membangun rumah ibadah untuk semua agama yang ada.

Dan pada tahun 1973, mulailah membangun tempat ibadah tersebut. Masing-masing agama mendapat 2.500 meter persegi. Untuk umat Islam ditambah 2.500 meter persegi lagi untuk membangun madrasah. Jadilah enam rumah ibadah yakni Masjid Al Muhajirin, Gereja Masehi Injili Bolaang Mongondow anggota PGI Jemaat Immanuel Mopuya, Pura Puseh Umat Hindu.

Serta Gereja KGPM Sidang Kalvari Mopuya, Gereja Katolik Santo Yusuf Mopuya, dan Gereja Pantekosta yang letaknya tak sedekat tiga rumah ibadah tersebut.

Mopuya pun melejit menjadi lambang kemakmuran petani. Patung petani yang berada tepat di tengah-tengah desa, menandai kemakmuran tersebut. Desa ini menjadi lumbung beras. Hasil panen dari desa-desa sekitarnya singgah sebelum diangkut ke kota. Meski hanya kampung, Mopuya berperan seperti kota kecil, lengkap dengan pasar dan kantor kecamatan.

Seperti pantauan *Tribun* sore itu. Waktu menunjukkan

pukul 16.00 Wita. Warga yang menggunakan tolu dan boots, serta baju yang terlihat berbecek mondar-mandir di jalan desa. Baik mereka yang naik mobil bak terbuka atau pun dengan sepeda motor. Itu rupanya waktunya para petani pulang bersawah. Sejauh mata memandang, sawah memang terlihat di Mopuya.

Masyarakat terus membertahankan simbol pluralisme nan unik di Mopuya Selatan ini. Semua pihak mulai dari anak-anak hingga orang dewasa telah diajarkan untuk hidup damai tanpa memandang perbedaan. Memberi pesan damai bagi tiap orang yang melihatnya. Pesan damai dari Mopuya untuk Indonesia.

DI BALIK MERAHNYA GINCU BIBIR WARIA¹

DYAH AYU PITALOKA

Hanya sekitar 20 persen waria di Malang yang bisa duduk di bangku SMA. Mereka mengaku lebih dihargai jika bisa mencari uang sendiri dan tak bergantung kepada keluarga

Yuri Firnanda petang itu sedang bersiap untuk bekerja. Rambut hitamnya dibiarkan tergerai sebahu, wajahnya dipoles bedak dengan warna cerah, sepadan dengan lipstik warna merah muda.

Jika tidak sedang ikut bermain ludruk, malam-malam Yuri akan dipenuhi dengan kegiatan mangkal, mencari pelanggan dengan menjual jasa sebagai pekerja seks di Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Mungkin saja Yuri kini akan berakhir di dalam kelas, mengajar teater atau pengetahuan lain sebagai guru. Siapa tahu jalan hidupnya akan berbeda jika ia cukup beruntung mengenyam pendidikan lebih tinggi dan tak sibuk bekerja setamat Sekolah Menengah Kejuruan.

Setidaknya ada 438 waria di wilayah Malang Raya, dan hanya sekitar 20 persen di antaranya beruntung bisa belajar

¹ Karya ini telah diterbitkan di www.rappler.com, 25 Maret 2016

hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan setaranya. Sebagian besar terpaksa berhenti di jenjang SD atau SMP dan menghidupi dirinya sebagai pekerja seks.

“Cita-cita saya dulu jadi guru, saya suka mengajar. Waktu SMK, saya sempat mengajar teater beberapa bulan di salah satu SMP di Wagir. Kemudian berhenti karena di SMK banyak praktikum yang tidak bisa ditinggalkan,” kata Yuri kepada Rappler, pada Rabu, 16 Maret.

Namun nasib berkata lain. Sejak 2006, wanita pria (waria) berusia 31 tahun itu menghidupi diri sebagai pekerja seks. Nasibnya lebih baik saat bulan besar tiba. Ketika banyak orang punya hajat, Yuri bisa ikut menari dan bermain ludruk keliling mengikuti pesanan empunya hajat.

“Sebenarnya dulu saya ingin kuliah, tapi saya harus bekerja dan keluarga juga tidak ada uang,” katanya, seraya asap rokok mengepul dari bibirnya petang itu.

Hanya sedikit waria yang lulus SMA

Organisasi Waria Malang Raya Peduli AIDS (Wamarapa) mencatat ada 438 waria di Malang Raya sepanjang 2015.

Sekitar 50 persen di antara mereka lulusan SMP, dan hanya 20 persen lulus SMA. Sisanya adalah mereka yang tamat SD atau putus sekolah di SMP. Nyaris tak ada waria yang berijazah sarjana di Malang.

“Salah satu penyebab putus sekolah, ya bekerja. Waria lebih dihargai keluarga kalau tidak merepotkan dan sudah bisa cari uang. Akhirnya kalau sudah bekerja dan cari uang, mereka malas sekolah,” kata Yuri yang juga menjadi pendamping Wamarapa wilayah Kepanjen dan Gondanglegi.

“Waria sering kesulitan mencari pengakuan dan penerimaan dari keluarga terdekat. Yuri muda mencari uang saku tambahan dengan bekerja sebagai penyiar di radio komunitas di sekitar kediamannya.”

Jaringan yang bertambah membawanya berkenalan dengan seorang waria yang sering ikut ludruk dan dunia malam. Dari uang yang didapat, dia bisa membuktikan dirinya bermanfaat dan tidak merepotkan orangtuanya.

“Saya bilang ke bapak saya, saya bisa cari uang sendiri dan semoga tidak lagi meminta uang. Bapak menjawab, yang penting jangan membuat jelek nama orang tua. Jawaban itu sudah membuat saya lega menjalani hidup sebagai waria,” akunya. Orangtuanya memberikan nama Sugeng Warso Enggal pada Yuri di hari lahirnya, 31 tahun lalu.

Ketua Wamarapa Yoko Dharmawan menyebutkan ada beberapa penyebab waria memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dari hasil penggalian masalah yang dilakukan lewat beberapa kelompok pendampingan Wamarapa, kasus *bullying* atau perisakan di lingkungan keluarga dan sekolah menjadi salah satu penyebab dominan, diikuti penolakan dari keluarga serta faktor ekonomi keluarga.

Sebagian besar waria enggan melanjutkan pendidikan formal karena trauma akibat perisakan di masa remaja mereka. “Dari program Kelompok Dampingan Sebaya (KDS) tahun 2012-2014, sembilan puluh persen waria di-*bully* di usia remaja. Bentuknya verbal hingga kekerasan seksual. Pengalaman seks mereka sebagian besar di bawah usia 15 tahun,” kata Yoko yang juga dikenal dengan nama Tan Kwee Tjhien itu.

Perisakan dilakukan keluarga terdekat, teman di sekolah, pondok pesantren, hingga oknum guru kelas. Seorang waria di Kabupaten Malang mengaku diminta untuk mengulum

kemaluan guru laki-lakinya sebagai hukuman karena lemah dalam mata pelajaran olahraga.

Program KDS berlangsung selama dua tahun dan mendapat dana dari lembaga donor United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). Namun program ini kini sudah berhenti dan sekarang Wamarapa tak ada aktivitas pemberdayaan apapun.

“Di kelas pendampingan ada waria mengatakan trauma dengan guru SMP-nya karena pernah diminta mengoral,” kata Yoko yang juga pernah dilecehkan oleh saudara dan teman sepermainannya itu.

Kondisi itu kemudian diperparah tanpa adanya dukungan dan motivasi dari keluarga. “Dia kemudian putus sekolah karena trauma, takut ketemu gurunya. Keluarga juga banyak yang menyalahkan dan tidak mengakui kalau anaknya banci atau waria,” katanya.

Masa kecil waria, ujar Yoko, banyak terpojokkan ketika mendapat perlakuan perisakan di sekolah. Seperti halnya korban pelecehan seksual anak-anak pada umumnya, mereka ketakutan dan tak berani melaporkan hingga sering ditemukan dalam kondisi terlambat.

Pada kasus ringan, guru lebih banyak menyalahkan perisakan pada perilaku korban daripada memberikan sanksi pada perisak. Seperti juga orangtua yang menghukum anak laki-lakinya karena sering bermain dengan baju perempuan dan alat *make-up*.

“Hasil pendampingan kami mendapati bahwa guru sering menyalahkan perilaku waria yang kemayu, lembek, dan berbeda. Kebanyakan lemah dalam olahraga tapi lebih unggul dalam kemampuan lain,” ungkap Yoko.

90 PERSEN WARIA ADALAH KORBAN PELECEHAN

Trauma di masa kecil membekas lama di benak waria. Ejekan banci dan stigma negatif lain membuat mereka enggan pergi ke sekolah. Data dari survei Wamarapa menyatakan bahwa 90 persen waria di Malang Raya mengalami kekerasan seksual di usia remaja.

Kondisi sosial dan lingkungan serta ketidaktahuan tentang identitas diri menyebabkan waria tidak percaya diri dan lemah. Kemauan untuk sekolah pun berkurang karena waria lebih nyaman berkumpul di lingkungan yang menerima kondisi mereka, sebagian besar di kelompok pekerja seks.

Tak ada motivasi dari keluarga juga membuat waria tak banyak memikirkan pendidikan dan masa depan. “Stigma negatif membuat saya merasa saya ini salah dan semua kekerasan seksual yang menimpa saya saat kecil adalah balasan dan dosa yang harus diterima,” kata Yoko.

“Saya bahkan bertahun-tahun hidup dalam kebingungan itu, sebelum berani menerima kenyataan dan menjadi diri sendiri,” ujarnya. Lewat jalan yang berliku, pemegang gelar Putri Waria Jawa Timur 2001 itu baru terbuka menerima dirinya sebagai waria di usia 30 tahun.

GURU BERKAWAN SISWA

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2) Kabupaten Malang mendapati ada kecenderungan baik pelaku dan korban perisakan takut pada guru mereka, termasuk guru Bimbingan dan Konseling (BK).

Lewat program *Problem Solving* antara 2013 hingga 2015, P2TP2 mendampingi ratusan anak-anak pelaku dan korban perisakan dari puluhan SMP di Kabupaten Malang, termasuk anak yang terlibat masalah kenakalan dengan sekolah.

“Dalam kegiatan itu anak harus mengetahui masalah mereka dan cara mengatasi masalah itu. Dalam sesi tanya jawab sering mereka tak mau terbuka jika ada guru mereka di dalam kelas. Kalau ada gurunya mereka merasa tidak nyaman, guru kami minta menunggu di luar kelas,” kata Umi Khorirotin Nasihah, Konselor P2TP2 Kabupaten Malang.

Guru pun disebut sebagai salah satu pihak yang ditakuti dan dibenci pelajar yang membutuhkan perhatian khusus.

“Guru BK seharusnya bisa memosisikan diri sebagai teman, bukan ikut memberi sanksi. Anak-anak jadi takut kepada mereka,” kata Umi.

P2TP2 mencatat ada 44 kasus kekerasan baru pada anak-anak sepanjang 2015. Satu di antaranya dialami oleh anak laki-laki yang mengalami kekerasan seksual dari orangtuanya sendiri.

“Bapaknya berperilaku menyimpang, dan menyodomi anaknya, dia masih SD,” kata Umi. Anak itu kini hidup bersama ibunya, sementara sang bapak tak tersentuh hukum lantaran kasus berakhir damai.

“Waria mengalami pemiskinan sejak dari bangku sekolah. Semua stigma negatif, kekerasan seksual yang dialami saat masa sekolah, membuat mereka trauma dan menjauhi sekolah dan pendidikan.”

Sementara itu, Kabupaten Malang berbenah untuk menjadi Kabupaten Layak Anak dengan mewujudkan sekolah ramah anak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Budi Iswoyo menyebut peran guru BK besar dalam mewujudkan sekolah ramah anak.

Terdapat setidaknya satu guru BK di masing-masing di

1.167 Sekolah Dasar, 322 di Sekolah Menengah Pertama, dan 112 di Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan. Mandat itu jadi dampak wajib setelah pemerintah setempat menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang No. 11 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak.

Dalam pasalnya, perda itu menegaskan sekolah wajib memberikan kesempatan pada anak-anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi. Posisi pelajar dengan berbagai perangai dan kemampuan akademisnya tak berbeda satu dengan yang lain.

Ada anggaran sebesar Rp500 juta di tahun ini, yang diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru serta kelengkapan fasilitas permainan edukasi untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Anak berkecendrungan waria itu kedudukannya sama dengan anak difabel, berkebutuhan khusus. Mereka punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan seperti anak lain,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Budi Iswoyo.

Guru dengan kompetensi khusus bertugas mendampingi siswa. Mereka berkewajiban mencari tahu tentang tindak kekerasan seksual dan diskriminasi pada siswanya, jika ada. Namun Budi mengaku selama ini tidak ada laporan tentang diskriminasi dan juga kekerasan seksual yang dilakukan guru pada siswa manapun, termasuk yang berkecenderungan waria.

“Selama ini belum ada laporan tentang itu, jika ada dugaan itu, seharusnya tugas BK untuk mencari tahu dan mengatasinya,” katanya.

Menurutnya, guru ditakuti siswa bukan karena guru yang galak dan tak bisa menjadi teman, tetapi karena siswa takut

akibat kesalahan yang telah diperbuat. “Mereka takut pada guru, ya karena bersalah itu, jadi takut dan segan,” ujarnya.

WARIA SARJANA MAMPU BERBUAT BANYAK

Dari ratusan waria di Malang, nama Merlyn Sopjan dikenal luas. Artikel tentang Merlyn bahkan sempat keluar di laman *The New York Times*. Ketika itu, Merlyn mencoba ikut menjadi peserta Pemilihan Wali Kota Malang pada 2003.

Di Pilkada langsung yang pertama itu, Merlyn yang maju lewat jalur independen gagal pada tahap pendaftaran. Dia datang lima menit terlambat dari jadwal menyerahkan formulir.

Di tahun berikutnya, waria kelahiran Kediri 43 tahun lalu itu kembali mencoba terjun ke politik dengan mengikuti bursa pemilihan legislatif. Melenggang lewat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Merlyn yang meraup pundi suara cukup banyak, tak berhak duduk di DPRD Kota Malang saat itu.

“Saya berada di peringkat kedua calon dengan peraih suara terbanyak, tetapi yang berhak duduk di DPRD ya calon nomor urut satu. Saat itu motivasi saya hanya satu, menegaskan bahwa hak dan kewajiban waria tak berbeda dengan warga lain,” kata Merlyn.

Waria bernama lahir Ario Pamungkas itu bisa berkompetisi di dunia politik setelah menyelesaikan pendidikan sarjana dari Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. Prestasinya tak berhenti di situ, pada 2006 Merlyn menjuarai kontes Putri Waria Indonesia.

Kini pemilik rambut ikal sebahu itu dipercaya sebagai Project Officer di Program Peduli milik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

di Jakarta sejak 2014 hingga akhir tahun ini. Di sana, mantan Ketua Ikatan Waria Malang (Iwama) yang juga penulis beberapa buku itu dipercaya membawakan program besar, memberdayakan masyarakat marjinal di Nusantara.

Seerti kelompok minoritas lainnya, waria juga rentan diskriminasi. “Dari sini semakin terlihat, waria mengalami pemiskinan sejak dari bangku sekolah, semua stigma negatif, kekerasan seksual yang dialami saat masa sekolah membuat mereka trauma dan menjauhi sekolah dan pendidikan,” kata Merlyn.

“Akibatnya, pendidikan mereka rendah dan tak bisa berkompetisi dalam pekerjaan,” ujarnya.

Merlyn beruntung, orangtuanya mau menerima kondisinya dan memberikan akses pada pendidikan layak.

TENTANG SAPI DAN FAJAR PAGI

Kamis dini hari, 17 Maret, Maya menepuk tangan di udara dengan keras, sambil memanggil seorang pria yang sedang melintas di sebuah jalan di Kota Malang. Mencari perhatian agar pengendara motor itu meliriknya, atau bahkan berhenti untuk bertransaksi.

Hidung dan dagunya berlekuk lancip, hasil suntik silikon beberapa tahun silam. Ada aroma melati menyeruak segar dari tubuhnya. Maya setia menunggu pelanggannya setiap pukul 01:00 dini hari hingga subuh tiba.

Katanya, waria lebih aman dari operasi petugas jika keluar dini hari. Sama seperti banyak waria lain di Malang, waria yang pandai menari jathilan dalam kelompok reog itu putus sekolah di tahun pertama SMP.

Masa kecilnya diwarnai dengan pukulan dan tendangan dari orang tua yang tak suka ketika Maya berulah mengenakan

baju perempuan. Hukumannya terhenti ketika ia keluar dari bangku SMP untuk mengikuti kakaknya bekerja di Lampung.

Saat ini, bagi waria berusia 37 tahun itu, hidup cukup sederhana jika ada sepasang sapi di kandang dan seorang keponakan yang mau menerima dirinya di masa tua.

“Ayahku veteran pejuang ’45, sekolahku putus kelas satu SMP di Wonokerto, Bantur (Kabupaten Malang). Sekarang aku punya sapi sejedoh (jantan dan betina) dirawat keponakan, nanti kalau sudah tua biar sapiku diambil ponakan yang mau merawatku,” ucap Maya.

Dia mengaku bahagia jika ayahnya kini mau menyapanya dengan panggilan Maya ketika ia pulang ke rumah. Di akhir percakapan dengan *Rappler*, Maya kemudian pamit dan berjalan menjauh, mendekati ruas jalan dengan penerangan yang cukup. Melanjutkan pekerjaannya sejak 19 tahun terakhir, dan mengakhirinya saat adzan Subuh berkumandang.

MENJAGA KEBINEKAAN KOTA BATU DENGAN TRADISI ANJANGSANA¹

MISKI SINAU

Rumah Mianto berubah ramai oleh kedatangan banyak warga. Satu per satu warga menyalami Mianto beserta istri dan anaknya seraya mengucapkan selamat merayakan Natal. Keluarga Mianto menetap di RW 06 Dusun Ngandat Kidul, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur.

Obrolan tuan rumah dan para tetamu berlangsung ringan dan gayeng. Tuan rumah menyuguhkan camilan keripik tempe, jenang, kacang, dan kerupuk, serta buah pisang, salak, dan apel di meja. Beberapa warga berfoto di dekat replika pohon Natal setinggi 1,5 meter yang berada di pojok ruang tamu.

Tamu datang silih berganti. Mianto terlihat sangat bergembira saat melepas tamu yang pulang dan sekaligus menyambut tamu yang datang. Warga yang datang bukan cuma pemeluk Kristen, tapi juga beragama Islam dan Budha. Tamu-tamunya pun tidak hanya dari Ngandat Kidul, tapi juga kerabat dan teman yang bekerja dan atau menetap di daerah lain.

1 Karya ini telah diterbitkan di www.malangvoice.com, 26 Desember 2016

“Warga Ngandat Kidul hari rayanya tiga kali dalam setahun, Mas, yaitu Idul Fitri, Natal, dan Waisak,” kata Mianto kepada *MVoice*, Minggu (25/12/2016), malam.

Menurut Mianto, tradisi anjangsana antarumat agama di Ngandat Kidul sudah berlangsung puluhan tahun. Apabila umat Budha merayakan Hari Raya Waisak, umat Kristen dan Muslim mengunjungi warga pemeluk Budha. Saat umat Islam merayakan Idul Fitri, warga beragama Kristen dan Budha pun mendatangi rumah warga Muslim.

Kegiatan anjangsana biasanya dimulai pukul 17.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB. Warga yang suka jagongan malah suka berkunjung di atas pukul 21.00 WIB dan mereka bisa ngobrol sampai pukul 01.00 dini hari. Suasana percakapan lebih seru karena pertemuan di hari raya agama sangat spesial, cuma terjadi setahun sekali.

Guru Agama Kristen di Sekolah Dasar Negeri 1 Ngaglik itu pertama kali masuk Dusun Ngandat Kidul pada 1981. Istrinya asli warga Ngandat Kidul, sedangkan dia pendatang dari Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.

Seingat dan setahu Mianto, tradisi anjangsana belum semeriah seperti sekarang. Tradisi saling kunjung-mengunjungi masih sebatas dilakukan tetangga dan kerabat dalam satu kampung. Suasana anjangsana kian meriah seperti sekarang sejak 2000.

Sebagai pendatang tentu dia harus bisa menyesuaikan diri dengan tradisi anjangsana tersebut. Begitu pula yang dilakukan warga pendatang lainnya. Perbedaan agama tidak menjadi sekat pembatas pergaulan sosial. Kebinekaan justru menjadi sumber kebersamaan dan kekeluargaan.

Hal itu dibuktikan, misalnya, dengan dibentuknya perkumpulan kematian. Pengurusnya berasal dari tiga agama.

Apabila ada warga yang meninggal dunia, maka warga bersama-sama menyiapkan segala keperluan pemakaman. Petugas penggali kubur juga campuran dari tiga agama dan mereka mendoakan jenazah warga yang meninggal menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Kekompakan warga juga terlihat di semua aspek kegiatan sosial lainnya, seperti kegiatan bersih desa dan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.

Anggoro, umat Kristen lainnya menguatkan keterangan Mianto. Sebagai orang asli Ngandat Kidul, ia tahu persis kerukunan antarumat beragama di dusunnya dan sejauh ini tidak pernah ada persoalan serius terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kerukunan ini dikuatkan kenyataan banyak rumah tangga yang anggota keluarganya berbeda agama. Dalam keluarga besar Anggoro sendiri ada yang memeluk Islam, Kristen, dan Budha.

Ada sebuah kisah yang dicontohkan Anggoro. Dulu ada warga muslim pendatang dari Surabaya yang enggan mengikuti tradisi beranjangsana di hari raya Kristen dan Budha. Namun, saat warga itu merayakan Idul Fitri, umat Kristen dan Budha tetap saja bertamu ke rumahnya. “Bukan berarti warga yang menolak dan tidak mau (beranjangsana), kami musuhi dan jauhi. Justru kami dekati dan ajak dia hingga akhirnya dia ikut serta,” kata Anggoro.

Gesekan antarwarga di beberapa daerah tidak merusak kerukunan di Dusun Ngandat Kidul. Warga menganggap gesekan tersebut tidak berhubungan dengan agama, melainkan upaya adu domba pihak-pihak yang tak menginginkan kedamaian di Indonesia. “Sekarang bukan zamannya intoleransi. Sudah saatnya ‘Om Toleran Om’,” ujar Anggoro, sambil bercanda, yang disambut gelak tawa para tamu lainnya.

MALU TIDAK RUKUN SESAMA WARGA

Warga pemeluk Budha, Suwono, merasakan tradisi anjangsana menjadikan sesama warga saling menguatkan dan melindungi. Hadirnya warga lain ke rumah warga yang sedang merayakan hari raya menciptakan keguyuban dalam pergaulan sehari-hari.

Menurut Suwono, dalam ajaran Budha, tradisi anjangsana pada hari raya agama disebut *mudita citta*, perasaan gembira tatkala melihat orang lain berbuat baik, yang merupakan empat sifat mulia atau Catur Brahmavihara. “Mengucapkan selamat hari raya jadinya secara langsung. Kalau cuma lewat media spanduk dan lainnya kurang mengena. Bagi warga sini, malu kalau tidak rukun,” kata Suwono.

Suwono melanjutkan, di Ngandat Kidul terdapat sekitar 60 keluarga umat Budha. Tradisi anjangsana dulunya diawali mahasiswa Budha yang menempuh pendidikan di Padepokan Dhammadipa Arama, yang lokasi dekat dengan Ngandat Kidul. Di Padepokan yang beralamat di Jalan Ir Soekarno, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, ini terdapat Vihara Dhammadipa Arama—didirikan pada 1971—dan Sekolah Tinggi Agama Budha (STAB) Kertarajasa.

Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Batu itu menekankan bahwa perbedaan religiusitas dan ajaran agama dalam hidup bermasyarakat merupakan keniscayaan, tapi perbedaan itu tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk saling mengasihi.

“Perbedaan itu,” Suwono menegaskan, “sejatinya harus bisa menjadi perekat persaudaraan dalam kemanusiaan karena tiap agama pasti mengajarkan kemanusiaan dan kemanusiaan itu bersifat universal.”

Kuatnya kerukunan umat beragama di Ngandat Kidul

juga dapat dilihat dari proses pemilihan calon ketua rukun warga (RW). Meski calon yang maju berbeda agama, tapi tidak sampai menimbulkan masalah serius sampai pada gesekan sosial. Ada saja pihak-pihak yang mencoba menghasut, semisal jangan mau di pimpin yang agamanya berbeda dan semacamnya. Tapi beruntung warga tidak terpengaruh. Para tokoh agama dan tokoh masyarakat bersepakat setiap ada masalah semacam itu diselesaikan lewat forum musyawarah dan mufakat.

Hasilnya, Maskud terpilih menjadi ketua RW kendati dia beragama Kristen. Warga tidak melihat agamanya, melainkan komitmen dan kemampuannya memimpin. Contoh lain. Pemerintah Desa Mojorejo berencana menyekat tempat pemakaman umum sehingga nanti ada blok kuburan Islam, Kristen, dan Budha. Namun rencana ini ditolak warga.

“Alasan warga, hidup saja sudah rukun, kenapa meninggal, *kok*, masih dipisah segala dan jadi masalah. Dari dulu kuburannya sudah jadi satu, akhirnya desa urung memblok kuburan tersebut,” kata Suwono.

Menurut Suwono, tradisi anjaksanaan di hari raya bahkan sudah menular ke RW 05 dan RW 08 Desa Mojorejo, misalnya. Ia berharap tradisi semacam itu dapat tercipta di semua wilayah Kota Batu, serta menular hingga ke daerah-daerah lain di Indonesia yang tingkat toleransinya masih rendah.

Begitupun, penyuluh Agama Budha di Kementerian Agama Kota Batu itu merasa pendidikan kebinekaan masih kurang. Pengetahuan Pancasila harusnya diajarkan bukan sebagai hafalan, tapi lebih ditekankan pada penghayatan dan pelaksanaannya sehingga kerukunan dan toleransi tetap terawat dan lestari. Ketua RW 06 Maskud sepaham dengan penjelasan Mianto, Anggoro, dan Suwono.

Maskud menyebutkan, di Ngandat Kidul dihuni sekitar 800 jiwa atau ada 170 keluarga dengan agama berbeda. Mayoritas warga bekerja sebagai sopir angkot dan taksi, wiraswasta, pegawai negeri, karyawan perusahaan, petani dan guru.

Mayoritas warga beragama Islam, lalu Budha, dan Kristen. Bagi umat Islam tersedia satu masjid dan satu musala. Umat Budha beribadah di Vihara Dhammadipa Arama. Sedangkan umat Kristen ikut beribadah di daerah lain.

Dengan demografi seperti itu, kata Maskud, toleransi dan kerukunan umat beragama di Ngandat Kidul sangat kental. "Sekarang tinggal mempertahankannya ke depan, apakah bisa atau tidak. Tapi kami yakin mampu menjaganya," ujar Maskud.

Maskud mengakui masih terdapat kekurangan dalam merajut kerukunan umat beragama di Ngandat Kidul, yakni masih adanya beberapa warga yang belum berkenan turut melestarikan tradisi tersebut. Namun Maskud bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat terus berupaya meyakinkan warga itu.

"Memang masih ada sedikit kekurangan, tapi mungkin kerukunan tiga agama seperti di RW 06 hanya satu-satunya di Batu dan bahkan di Indonesia. Selain saling menghargai, warga juga sudah pintar memilah dan memilih, sehingga tidak gampang terpengaruh isu-isu negatif dari luar," kata Maskud.

MENGAJARKAN KERUKUNAN SEJAK KECIL

Berlangsungnya kerukunan antarumat beragama di Ngandat Kidul tidak lepas dari peran orang tua. Sejak usia sekolah dasar anak-anak Ngandat Kidul sudah diajari dan dikenalkan dengan rasa saling menghormati dan kekeluargaan.

Para orang tua pun memberi contoh konkret dengan

mentradisikan anjansana ke rumah warga yang sedang merayakan hari raya. "Satu minggu sebelum hari raya Kristen dan Budha, anak saya sudah berangan-angan akan datang ke rumah temannya yang beda agama," kata Suntono, seorang warga beragama Islam.

Karena dibiasakan, anak-anak pun menyadari pentingnya kerukunan tanpa harus banyak diceramahi dan diingatkan berkali-kali. Tradisi itu terus berlanjut juga karena kerelaan warga pendatang untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan pergaulan masyarakat.

Atas nama toleransi dan kerukunan pula Suntono tidak menolak mahasiswa Budha ngekos di tempat kos miliknya. Ia menganggap anak kosnya sebagai anak sendiri meski berbeda agama. "Dulu saya masuk kampung sini yang memeluk Islam masih dua orang. Seiring berjalannya waktu pemeluk Islam terus bertambah, tapi tidak sampai ada gesekan. Di sini orang-orangnya nasionalis semua," kata Suntono, 71 tahun.

MASYARAKAT BATU MAJEMUK

Kota Batu dihuni warga beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan penghayat kepercayaan. Pemeluk Islam menjadi warga mayoritas dengan jumlah 199.276 jiwa. Pemeluk Kristen berjumlah 7.463 jiwa, Katolik 3.068 jiwa, Budha 670 jiwa, Hindu 429 jiwa, dan Penghayat Kepercayaan 333 jiwa.

Berdasarkan data 2015 yang dirilis FKUB Kota Batu, masing-masing pemeluk agama bisa beribadah di 166 masjid, 574 musala, 39 gereja, 6 vihara, 4 pura, dan 1 klenteng. Total, terdapat 790 tempat ibadah di Kota Batu.

Ketua FKUB Kota Batu Abdur Rochim alias Rochim mengatakan, masyarakat Batu sangat majemuk. Mayoritas

warga bekerja sebagai petani yang hidup di pedesaan. "Masyarakat petani lebih mudah diatur dan diarahkan. Mereka tidak melihat perbedaan sebagai ancaman, tapi sebagai kekuatan," kata Rochim.

Bukan berarti di Kota Batu nihil kejadian yang bisa memecah belah umat agama. Pada 2007, muncul kasus pelemparan al-Quran oleh seorang pendeta dalam acara penataran dan pelatihan doa bersama umat Kristiani di Hotel Asida.

Saat itu, kata Rochim, umat Islam dari Pasuruan dan Gondanglegi siap berangkat ke Kota Batu. Sedangkan warga muslim Batu menyerahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum. Beruntung tokoh agama dan pemerintah sigap bertindak. Meski sudah meminta maaf, namun kasus tersebut tetap disidang di pengadilan dan sang pendeta dipenjara.

Kasus lain, aksi demonstrasi umat Islam di Kecamatan Junrejo yang menolak rencana pembangunan Panti Asuhan Gereja pada 2009. Warga mensinyalir pembangunan panti hanya kedok dalam upaya penyebaran agama Kristen. "Masih sebatas curiga bahwa ada misi Kristenisasi di balik rencana pembangunan panti. Tapi akhirnya rencana pembangunan gagal dilakukan sehingga tidak muncul konflik di Batu," kata dia.

Terakhir, pada 14 November 2016, Gereja Katolik Gembala Baik mendapat ancaman lewat telepon akan diledakkan. Rochim memastikan, FKUB bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat berusaha meredam keresahan masyarakat dengan menyampaikan bahwa teror terhadap gereja tersebut bukan dilakukan atas nama agama, tapi pihak yang berniat jahat.

Kini, Rochim melalui FKUB mengajak segenap tokoh agama dan masyarakat untuk tiada lelah menyerukan

kerukunan, terutama menjelang pemilihan wali kota Batu, Februari 2017 nanti.

FKUB sudah menyiapkan beberapa poin yang nantinya oleh tokoh-tokoh agama bisa disebarakan ke umatnya masing-masing. Inti dari semua poin itu adalah masyarakat boleh berbeda pilihan calon wali kota, tapi jangan sampai perbedaan pilihan itu menimbulkan gesekan dan konflik. “Proses pemilihan wali kota harus berlangsung jujur, adil, dan damai,” katanya menandaskan.

KELUARGA KEREN, TETAP GUYUB RUKUN WALAU BEDA AGAMA¹

UMMI HADYAH SALEH

Natal tahun ini dia bisa berkumpul dengan kedua orangtuanya, meski sekarang berbeda keyakinan.

Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang muncul pertanyaan begini. Seperti apa kehidupan anggota keluarga yang berbeda agama? Apakah gaduh seperti situasi politik saat ini atau guyub rukun?

Pengalaman sejumlah narasumber yang ditemui *Suara.com* berikut ini rasanya baik untuk direnungkan. Misalnya pengalaman wartawati bernama Yurike (24). Dia memutuskan untuk memeluk Islam pada 4 Desember 2014. Dulu, dia beragama Kristen. “Sekarang karena sudah agak terbuka pikiran. Natal tahun ini lebih enak, lebih tidak tegang. Sekarang orangtua sudah bisa menerima, jadi kita enak ngejalaninnya,” ujar Yurike kepada *Suara.com*, Sabtu (24/12/2016).

Natal tahun ini dia bisa berkumpul dengan kedua orangtuanya, meski sekarang berbeda keyakinan. Gabriella (23), gadis asal Bandung, Jawa Barat, juga punya pengalaman menarik. Dia lahir dari orangtua yang berbeda agama. Ayah

¹ Karya ini telah diterbitkan di *www.suara.com*, 26 Desember 2016

beragama Buddha dan ibu beragama Islam.

Gabriella tidak mengikuti keyakinan kedua orangtua. Dia memilih memeluk Kristiani. Walau beda agama, keluarga sangat menghormati keyakinan Gabriella. Gabriella pun dapat merayakan Natal dengan bahagia. Begitu juga sebaliknya. "Kalau Natal kami kumpul bareng, kalau *nggak* di rumah, di luar. Kalau di rumah mama *masakin* buat aku dan keluarga," kata gadis berkacamata.

Setiap puasa menjelang Paskah, ibunda Gabriella selalu mengingatkan Gabriella untuk makan sahur. "Ayah dan ibu toleransi banget. Kalau waktu Paskah kan sebelumnya ada puasa, selalu diingetin sahur lewat telpon," katanya.

Natal tahun ini, gadis blasteran Sunda dan Tionghoa itu, sedih karena tidak bisa berkumpul dengan keluarga besar. Meski begitu, dia bahagia karena orangtua tetap memberi ucapan selamat. Itu sudah lebih dari cukup. "Seperti biasa ke gereja sendiri, tapi tahun ini *nggak* di Bandung *nggak* bisa kumpul, karena Senin sudah masuk. Tapi paling nanti tahun baru bisa kumpul sama orangtua di Bandung," tutur Gabriella.

Gabriella berharap bangsa ini damai seperti keluarganya. Dia ingin sikap intoleransi seperti yang sekarang terjadi segera ada solusi. Dia ingin masyarakat bangsa Indonesia hidup rukun dan damai. "Aku sih berharap tahun depan bisa lebih damai dan toleransi, bahkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini lebih parah banyak gesekan. Aku, *sih*, berharap. Sulit, *sih*, asal kita bisa saling mengerti dan saling paham, tidak egois sama mau coba saling komunikasi dan tidak *negative thinking*," kata dia.

Kirana (25), perempuan asal Solo, Jawa Tengah, juga terlahir dari keluarga berbeda keyakinan. Tetapi, keluarga ini tetap menunjang tinggi kebhinnekaan. "Ibu aku Muslim,

ayah aku Hindu, tapi kami tetap menghormati satu sama lain. Kalau Natal kami semua kumpul di keluarga yang Kristen, dan kalau lebaran baru kumpul di tempat kami,” kata gadis kulit sawo matang.

Keluarga Kirana sadar toleransi merupakan kekuatan pemersatu. Tanpa sikap itu, bisa jadi hanya konflik yang muncul. “Yang penting kita keluarga. Keluarga aku sangat menjunjung tinggi toleransi,” Kirana menambahkan.

MAKNA TOLERANSI

Juru bicara Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Jerry Sumampouw menjelaskan makna toleransi. Toleransi ialah sifat yang saling menghargai dan menerima satu sama lain. Sikap penuh toleransi harus terus dijaga di negeri ini karena bangsa ini terdiri dari beragam suku dan agama.

Ia mengatakan dalam konteks masyarakat yang beragam seperti Indonesia, nilai toleransi penting menjadi pegangan nilai hidup masyarakat. Dalam konteks sekarang penting memperkuat nilai toleransi karena tantangan radikalisme penyebaran paham yang sengaja mendorong orang membenci dan memusuhi yang lain karena perbedaan agama, suku, dan yang lain. “Saya kira penguatan nilai toleransi memang menjadi penting,” kata Jerry.

Jerry mengingatkan bangsa Indonesia dibangun dengan semangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. “Saya kira itu kan nilai tradisional kita. Dulu memang sudah begitu, kita bangsa ini sudah menyadari masyarakat bangsa ini sejak dulu sudah menyadari menghargai perbedaan ini. Juga bangsa ini didirikan atas perbedaan-perbedaan ini. Ini kan yang penting. *Nah*, karena itu sebetulnya masyarakat kita sejak dulu *nggak* ada masalah terbiasa dengan nilai-nilai hidup seperti ini,” kata dia.

“Jadi saya kira ini yang harus dipertahankan. Saya kira ini nilai tradisional yang merupakan warisan dari para leluhur kita. Sekarang kan ini sedang menghadapi tantangan dan godaan, memang inilah problem kita sekarang. Bagaimana tetap pertahankan nilai toleransi ini berhadapan dengan banyak tantangan tantangan yang merupakan produk masa kini yang lebih banyak sebetulnya di produksi dari luar,” Jerry menambahkan.

Ustadz Soleh Mahmud atau akrab disapa Solmed menambahkan dalam Islam juga diajarkan toleransi umat beragama. Umat harus menghormati orang yang berbeda agama. “Toleransi itu satu keniscayaan yang diajarkan di dalam Islam. Kalau kita pernah melihat ayat *Lakum Diinukum Waliyadin* bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami, itu sebuah toleransi. Ada ayat lain yang berbunyi *Laa Ikra Ha fiddin* tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam, itu toleransi bahkan Rasulullah melarang untuk kita mencari musuh,” kata Solmed.

Suami artis April Jasmine mengatakan Muhammad SAW mengajarkan umat untuk saling membantu dan menghormati satu sama lain. “Ini sebuah toleransi yang diajarkan dalam Islam, bahkan *Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam* juga bertetangga dengan Yahudi, Nasrani. Ini juga bagian dari toleransi, selama kita berhubungan baik dalam sosial, kemasyarakatan, ekonomi sesuatu yang sah-sah saja. Kalau yang nggak boleh itu kita diajak untuk ikut merayakan, karena di situ ada keyakinan. Kalau sisi kemanusiaan membantu sesama itu sangat toleransi,” kata dia.

Ustadz Rahman dari Pondok Pesantren Assyafi'iyah menambahkan *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* mengajarkan toleransi dengan tidak mengganggu ibadah agama lain dan tidak merusak tempat peribadatan orang lain.

Toleransi, kata dia, juga ditunjukkan dengan sikap saling menolong. “Saling mengucapkan itu dalam Islam nggak ada, karena Rasulullah belum pernah mengajarkan dan belum pernah mengucapkannya. Tapi kita saling menghormati saja mereka yang menjalankan, toleransi kita cukup menghormati. Memberi makanan, saling membantu satu sama lain,” tutur Rahman.

Dalam kehidupan rumah tangga khususnya, meski berbeda agama, bakti kepada orangtua tetap harus dilakukan.